

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahunan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dijadwalkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur yang akan disampaikan ke DPRD untuk dibahas secara internal oleh DPRD. Hasil pembahasan ditetapkan menjadi keputusan DPRD yang bersifat rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

LKPJ 2008 ini merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur ini disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, tentang pakar-Pakar Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
13. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008.

LKPJ Gubernur Tahun 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan; |
| BAB II | Kebijakan Pemerintahan Daerah; |
| BAB III | Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| BAB IV | Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; |
| BAB V | Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; |
| BAB VI | Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan; |
| BAB VII | Penutup. |

B. Dasar Hukum Pembentukan Provinsi DKI Jakarta

1. Sejarah Kota Jakarta

Pada tahun 1527, berkembang sebuah kawasan perdagangan antar pulau yang terletak di muara Sungai Ciliwung dengan inti sebuah pelabuhan laut yang dikenal sebagai Bandar Sunda Kelapa. Pada tanggal 22 Juni 1527 Faletehan sebagai penguasa wilayah Bandar Sunda Kelapa, mengganti Sunda Kelapa menjadi fathan mubina atau Jayakarta yang artinya kemenangan akhir. Kota pelabuhan Jayakarta menarik banyak pendatang asing dari Eropa, Cina dan Arab terutama pedagang dari negeri Belanda (VOC), yang menetap di Jayakarta. Pada tahun 1611 VOC mendapat izin untuk membangun kompleks perkantoran, gudang dan tempat tinggal orang Belanda, yang berlokasi di dekat muara tepi bagian timur Sungai Ciliwung. Kemudian di lokasi ini dibangun benteng sebagai pusat perdagangan VOC. VOC selanjutnya mengubah nama Jayakarta menjadi *Batavia*. Tanggal 4 Maret 1621, Pemerintah Belanda membentuk *Stad Batavia* dan VOC diberi kewenangan oleh Pemerintah Belanda untuk melaksanakan pemerintahan *Stad Batavia* tersebut. Pada tahun 1799 karena merugi VOC dibubarkan, sehingga pemerintahan daerah-daerah yang selama itu dikuasai VOC diambil alih kembali oleh Pemerintah Belanda. Sejak saat itu Pemerintah Belanda menjadikan daerah-daerah bekas VOC sebagai daerah otonomi yang dinamakan Hindia Belanda dibawah pimpinan seorang Gubernur Jendral. Pada tanggal 1 April 1905, *Stad Batavia* diubah menjadi *Gemeente Batavia*, yang diberi kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. *Gemeente Batavia* merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah *Gemeente Batavia* kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu). Wilayah Karesidenan (*Stad*) *Batavia* dibagi menjadi 5 (lima) wilayah yang lebih kecil, yang disebut “*afdeling*” (kabupaten/kota), yaitu (1) *Afdeling Batavia* (kota dan pinggiran kota *Batavia*), (2) *Afdeling Meester Cornelis* (sekarang Jatinegara), (3) *Afdeling Tangerang* (4) *Afdeling Buitenzorg* (Bogor) dan (5) *Afdeling Karawang*.

Tahun 1908, wilayah *Afdeling* Batavia dibagi menjadi 2 *Distrik*, yakni *Distrik Batavia* dan *Weltevreden*, yang dibagi lagi menjadi 6 sub *Distrik* (*onderdistrik*). *Distrik Batavia* terdiri dari sub *Distrik* Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan *Distrik Weltevreden* terdiri dari sub *Distrik* Gambir, Senen dan Tanah Abang. Pada tahun 1922 keluar Undang-Undang (UU) tentang Pembaharuan Pemerintahan, diikuti terbitnya UU Propinsi, UU Kabupaten (*Regentschap*, 1924) dan UU Kota (*Stadsgemeente*, 1926). Selanjutnya "*Gemeente Batavia*" ditetapkan menjadi Pemerintahan Kota (*Stadsgemeente Batavia*). UU Pemerintahan Kota (*Stadsgemeente*) tahun 1926 menetapkan sistem pemerintahan Kota (*stadsgemeente*) yang terdiri dari: (1) DPRD (*Raad*); (2) DPD (*College van Burgemeester en Wethouders*) dan (3) Walikota (*Burgemeester*). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota *Batavia* jatuh ke tangan balatentara Jepang, tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan UU Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (*Syuu*). Keresidenan (*Syuu*) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (*Ken*) dan Kota (*Shi*).

Kalau *stadsgemeente* hanya merupakan badan yang mengurus rumah tangganya saja, tanpa melaksanakan urusan kepamongprajaan, maka menurut UU Tata Pemerintahan Daerah masa Pemerintahan Jepang, "*shi*" (*stadsgemeente*) mengerjakan semua urusan pemerintahan, termasuk kepamongprajaan dalam lingkup wilayahnya. Urusan pemerintahan (pamongpraja) di dalam '*stadsgemeente*' yang sebelumnya diurus oleh Regent (Bupati), Wedana, Asisten-Wedana, Kepala Kampung atau *Wijkmeester*, sekarang diurus dan merupakan kewenangan "*Shichoo*" (Walikota). Mereka itu mejadi pegawai shi dan menjalankan urusan pemerintahan shi dibawah pemerintahan dan pimpinan "*shichoo*".

Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut, "*Gunseikan*" (Kepala Pemerintahan Militer Jepang) dapat membentuk pemerintahan kota khusus (*tokubetsu shi*). Beda pemerintahan kota khusus (*tokubetsu shi*) dengan

pemerintahan kota (*Shi*), adalah bahwa pemerintahan kota khusus (*tokubetsu shi*) tidak dibawah Keresidenan (*syuu*), melainkan langsung dibawah Pemerintahan Militer Jepang (*gunseikan*). Jakarta adalah pemerintahan kota khusus (*Jakarta Tokubetsu Shi*) yang dipimpin oleh walikota khusus (*tokubetsu Shichoo*). Ini berarti kedudukan Jakarta meningkat dari kota (*Shi*) menjadi kota khusus (*Tokubetsu shi*).

Walikota khusus Jakarta (*tokubetsu Shichoo*) dibantu oleh beberapa pegawai tinggi (*Zyoyaku*). Walikota dan pegawai tinggi diangkat oleh Pemerintahan Militer Jepang (*Gunseikan*).

Selama pemerintahan militer Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (*tokubetsu Shi*) di Indonesia. Walikota pertama kota khusus Jakarta adalah *Tsukamoto* dan yang terakhir adalah *Hasegawa*. Setelah kemerdekaan, dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah (1) Soewiryo, 1945-1951, (2) Syamsuridjal, 1951-1953 dan (3) Soediro, 1953-1960.

Pada tanggal 15 Januari 1960 kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964), terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966), terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta. Pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977), sebutan Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta, dengan Gubernurnya yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto, terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Pada periode

Gubernur Sutiyoso (1997-2008) terbit UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit UU Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah.

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

C. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

1. Kondisi Geografis

a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Jakarta di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebelah barat dengan Provinsi Banten. Di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang \pm 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 sungai dan 2 kanal.

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 6 12' Lintang Selatan dan 106 48" Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan 661,52 km² dan berupa lautan 6.977,5 km². Wilayah DKI Jakarta memiliki sekitar 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Ketinggian maksimum Kota Jakarta 7 meter di atas permukaan laut, sedangkan sebagian wilayah khususnya di sekitar pantai laut Jawa terdapat beberapa tempat yang berada di bawah permukaan air laut pasang sehingga rawan genangan.

Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km², Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km² Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km² Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km² dan Jakarta Utara dengan luas daratan 142,40 km², serta Kabupaten Administrasi dengan luas daratan 11,81 km². Pembagian wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta

No	Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi	Jumlah			
		Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Jakarta Pusat	8	44	393	4.669
2	Jakarta Utara	6	31	414	4.823
3	Jakarta Timur	10	65	696	7.794
4	Jakarta Selatan	10	65	578	6.122
5	Jakarta Barat	8	58	577	6.372
6	Kep. Seribu	2	4	24	119
	Jumlah	44	267	2.682	29.899

Sumber : Biro Administrasi Wilayah Pemprov DKI Jakarta Tahun 2008

b. Iklim

Keadaan iklim kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 34,4° C pada siang hari dan suhu minimum berkisar 23,8° pada malam hari.

Sementara itu, curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2007,

dengan tingkat kelembaban udara mencapai 73,0 – 78,0 persen dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m / detik.

c. Geologi

Seluruh dataran terdiri dari endapan *Pleistocene* terdapat \pm 50 m dibawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan *alluvial*, sedang dataran rendah pantai merentang kebagian pedalaman sekitar 10 km. di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan *alluvium*. Di wilayah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10 – 25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8 – 15 m. Pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 m.

Dengan kondisi geografis seperti itu, Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus lima tahunan, Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada bulan Februari tahun 2002 dan 2007 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan dalam penataan kota, karena memerlukan dana yang sangat besar untuk pembebasan lahan milik warga.

2 Kondisi Demografis.

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2008 menurut data statistik sebanyak 9.146.181 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.491.392 dan perempuan 4.654.789 jiwa, sebagian besar penduduk merupakan usia produktif (15-64 tahun) yaitu 72,59% sebagaimana terlihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Jumlah Penduduk DKI Jakarta
Menurut Kelompok Umur Tahun 2008**

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0 – 4	392.498	376.782	769.280
2	5 – 9	353.366	346.039	699.405
3	10 – 14	367.527	372.578	740.105
4	15 – 19	369.489	399.791	769.280
5	20 – 24	380.078	443.312	823.390
6	25 – 29	485.384	556.294	1.041.678
7	30 – 34	534.283	555.388	1.089.671
8	35 – 39	436.563	426.612	863.175
9	40 – 44	325.012	323.277	648.289
10	45 – 49	252.199	257.023	509.222
11	50 – 54	200.816	200.600	401.416
12	55 – 59	150.803	145.165	295.968
13	60 – 64	100.513	96.704	197.217
14	65 – 69	66.624	67.111	133.735
15	70 – 74	40.716	44.510	85.226
16	75 +	35.521	43.603	79.124
	Jumlah	4.491.392	4.654.789	9.146.181

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008.

Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 4,29 juta orang, terdiri atas laki-laki 2,53 juta orang dan perempuan sebanyak 1,66 juta orang. Menurut lapangan pekerjaan, kegiatan ekonomi yang paling banyak menyerap pekerja adalah bidang perdagangan, restoran dan hotel (37,04%); kemudian jasa-jasa (24,17%); dan industri pengolahan (16,11%). Dengan demikian, bidang jasa-jasa atau sektor tersier menyerap tenaga kerja sebanyak 79,11 persen.

Tabel 1.3.
Presentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas)
menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2008

Lapangan Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	15,17	0,60	4,50	0,27	20,27	0,47
2. Industri	414,88	16,38	260,06	15,67	691,32	16,11
3. Bangunan	162,74	6,43	15,93	0,96	185,10	4,31
4. Perdagangan, Restoran & Hotel	862,17	34,05	693,64	41,80	1.589,86	37,04
5. Pengangkutan dan Komunikasi	351,40	13,88	65,27	3,93	430,55	10,03
6. Keuangan, Persewaan, dan Jasa	198,03	7,82	103,47	6,23	309,32	7,21
7. Jasa-jasa	504,76	19,93	512,71	30,89	1.037,40	24,17
8. Lainnya	23,22	0,92	4,01	0,24	28,15	0,66
Jumlah	2.532,37	100,00	1.659,59	100,00	4.291,96	100,00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008

Menurut tingkat pendidikan (khususnya bagi penduduk yang berusia 10 tahun ke atas) tercatat sebanyak 2.534.886 jiwa atau 33,71 persen dari penduduk yang berusia 10 tahun ke atas berhasil menyelesaikan pendidikan dari tingkatan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi mencapai sebanyak 979.250 orang yang terdiri atas sebanyak 347.825 orang pada level DI hingga DIII, dan bahkan sebanyak 631.425 orang atau sebesar 8,35 persen berpendidikan sarjana.

**Tabel 1.4. Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2008
(10 tahun ke atas)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	327.714 (9,99)	576.483 (15,05)	949.197 (12,55)
2	SD	674.732 (18,08)	875.553 (22,85)	1.550.285 (20,50)
3	SMTP	739.725 (19,82)	795.161 (20,75)	1.534.886 (20,29)
4	SMTA	1.418.794 (38,01)	1.131.059 (29,52)	2.549.853 (33,71)
5	Diplomal I – III	164.381 (4,40)	183.444 (4,79)	347.825 (4,60)
6	Universitas	361.907 (9,70)	269.518 (7,03)	631.425 (8,35)
	Jumlah	3.723.253 (100,00)	3.831.218 (100,00)	7.563.471 (100,00)

Sumber BPS, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008

3 Kondisi ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan perekonomian daerah salah satunya dapat dilihat dari gambaran ekspor produk DKI Jakarta, yang merupakan kemampuan provinsi DKI Jakarta dalam menghasilkan tingkat devisa. Nilai ekspor produk DKI Jakarta periode Januari–November 2008 mencapai 8.720,79 juta dollar Amerika, meningkat 18,59 persen dibandingkan periode Januari-November 2007 yang bernilai 6.581,25 juta dollar Amerika.

Lima kelompok/jenis komoditi produk-produk non migas yang dihasilkan dari wilayah DKI Jakarta yang mempunyai nilai ekspor tertinggi selama periode Januari–Oktober 2008 adalah pakaian dengan nilai 1.294,58 juta dollar Amerika meningkat 38,80 persen

dibanding periode tahun 2007 yang bernilai 932,69 juta dollar Amerika; kendaraan bermotor untuk jalan raya 1.229,20 juta dollar Amerika meningkat 133,37 persen dibanding periode tahun 2007 yang sebesar 525,80 juta dollar Amerika, emas bukan untuk moneter 649,45 juta dollar Amerika meningkat 61,76 persen dibanding periode tahun 2007 yang bernilai 401,49 juta dollar Amerika; mesin listrik, aparat dan alat-alatnya 561,97 juta dollar meningkat sebesar 111,48 persen dibanding periode tahun 2007 yang bernilai 265,73 juta dollar Amerika; dan ikan, kerang-kerangan, moluska dan olahannya sebesar 274,00 juta dollar meningkat 83,88 persen dibanding periode tahun 2007 yang bernilai 149,01 juta dollar.

Lima Negara yang menjadi pasar utama dari produk-produk yang dihasilkan oleh unit-unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta untuk periode Januari-November 2008 adalah Amerika Serikat; Jepang; Singapura; Malaysia; dan Australia dengan *market contribution* masing-masing Negara terhadap keseluruhan nilai ekspor produk DKI Jakarta adalah 13,41 persen; 12,01 persen; 8,56 persen; 7,54 persen; dan 6,14 persen.

Untuk pakaian; kendaraan bermotor untuk jalan raya; emas; bukan untuk moneter; mesin listrik; aparat dan alat-alatnya; serta ikan; kerang-kerangan; moluska dan olahannya merupakan 5 (lima) jenis produk non migas DKI Jakarta yang mempunyai nilai ekspor tertinggi pada periode Januari-November 2008

**Tabel 1.5 Pasar Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta
Periode Januari-Oktober 2007 dan Januari-Oktober 2008**

Kawasan Negara Tujuan	Januari-Oktober 2007		Januari-Oktober 2008	
	Nilai (FOB juta dollar Amerika)	Persen	Nilai (FOB juta dollar Amerika)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Asia	4.456,36	60,60	5.546,60	63,60
- ASEAN	2.062,48	28,05	2.480,15	28,44
- Non ASEAN	2.393,88	32,55	3.066,45	35,16
2. Afrika	382,50	5,20	435,95	5,00
3. Amerika	1.465,15	19,92	1.426,46	16,36
4. Australia dan Oceania	435,63	5,92	580,73	6,66
5. Eropa	613,99	8,35	731,04	8,38
Jumlah	7.353,64	100,00	8.720,79	100,00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2009.

Pasar utama dari ekspor produk-produk DKI Jakarta adalah Asia. Untuk bulan November 2008, sebesar 65,48 persen dari keseluruhan ekspor produk DKI Jakarta dipasarkan ke kawasan Asia; Amerika 13,79 persen; Eropa 7,69 persen; Australia & Oceania 7,06 persen; dan Afrika 5,71 persen. Bulan November 2008, negara yang menjadi pasar utama di masing-masing kawasan adalah Singapura untuk kawasan Asia, dengan *market* sebesar 10,38 persen; Amerika Serikat untuk kawasan Amerika dengan *market* sebesar 10, 59 persen; Inggris untuk kawasan Eropa dengan *market* sebesar 1,75 persen; Australia untuk kawasan Australia dan Oceania dengan *market* sebesar 6,58 persen; serta Afrika Selatan untuk kawasan Afrika dengan *market* sebesar 1,00 persen. Selain ekspor, potensi daerah juga dapat dilihat dari gambaran tingkat pariwisata khususnya dari wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jakarta melalui 3 pintu masuk (Soekarno-Hatta, Tanjung Priok, dan Halim Perdanakusuma) periode Januari-Desember 2008 mencapai 1.534.785 kunjungan yang berarti mengalami peningkatan sebesar 26,21 persen dibandingkan periode Januari-Desember 2007 yang

mencapai 1.216.057 kunjungan. Walaupun di tahun 2008 ini, terjadi krisis global, nilai rupiah menurun, serta adanya *travel warning* dari negara-negara di Eropa, namun ternyata kunjungan wisman ke Jakarta justru meningkat. Promosi yang efektif dan penyebarluasan informasi situasi keamanan nasional yang sangat kondusif merupakan salah satu strategi untuk terus dapat meningkatkan kunjungan wisman ke kota Jakarta.

Tahun 2008, Pemerintah DKI Jakarta dalam Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) mentargetkan jumlah kunjungan Wisatawan Manca Negara (Wisman) sebanyak 1,23 juta orang. Beberapa kekuatan industri pariwisata kota Jakarta yang antara lain adalah pusat pasar yang relatif terkonsentrasi, faktor investasi asing, dan keamanan kota Jakarta yang sangat mendukung diyakini masih akan berperan besar sebagai faktor penarik berkunjungnya para wisman ke kota Jakarta. Pada kenyataannya hasil yang dicapai cukup menggembirakan meskipun krisis global mulai terjadi pada akhir tahun 2008.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi Kota Jakarta tahun 2008 yang digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat sebesar 6,18 persen dibandingkan tahun 2007 yang sebesar 6,44 persen. Meskipun ekonomi tahun 2008 tumbuh positif, namun bila dilihat secara sektoral hampir seluruh sektor mengalami perlambatan kecuali sektor listrik-gas-air bersih. Krisis keuangan global menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta. Dampak yang terbesar adalah menurunnya permintaan dari luar negeri yakni menurunnya ekspor produk Jakarta utamanya komoditi pakaian dan kendaraan bermotor. Penurunan ini mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan. Disamping itu turunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM yang sebesar 28 persen pada triwulan kedua tahun 2008 juga turut mendorong perlambatan ekonomi DKI

Jakarta. Dalam tahun 2008 pertumbuhan tertinggi dicapai sektor pengangkutan dan komunikasi (14,97%) dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian (0,32%). Ada tiga sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan agregat, yakni sektor listrik-gas-air bersih, sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 7,67 persen; sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 6,25 persen; dan sektor transportasi-komunikasi sebesar 14,97 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2008 mencapai sebesar 6,06 persen, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.

**Tabel 1.6 PDRB menurut Lapangan Usaha DKI Jakarta tahun 2008
Atas Dasar Konstan 2000 (miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha/Sektor	PDRB Harga Konstan		Laju Pertum- buhan
	2007	2008	
1. Pertanian	298,41	300,72	0,77
2. Pertambangan dan Penggalian	937,34	940,37	0,32
3. Industri Pengolahan	56.195,16	58.367,31	3,87
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	2.183,81	2.321,90	6,32
5. Konstruksi	33.600,76	36.178,85	7,67
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	72.249,71	76.766,39	6,25
7. Pengangkutan dan Komunikasi	30.697,41	35.291,56	14,97
8. Keuangan, Perseroan dan Jasa Perusahaan	98.558,33	102.807,65	4,31
9. Jasa-jasa	38.250,32	40.564,30	6,05
PDRB DKI Jakarta	332.971,25	353.539,06	6,18

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008

Bila dilihat dari nilai tambah sektoral menurut harga berlaku, peranan tiga sektor utama yakni sektor keuangan persewaan-jasa perusahaan, sektor perdagangan-hotel-restoran, serta sektor industri pengolahan terhadap struktur perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2008 sekitar 64,96 persen. Ketiga sektor ini, masing-masing memberikan kontribusi yaitu 28,56 persen untuk sektor keuangan- persewaan-jasa perusahaan; sebesar 20,68 persen dari sektor perdagangan-hotel-restoran dan sebesar 15,73 persen dari sektor industri pengolahan.

**Tabel 1.7 Struktur Perekonomian DKI Jakarta menurut lapangan usaha
Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2008**

Lapangan Usaha/Sektor	PDRB Harga Konstan		Distribusi
	2007	2008	
1.Pertanian	571,43	687,83	0,10
2.Petambangan dan Penggalian	2.636,09	3.221,26	0,48
3.Industri Pengolahan	90.446,59	106.537,73	15,73
4.Listrik, Gas dan Air Bersih	6.021,39	7.591,33	1,12
5.Konstruksi	63.448,56	76.502,86	11,29
6.Perdagangan, Hotel dan Restoran	115.311,32	140.064,01	20,68
7.Pengangkutan dan Komunikasi	52.793,00	63.391,78	9,36
8.Keuangan, Perseroan dan Jasa Perusahaan	162.297,78	193.459,78	28,56
9.Jasa-jasa	72.923,19	85.988,67	12,69
PDRB DKI Jakarta	566.449,36	677.445,24	100,00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008

c. Inflasi

Indikator lain yang sangat penting dalam menentukan kondisi dan stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter. Untuk mengendalikan inflasi perlu perpaduan dan kerjasama harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat secara rata-rata. Inflasi juga dapat diartikan sebagai kecenderungan kenaikan harga-harga umum secara terus menerus. Inflasi DKI Jakarta selama tahun 2008 mencapai 11,11 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya sebesar mencapai 6,04 persen. Tingginya inflasi pada tahun 2008 tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Juni 2008 yang kemudian diikuti oleh kenaikan tarif angkutan di DKI Jakarta. Penurunan tarif angkutan dalam kota pada akhir tahun 2008 ternyata belum cukup untuk menekan tingkat inflasi di DKI Jakarta.

**Tabel 1.8 Inflasi DKI Jakarta menurut kelompok pengeluaran,
Tahun 2007 - 2008**

No	Kelompok	Inflasi	
		2007	2008
1	UMUM	6,04	11,11
2	BAHAN MAKANAN	11,40	15,48
3	MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	5,36	12,91
4	PERUMAHAN	4,81	14,84
5	SANDANG	8,15	8,56
6	KESEHATAN	3,99	7,31
7	PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAAHRAGA	9,09	5,56
8	TRANSPOR DAN KOMUNIKASI	1,14	6,20
*) Sejak Juni 2008 menggunakan tahun dasar 2007 (2007=100), sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002 (2002=100)			

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008

Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, tingkat inflasi di DKI Jakarta pada tahun 2008 masih lebih tinggi. Inflasi nasional pada tahun 2008 sebesar 11,06 persen, sedangkan inflasi DKI Jakarta sebesar 11,11 persen.

**Tabel 1.9. Inflasi Nasional menurut kelompok pengeluaran,
Tahun 2007 - 2008**

No	Kelompok	Inflasi	
		2007	2008
1	Umum	6.59	11.06
2	Bahan makanan	11.26	16.35
3	Makanan jadi dan tembakau	6.41	12.53
4	Perumahan, air bersih, penerangan, dan bahan bakar	4.88	10.92
5	Pakaian	8.42	7.33
6	Kesehatan	4.31	7.96
7	Pendidikan dan rekreasi	8.83	6.66
8	Transport, komunikasi dan jasa keuangan	1.25	7.49
*) Sejak Juni 2008 menggunakan tahun dasar 2007 (2007=100), sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002 (2002=100)			

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan 2007–2012 adalah:

”JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai.
2. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi.

Jakarta adalah sebuah kota yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika pemerintah dan masyarakatnya sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci. Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2007-2012 adalah sebagai berikut :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *Good Governance*;
2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima;

3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan;
4. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Makna misi yang di maksud adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "*Good Governance*", bermakna bahwa tata pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) prinsip *Good Governance*, yakni:
 - a. Partisipasi masyarakat
 - b. Tegaknya supremasi hukum
 - c. Transparansi
 - d. Kesetaraan
 - e. Daya tanggap kepada *stakeholders*
 - f. Berorientasi pada visi
 - g. Akuntabilitas
 - h. Pengawasan
 - i. Efektivitas dan efisiensi
 - j. Profesionalisme

Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui peningkatan kinerja aparatur, sistem dan unit kerja. Misi ini akan mewujudkan efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima, bermakna bahwa pelayanan prima dilakukan dengan mengutamakan norma pelayanan yakni: ramah, efisien, bermutu, cepat, transparan dan

berkepastian hukum. Pelayanan prima terutama akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keamanan, ketertiban, hukum, sarana dan prasarana kota, serta perhubungan dan transportasi.

3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, bermakna bahwa pemberian otoritas dilandasi oleh pertimbangan bahwa di kalangan masyarakat telah ada komunitas keahlian tertentu yang berkemampuan untuk berpartisipasi secara luas pada pembangunan. Pemberian otoritas telah dapat diimplementasikan pada bidang tertentu, sesuai dengan kemampuan masyarakatnya.

Lebih lanjut melalui pemberdayaan masyarakat ini, terbuka pula ruang publik untuk bermusyawarah, dan sekaligus merupakan proses pembelajaran kehidupan demokratis.

4. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan keberkelanjutan, bermakna bahwa untuk menjamin kenyamanan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kota terutama berkaitan dengan: pengendalian banjir, kelancaran arus lalu lintas, penyediaan layanan air bersih, penyediaan ruang terbuka hijau skala kota dan taman interaktif.
5. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, bermakna bahwa Jakarta memiliki "*favorable climate*" untuk 7 (tujuh) aset kota, yakni:
 - a. *Human*
 - b. *Social*
 - c. *Cultural*

d. Intellectual and Creative

e. Natural

f. Environmental

g. Infrastructure

Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang serasi antar bidang dan wilayah. Kesejahteraan yang diarahkan adalah meningkatnya derajat kualitas kehidupan yang sinergis untuk ketujuh aset kota dimaksud.

B. Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta

1. Tujuan Pembangunan Daerah

- a. Meningkatnya kualitas layanan publik sesuai prinsip-prinsip layanan prima.
- b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
- c. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota.
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- e. Meningkatnya kebersamaan antara Pemerintah Provinsi, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, menjawab tantangan masa depan, dan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki kota.
- f. Makin bertambah erat dan produktifnya jejaring kerja sama (networking) pemerintah provinsi dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional, regional dan internasional.
- g. Bertambah baiknya tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah.

2 Strategi Pembangunan Daerah

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota yang mencakup aset *Human, Social, Cultural, Intellectual and Creative, Natural,*

Environmental dan Infrastructure, dalam rangka memberikan kontribusi guna terwujudnya kota Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua serta berkelanjutan.

- b. Pengembangan jejaring kerja sama (*networking*) nasional, regional dan internasional, meliputi antara lain pertukaran informasi, penggunaan sumber-sumber yang dibutuhkan secara bersama, pertukaran barang dan jasa, pengetahuan serta keahlian yang saling menguntungkan.
- c. Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik.
- d. Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur ekonomi/sosial kota yang strategis.
- e. Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja, diversifikasi dan optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah dan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta (*public private partnership*).
- f. Konsistensi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan, mengembalikan keadaan udara bersih, laut biru dan air tanah yang tidak tercemar.
- g. Membangun model kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, menjawab tantangan masa depan, dan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki kota, dengan tahapan antara lain:
 - 1) Memilih urusan/masalah di setiap tingkat pemerintahan yang akan menjadi model perwujudan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
 - 2) Membuat *pilot project* tentang mekanisme penyelesaian masalah kota, dengan pemberian otoritas kepada masyarakat (komunitas profesional) untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahannya.
 - 3) Apabila mekanisme tersebut berhasil, maka proses pembangunan kesepakatan tersebut, dapat ditingkatkan menjadi kebijakan daerah.
 - 4) Replikasi dan penyempurnaan model pada urusan lainnya.

- h. Membangun model peningkatan kinerja jejaring kerjasama dilakukan dengan tahapan:
- 1) Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama untuk penyelesaian masalah kota seperti banjir, kemacetan dan lain-lain.
 - 2) Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama untuk pengembangan kerjasama antar Kota/Kabupaten Jabodetabekjur maupun dengan Provinsi se-Jawa Bali.
 - 3) Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama internasional untuk permasalahan yang spesifik di Ibukota.
- i. Membentuk birokrasi yang efektif melalui:
- 1) Perampingan organisasi.
 - 2) Penguatan fungsi regulator di tingkat Provinsi.
 - 3) Pendelegasian kewenangan Provinsi dan fungsi operator sampai ke tingkat wilayah atau satuan kerja operasional.
 - 4) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah.
 - 5) Penerapan prinsip *good governance* pada setiap tingkat pemerintahan.
 - 6) Pemanfaatan teknologi informasi/internet pada semua tingkat pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan.
 - 7) Pengintegrasian dan pembentukan satuan kerja perijinan dan investasi.
 - 8) Pembentukan fungsi pengelolaan hutang dan aset pemerintah Provinsi (*debt management and asset management unit*).
 - 9) Penerapan dan penyempurnaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada satuan kerja operasional.
 - 10) Penetapan SKPD sebagai *pilot project* untuk model penerapan kaidah *Good Governance*. Pada SKPD tersebut, secara terencana dilakukan perbaikan pada proses kerja, organisasi, SDM, infrastruktur dan teknologi yang digunakan.

- j. Membangun kapasitas penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan fungsi *crisis centre*, pemadam kebakaran dan ambulan gawat darurat dalam satu pengelolaan.
- k. Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin antara lain melalui pengelolaan data gakin terpadu, distribusi beras (*raskin*), pendidikan SD, SMP dan SMK, pelayanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan, dan pelayanan pemakaman
- l. Menyediakan subsidi langsung berupa dana *Public Service Obligation* (PSO) untuk pelayanan publik tertentu, antara lain angkutan umum dan pelayanan rawat inap.
- m. Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk *performance agreement contract* antara pimpinan dan bawahan secara berjenjang.

3 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan daerah adalah:

- a. Pendekatan Partisipatoris
Pembangunan berbasis komunitas, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara sinergis.
- b. Pendekatan Teknis Administratif
Reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan, penataan mekanisme kerja organisasi, penataan administrasi sumber daya aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur, dengan pelimpahan tugas yang lebih luas kepada Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

C. Program *Dedicated*

Program Prioritas Daerah yang bersifat top down dikenal dengan sebutan Program *Dedicated* yang merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, lintas sektor, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. memelihara urgensinya, dapat bersifat *multi-years* yaitu kegiatan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, berbentuk fisik, dalam satu kesatuan fungsi dan satu kesatuan kontrak. Di bidang fisik, terdapat pembangunan *fly over*, *underpass*, banjir kanal timur, transportasi massal dan sejenisnya. Di bidang sosial, terdapat perbaikan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan sejenisnya. Mekanisme pengalokasian anggaran untuk Program *Dedicated* menggunakan pendekatan *top-down* sehingga mengikat instansi wilayah maupun sektoral untuk melaksanakan program tersebut. Adapun Program *Dedicated* tahun 2008 diarahkan untuk menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Normalisasi Kali

Tujuan normalisasi agar kali dapat berfungsi dengan baik bagi lingkungannya. Pada tahun 2008 kali yang menjadi sasaran antara lain Ciliwung, Gajah Mada, Sekretaris, Mookervart serta Cakung Lama.

2. Pembebasan Tanah Banjir Kanal Timur

Pada tahun 2008 ditargetkan pembebasan lahan profil basah seluas 450.000 m².

3. Normalisasi Waduk

Pada tahun 2008 sasaran waduk yang akan dinormalisasikan adalah waduk Pluit, Papanggo Sunter Utara, Sunter Selatan, Sunter Hulu, Kelapa Dua Wetan, Cilangkap, dan Pondok Ranggon.

4. Penyempurnaan Pelayanan *Busway* Koridor I – X

Pada tahun 2008 penyempurnaan pelayanan *Busway* Koridor I – X, meliputi kegiatan pembebasan lahan, peningkatan jalan, pemeliharaan

jalur, penyempurnaan taman, pembangunan dan penyempurnaan prasarana dan forum partisipasi masyarakat.

5. Persiapan Pembangunan *Mass Rapid Transport* (MRT)

Pada tahun 2008 persiapan pembangunan MRT meliputi pembebasan lahan Jl Fatmawati Raya, pembebasan lahan untuk Depo MRT Lebak Bulus, dan pembangunan/peningkatan jalan-jalan alternative pra-konstruksi MRT.

6. Pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang Tahap I

7. Pembangunan/Peningkatan jalan/jembatan mendukung Sentra Primer Timur

Pada tahun 2008 kegiatannya terdiri dari pembangunan jalan Penggilingan Raya dan jalan Pulo Gebang.

8. Pembangunan/Peningkatan Jalan/Jembatan Mendukung Sentra Primer Barat

Pada tahun 2008 kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan *Frontage Tol Road* (jalan disisi utara Tol Jakarta – Merak).

9. Penyelesaian dan Pembangunan Rumah Susun (Rusun)

Pada tahun 2008 kegiatannya terdiri dari penyelesaian Rusun Marunda, Pulo Gebang, Pinus Elok dan Cakung Barat, serta perencanaan untuk pembangunan 1000 Unit Rusun.

10. Penyelenggaraan Pendidikan

Pada tahun 2008 pemenuhan sasaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah untuk 702.739 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN); 258.714 siswa SMPN; 92.374 siswa SMAN, dan 41.615 siswa SMKN.

11. Pelayanan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin (Gakin)/ Kejadian Luar Biasa (KLB)/Bencana.

12. Penanggulangan Demam Berdarah (DBD), *Tuberculosis* (TBC) dan Penyakit Pasca Banjir

13. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta

14. Penerapan *Good Governance*

Kegiatan yang dilakukan, antara lain *e Procurement*, Perizinan Usaha Berbasis Internet, Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) SD/SMP/SMA/SMK Negeri Berbasis Internet, Informasi Rencana Bisnis (RBA), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (TransJak, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Akademi Perawat (Akper), Ambulan Gawat Darurat, dan Stadion Lebak Bulus) berbasis Internet, Informasi tentang mekanisme, syarat administratif dan besaran biaya untuk setiap perijinan berbasis Internet, Informasi tentang Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hasil audit berbasis Internet.

15. Pengembangan Wisata Kotatua

Bertujuan agar secara bertahap dapat diwujudkan destinasi wisata sejarah Kotatua. Pada tahun 2008 kegiatannya terdiri dari konservasi fisik gedung, penataan pedestrian dan perbaikan jalan/saluran, penerangan jalan, penghijauan Kawasan Kotatua.

16. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Pada tahun 2008 kegiatan untuk meningkatkan RTH adalah sebagai berikut: penghijauan bantaran Sungai Ciliwung Bawah, Pesanggrahan, Sekretaris dan lain-lain, perluasan taman interaktif, taman kota, refungsi taman dan pedestrianisasi serta pembebasan tanah masyarakat yang terkena jalur hijau.

17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pada tahun 2008 kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah pemberian hibah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bina Ekonomi untuk Lembaga Keuangan Mikro Kelurahan, Hibah PPMK Bina Fisik dan Sosial kepada Dewan Kelurahan dan Kegiatan Penguatan Pelayanan Kelurahan.

18. Pengendalian Polusi Udara.

D. Program APBD 2008

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan di atas maka, kebijakan prioritas pengalokasian APBD 2008 diarahkan untuk menjamin terlaksananya ketiga prioritas pembangunan diatas. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditunjukkan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Lebih rinci prioritas APBD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prioritas pengalokasian pada kegiatan yang berskala besar, nyata dan untuk kepentingan masyarakat luas (program *dedicated*)

2. Prioritas pengalokasian pada SKPD yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan langsung publik, misalnya panti sosial, puskesmas, sekolah.
3. Prioritas pengalokasian untuk menjamin keseimbangan kapasitas aparat dan kemudahan akses masyarakat (penguatan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan, serta PPMK)
4. Prioritas pengalokasian untuk meningkatkan proporsi belanja tingkat wilayah (kotamadya, kecamatan dan kelurahan) melalui pendelegasian kewenangan untuk urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
5. Prioritas pengalokasian untuk penambahan kesejahteraan pegawai yang diperoleh dari efisiensi belanja non-fisik.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan dengan berpedoman pada, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sejalan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut maka pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalamnya memuat tentang hak dan kewajiban daerah yang dibayarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Data realisasi pengelolaan keuangan yang disajikan dalam LKPJ Tahun 2008 belum audited karena belum diperiksa oleh BPK-RI.

B. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dengan ketentuan ini maka struktur Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan Pendapatan Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari APBN merupakan dana penyesuaian yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah.

Menindak lanjuti ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Untuk itu, telah dilakukan upaya-upaya antara lain: (1) mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan agar dapat meningkat, (2) meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan, dan (3) meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, meningkatkan kontribusi Laba BUMD. Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, yaitu dengan dilaksanakannya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif maka upaya yang di tempuh adalah sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pajak dan Retribusi

Upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui:

- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
- 6) Peningkatan survey atau observasi di lapangan melalui pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi;
- 7) Penguatan basis pajak utamanya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

b. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi

Upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui:

- 1) Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
- 2) Pengkajian jenis retribusi yang sudah tidak layak lagi dipungut dan perlu dihapus;
- 3) Pengkajian mekanisme pajak dan retribusi untuk target group baru;
- 4) Penyederhanaan sistem pemungutan pajak untuk mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- 5) Peningkatan Pendapatan bagi hasil pajak yang diperoleh dari Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat.

c. Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif.

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- 1) Perbaikan manajemen menuju Jakarta Incorporated (*Holding Company*);
- 2) Pembentukan sub holding company;
- 3) Percepatan divestasi saham-saham Pemda pada PT Patungan yang merugi;
- 4) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi.
- 5) Peningkatan pelayanan kemampuan BLUD

d. Peningkatan Dana Perimbangan

Peningkatan dana pembangunan melalui : Peningkatan Dana Perimbangan melalui koordinasi Tax Sharing dengan Pemerintah, khususnya Bagi Hasil Pajak dengan rasionalisasi NJOP, penyesuaian Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), penyisiran obyek pajak orang pribadi dan memfasilitasi peranan PPAT melakukan percepatan balik nama kepemilikan apartemen, pertokoan dan perkantoran

e. Peningkatan koordinasi untuk memperoleh Bantuan Dana Penyeimbang dan Hibah dari Pemerintah

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut; Target Pendapatan Daerah setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp.19.031.851.433.043,00, sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2008 mencapai Rp.19.221.763.281.794,00 atau 101,16 persen. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Daerah terjadi peningkatan sebesar Rp.189.911.848.751,00 atau 1,16 persen. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari; Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasinya mencapai Rp.10.455.570.941.947,00 atau 101 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp.10.381.542.819.361,00 dari realisasi ini terlihat target PAD

terjadi peningkatan sebesar Rp.74.028.122.586,00 atau 1 persen. Di sisi lain yaitu Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan target yang ditetapkan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.8.523.929.667.482,00 realisasi pencapaian targetnya tercatat sebesar Rp.8.702.813.393.647,00 atau 102,45 persen, realisasi tersebut terjadi peningkatan sebesar Rp.178.883.726.165,00 atau 2,45 persen. Sedangkan realisasi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp.126.378.946.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.63.378.946.200,00.

Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

TABEL 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2008

Jenis	Tahun Anggaran 2008			Δ %
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
❖ Pendapatan Asli Daerah	10.381.542.819.361,00	10.455.570.941.947,00	174.028.122.586,00	100,71
❖ Dana Perimbangan	8.523.929.667.487,00	8.702.813.393.647,00	178.883.726.165,00	102,45
❖ Lain-lain Pendapatan Yang Sah	126.378.946.200,00	63.378.946.200,00	(63.000.000.000,00)	26,42
Jumlah	19.031.851.433.043,00	19.221.763.281.794,00	198.911.848.751,00	101,16

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana telah disajikan sebelumnya bahwa realisasi PAD mencapai Rp.10.455.570.941.947,00 atau 100,71 persen, dari target yang ditetapkan setelah perubahan Rp.10.381.542.819.361,00. Dari realisasi ini terlihat target PAD terjadi peningkatan sebesar Rp.74.028.122.586,00 atau 0,71 persen.

Tercapainya target realisasi PAD di tahun 2008, karena berbagai upaya telah dilakukan secara optimal seperti peningkatan intensifikasi

dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, kerja keras yang telah dilakukan oleh petugas-petugas pemungut di lapangan untuk peningkatan PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait dan peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut maupun masyarakat serta peningkatan survey atau observasi di lapangan melalui pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi.

Secara garis besar gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2008 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

TABEL 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2008

Uraian	Tahun Anggaran 2008			Δ %
	Anggaran Setelah perubahan	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
▪ Pajak Daerah	8.484.270.000.000,00	8.751.773.782.037,00	267.503.782.037,00	103,15
▪ Retribusi Daerah	363.568.236.100,00	395.639.557.901,00	32.071.321.801,00	108,82
▪ Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	170.976.913.465,00	160.776.060.356,00	(10.200.853.109,00)	94,03
▪ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.362.727.669.796,00	1.147.381.541.653,00	(215.346.128.143,00)	84,20
Jumlah	10.381.542.819.361,00	10.455.570.941.947,00	74.082.122.586,00	100,71

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD disampaikan berikut ini:

1) Pajak Daerah

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008 seperti nampak pada tabel tersebut di atas, ternyata dapat mencapai target sesuai anggaran yang ditetapkan. Adapun anggaran yang ditetapkan setelah perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar

Rp.8.484.270.000.000,00, realisasinya mencapai Rp.8.751.773.782.073,00 atau 103,15 persen. Dengan demikian kelebihan (surplus) target yang dicapai adalah sebesar Rp.267.503.782.037,00 atau 3,15 persen. Penerimaan pajak tersebut di atas, diperoleh dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp2.618.745.860.159,00 atau 102,28 persen;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp2.981.056.833.050,00 atau 110,41 persen;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 realisasi mencapai Rp.767.232.997.858,00 atau 87,19 persen;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 realisasi mencapai Rp.60.597.213.743,00 atau 75,75 persen;
- e) Pajak Hotel sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 realisasi mencapai Rp.620.987.794.055,00 atau 99,36 persen;
- f) Pajak Restoran realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp.649.642.449.596,00 atau 106,50 persen;
- g) Pajak Hiburan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 realisasi mencapai Rp.249.661.260.678,00 atau 114,00 persen;
- h) Pajak Reklame realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp.306.953.676.694,00 atau 99,02 persen;
- i) Pajak Penerangan Jalan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 realisasi mencapai Rp.382.878.504.153,00 atau 102,10 persen;
- j) Pajak Parkir sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 realisasi mencapai Rp.114.017.192.051,00 atau 91,21 persen.

Gambaran realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008 terlihat pada tabel 3.3

TABEL 3.3
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2008**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran Setelah perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	2.560.270.000.000	2.618.745.860.159	58.475.860.195,00	102,28
2.	BBN Kendaraan Bermotor	2.700.000.000.000	2.981.056.833.050	281.056.833.050,00	110,41
3.	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	880.000.000.000	767.232.997.858	(112.767.002.142,00)	87,19
4.	Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	80.000.000.000	60.597.213.743	(19.402.786.257,00)	75,75
5.	Pajak Hotel	625.000.000.000	620.987.794.055	(4.012.205.945,00)	99,36
6.	Pajak Restoran	610.000.000.000	649.642.449.596	39.642.449.596,00	106,50
7.	Pajak Hiburan	219.000.000.000	249.661.260.678	30.880.260.678,00	114,00
8.	Pajak Reklame	310.000.000.000	306.953.676.694	(3.046.323.306,00)	99,02
9.	Pajak Penerangan Jalan	375.000.000.000	382.878.504.153	7.878.504.193,00	102,10
10.	Pajak Parkir	125.000.000.000	114.017.192.051	(10.982.807.949,00)	91,21
	JUMLAH	8.484.270.000.000	8.751.773.782.037	267.503782.037,00	103,15

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008 diuraikan sebagai berikut;

a). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 realisasinya sebesar Rp.2.618.745.860.159,00 atau 102,28 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp.2.560.270.000.000,00, sehingga di Tahun 2008, realisasi penerimaan pajak ini mengalami surplus sebesar Rp.58.475.860.159,00 atau 2,28 persen. Terjadinya pelampauan

pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Tahun Anggaran 2008, disebabkan oleh :

- (1) Dilihat dari perbandingan bertambahnya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran PKB secara kuantitas terjadi kenaikan, yakni pada tahun 2007 sebanyak 3.454.284 kendaraan bermotor dan pada tahun 2008 naik menjadi 3.708.432 kendaraan bermotor. Namun pertambahan tersebut didominasi oleh kendaraan roda dua sebanyak 85.209 kendaraan bermotor. Sedangkan untuk kendaraan roda empat jenis Mini Bus yang merupakan kendaraan roda empat favorit, bertambah hanya 29.574 kendaraan bermotor;
- (2) Di sisi lain untuk kendaraan jenis Sedan, Jeep dan St Wagon (Pribadi) mengalami kenaikan hingga 90.323 kendaraan bermotor. Padahal dari segi kualitas pembayaran jenis kendaraan bermotor ini memberikan kontribusi penerimaan terbesar dari PKB. Apabila dilihat dari persentase penerimaan PKB maka jenis Minibus sebesar 38,42 persen, kemudian Sedan, Jeep dan St. Wagon (pribadi) sebesar 33,37 persen, sedangkan jenis Sepeda Motor hanya 12,78 persen.
- (3) Dengan kondisi tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pertambahan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2008, berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah karena pertambahan kendaraan bermotor didominasi oleh kendaraan roda dua yang jumlahnya mencapai 2.300.465 KBm;
- (4) Adanya kenaikan tersebut di atas diakibatkan juga oleh daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif meningkat sebagai akibat dari konsumsi otomotif yang menjadi objek pilihan utama bagi masyarakat.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2008 antara lain :

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak
- (2) Kendaraan Bermotor (Super KPKB) secara intensif.
- (3) Penagihan pasif atas tunggakan PKB;
- (4) Penyisiran dan penelitian data kendaraan bermotor yang belum daftar ulang;
- (5) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, seperti pemberian pelayanan melalui Samsat Keliling dan Gerai Samsat;
- (6) Peningkatan pendataan dan pemeriksaan Kendaraan Bermotor pada Show Room;
- (7) Pengawasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di lapangan yang dilakukan dengan lebih intensif melalui operasi/razia bekerjasama dengan pihak kepolisian;
- (8) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait maupun dengan pihak swasta seperti Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Pemilik Show Room, Asosiasi Importir dan Gaikindo.

b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Realisasi penerimaan BBN-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp.2.981.056.833.050,00 atau 110,41 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp.2.700.000.000.000,00. Dengan demikian target penerimaan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2008 mengalami surplus sebesar Rp.281.056.833.050,00 atau 10,41 persen.

Terjadinya pelampauan pencapaian target penerimaan BBN-KB pada Tahun Anggaran 2008 disebabkan oleh :

- (1) Dari sisi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan BBN-KB pada tahun 2008, yang dapat memberikan kontribusi terbesar bagi PAD masih didominasi

oleh jenis kendaraan Pick Up, Light Truck & Truck yaitu sebanyak 333.212 unit. Sedangkan pembayaran BBN-KB khususnya untuk jenis sedan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi BBN-KB mengalami penurunan 2,05 persen;

- (2) Dilihat dari indikator ekonomi masyarakat, pencapaian tersebut salah satunya disebabkan oleh naiknya daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif sebagai akibat dari konsumsi otomotif yang menjadi objek pilihan utama bagi masyarakat;
- (3) Transaksi penjualan kendaraan bermotor bekas atau lama sebagai objek Bea Balik Nama Kendaraan bermotor bekas atau lama, sudah sepenuhnya terjaring untuk melakukan pembayaran BBN-KB.

Langkah-langkah dan upaya yang optimal telah dilakukan pada tahun 2008, antara lain :

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (Super KPKB) secara intensif;
- (2) Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat melalui penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang belum tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Peningkatan survey di lapangan dan pengumpulan data lainnya untuk menentukan Harga Pasaran Umum (HPU) Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (4) Peningkatan pendataan kendaraan bermotor bekas pakai yang diperjualbelikan melalui Show Room;
- (5) Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif baik dengan instansi terkait maupun dengan pihak swasta, seperti : Agen

- Tunggal Pemegang Merk Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor, Gaikindo dan Pengusaha/Pemilik Show Room;
- (6) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pembayaran BBN I (kendaraan baru).

c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Realisasi penerimaan PBB-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp767.232.997.858,00 atau 87,19 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp880.000.000.000,00. Dengan demikian Tahun Anggaran 2008, realisasi pajak ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp112.767.002.142,00 atau 12,81 persen.

Alasan tidak tercapainya target penerimaan PBB-KB pada Tahun Anggaran 2008 antara lain :

- (1) Adanya peralihan model transportasi dari roda 4 (empat) ke roda 2 (dua);
- (2) Adanya pembangunan SPBU di pintu masuk arah Jakarta;
- (3) Adanya minat masyarakat yang tinggi untuk menggunakan Mass Rapid Transport / Bus Way.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk tercapainya target penerimaan PBB-KB Tahun Anggaran 2008 antara lain :

- (1) Koordinasi yang efektif dengan PT. Pertamina sebagai wajib pajak dan penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya, baik melalui kegiatan rekonsiliasi data jumlah penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan kaitannya dengan kewajiban yang harus disetorkan;
- (2) Peningkatan survey data potensi objek PBB-KB dan koordinasi dengan instansi terkait pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah DKI Jakarta;
- (3) Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak utamanya dibidang administrasi perpajakan.

- (4) Adanya penambahan penyalur bahan bakar kendaraan bermotor selain PT.Pertamina di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Adanya penambahan jumlah SPBU akibat dari kemudahan dan peluang yang diberikan oleh Pemerintah untuk berinvestasi pada bidang usaha SPBU.
- (6) Dampak positif dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua.

d). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Realisasi penerimaan pajak ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 Mencapai Rp.60.597.213.743,00 atau 75,75 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp.80.000.000.000,00. Dengan demikian Tahun 2008, target penerimaan yang tidak dapat dicapai sebesar Rp.19.402.786.257,00 atau 24,25 persen. Apabila realisasi penerimaan pajak ini dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp.8.751.773.782.037,00, maka terlihat kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pajak Daerah mencapai 0,69 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah disebabkan oleh :

- (1) Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah bersifat regulasi sehingga pemungutan pajaknya lebih diarahkan sebagai pengaturan dan pengendalian atas pemakaian/pemanfaatan air bawah tanah oleh masyarakat;
- (2) Adanya pembatasan terhadap pemakaian /pemanfaatan air bawah tanah oleh masyarakat sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Dinas Pertambangan;
- (3) Adanya pemakaian/pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal karena belum terjaring sebagai pelanggan air bawah

tanah yang dapat dijadikan objek pajak seperti tempat-tempat pencucian kendaraan bermotor, yang belum diikuti dengan pengaturan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemungutan pajaknya;

- (4) Perbandingan antara ketetapan dengan rencana penerimaan seharusnya didasarkan pada potensi riil, akan tetapi ternyata rencana penerimaan diproyeksikan lebih besar sedangkan kondisi dilapangan masih banyak ketetapan yang nihil dengan prosentase antara 40 persen sampai dengan 50 persen;
- (5) Adanya permasalahan - permasalahan teknis dilapangan seperti meteran air rusak dan pemakaian air bawah tanah nihil.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini pada tahun 2008 antara lain :

- (1) Peningkatan pengawasan pembayaran Pajak melalui Law Enforcement, terutama bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif dengan Surat Paksa;
- (3) Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran;
- (4) Peningkatan pendataan di lapangan melalui koordinasi dengan Dinas Pertambangan untuk menjaring Wajib Pajak baru yang belum terdaftar sebagai pelanggan air bawah tanah;
- (5) Peningkatan pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka kegiatan pencatatan meter air atas pemakaian Air Bawah Tanah dengan instansi terkait, Dinas Pertambangan.

e). Pajak Hotel

Realisasi penerimaan Pajak Hotel sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 Rp.620.987.794.055,00 atau 99,36 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp.625.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan pajak ini tidak mencapai target sebesar Rp.4.012.205.945,00 atau 0,64 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Hotel pada Tahun Anggaran 2008 disebabkan :

- (1) Terjadi penurunan tingkat hunian kamar hotel rata-rata sebesar 3,90persen (sumber data BPS Kunjungan Wisata Tahun 2008) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2007. Kondisi tersebut akibat adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara sebagai pengguna jasa hotel, khususnya hotel-hotel berbintang lima dan hotel bintang lima berlian di Jakarta, padahal hotel berbintang tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pajak Hotel;
- (2) Adanya kecenderungan pihak korporat untuk menginap di apartemen, hal ini disebabkan pihak korporat melihat dari segi biaya yang dikeluarkan;
- (3) Wajib Pajak Hotel pada tahun 2008 terjadi penambahan sebanyak 69 Wajib Pajak, namun penambahan tersebut bersumber dari rumah kost. Oleh karena itu penambahan ini belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, walaupun rencana yang ditargetkan naik hingga 4,17persen. Sekalipun demikian pada tahun 2008 realisasi penerimaan Pajak Hotel naik, sebesar 14,17 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007.

Untuk pencapaian target penerimaan pajak ini, berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, antara lain :

- (1) Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa Pajak Hotel setiap bulannya dan memantau setoran masa yang tidak wajar ;
- (2) Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif (dengan Surat Paksa);
- (3) Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya;
- (4) Peningkatan pengawasan melalui *law enforcement* berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Pelaksanaan kegiatan survey atau observasi di lapangan melalui pemeriksaan guna mendapatkan data atau informasi usaha wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan;
- (6) Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

f). Pajak Restoran

Realisasi penerimaan Pajak Restoran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp.649.642.449.596,00 atau 106,50 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp610.000.000.000,00. Dengan demikian, target penerimaan tercapai surplus sebesar Rp.39.642.449.596,00 atau 6,50 persen.

Terjadinya pelampauan pencapaian target penerimaan Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2008 disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- (1) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah bekerjasama dengan BPKP;
- (2) Adanya peningkatan jumlah kunjungan ke rumah-rumah makan / restoran masih merupakan pilihan sebagai objek konsumtif untuk keperluan keluarga;
- (3) Kondisi sosial politik Indonesia di tahun 2008 berjalan kondusif sehingga dapat mendukung pertumbuhan di sektor pariwisata;
- (4) Adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak restoran, yakni pada tahun 2007 sebanyak 5.040 Wajib Pajak dan pada tahun 2008 naik menjadi 5.596 Wajib Pajak.

Sekalipun demikian pada tahun 2008 realisasi penerimaan Pajak Restoran naik sebesar 25,39 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007.

Langkah-langkah dan upaya yang efektif telah dilakukan pada tahun 2008 antara lain :

- (1) Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa Pajak Restoran setiap bulannya dan memantau setoran masa yang tidak wajar;
- (2) Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif (dengan Surat Paksa);
- (3) Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya;
- (4) Peningkatan Pengawasan melalui law enforcement, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (5) Pelaksanaan kegiatan survey atau observasi di lapangan melalui pemeriksaan guna mendapatkan data atau informasi. Usaha wajib pajak sebagai data pembanding, dalam rangka peningkatan penerimaan;
- (6) Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

g). Pajak Hiburan

Realisasi penerimaan Pajak Hiburan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp.249.661.260.678,00 atau 114,00 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp.219.000.000.000,00. Dengan demikian tahun 2008, realisasi pajak ini mengalami surplus dalam mencapai target sebesar Rp.30.880.260.678,00 atau 14,00 persen.

Pelampauan target penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2008, didorong antara lain oleh :

- (1) Perkembangan teknologi khususnya komputer dan media elektronik, secara langsung dapat berpengaruh terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk mendapatkan hiburan di luar rumah;
- (2) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah bekerjasama dengan BPKP;
- (3) Wajib Pajak Hiburan pada tahun 2008 bertambah sebanyak 63 Wajib Pajak dengan nilai nominal sebesar Rp.1.123.795.504,-. Artinya penerimaan Pajak Hiburan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, karena rencana yang ditargetkan di tahun 2007 naik hingga 33,33 persen. Namun demikian realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2008 naik sebesar 24,48 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2008 antara lain :

- (1) Peningkatan pengawasan pembayaran setoran massa Pajak Hiburan setiap bulannya dan memantau setoran massa yang tidak wajar;
- (2) Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif dengan Surat Paksa;
- (3) Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya;
- (4) Peningkatan Pengawasan melalui law enforcement, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pelaksanaan kegiatan survey dan observasi di lapangan melalui pemeriksaan guna mendapatkan data atau informasi usaha wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan;
- (6) Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

h). Pajak Reklame

Realisasi penerimaan Pajak Reklame sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp306.953.676.694,00 atau 99,02 persen dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran sebesar Rp310.000.000.000,00. Dengan demikian tahun 2008, realisasi Pajak Reklame yang belum tercapai target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp3.046.323.306,00 atau 0,98 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Reklame pada Tahun Anggaran 2007 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- (1) Turunnya penerimaan Pajak Reklame karena masih terdapat reklame lama yang belum melakukan perpanjangan ijin reklame.
- (2) Terjadinya perubahan media promosi dari media luar beralih ke media elektronik dan media massa.
- (3) Menurunnya penerimaan pajak reklame disebabkan beralihnya reklame kendaraan ke sentra / kawasan industri Tangerang, Bekasi dan Bogor .

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2008 antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa Pajak Reklame setiap bulannya dan memantau setoran masa yang tidak wajar;
- 2) Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif (dengan Surat Paksa);
- 3) Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya;
- 4) Peningkatan Pengawasan melalui law enforcement, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pelaksanaan kegiatan survey atau observasi di lapangan melalui pemeriksaan guna mendapatkan data atau informasi usaha wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan;
- 6) Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

i). Pajak Penerangan Jalan

Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp382.878.504.153,00 atau 102,10 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp375.000.000.000,00. Dengan demikian Tahun 2008 realisasi penerimaan pajak ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp7.878.504.153,00 atau 2,10 persen.

Tercapainya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2008 disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- (1) Tingginya tingkat penambahan jumlah pelanggan pengguna listrik di wilayah DKI Jakarta, hal ini sebagai akibat dari pertumbuhan sentra-sentra bisnis dan bidang properti;
- (2) Peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan PT. PLN sebagai mitra kerja dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- (3) Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya;
- (4) Peningkatan Pengawasan terhadap penyetoran Pajak Penerangan Jalan.

j). Pajak Parkir

Realisasi penerimaan Pajak Parkir pada Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp114.017.192.051,00 atau 91,21 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp125.000.000.000,00. Dengan demikian Tahun 2008, realisasi Pajak Parkir yang tidak dapat dicapai Rp10.982.807.949,00 atau 8,79 persen.

Alasan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2008 antara lain :

- (1) Sistem transportasi kota yang kian membaik sehingga kendaraan umum menjadi pilihan utama masyarakat dalam

menjalankan aktifitas kegiatannya mengingat biaya yang dikeluarkan lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi;

- (2) Adanya pertumbuhan sektor properti khususnya bagi sentra-sentra bisnis seperti pembangunan apartemen, mall, plaza yang berada di luar wilayah DKI Jakarta.
- (3) Pertumbuhan sarana gedung-gedung dan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta tidak diikuti dengan pertumbuhan Accupansi/penggunaan dari marka parkir terutama kendaraan roda empat, mengingat kecenderungan masyarakat mengalihkan model transportasi kendaraan roda empat ke kendaraan roda dua.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2008 antara lain :

- (1) Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa Pajak Parkir setiap bulannya;
- (2) Pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif dengan Surat Paksa;
- (3) Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya;
- (4) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan jumlah pajak terutang;
- (5) *Law Enforcement* melalui tindakan penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan;
- (6) Pelaksanaan kegiatan survey atau observasi di lapangan guna mendapatkan data atau informasi usaha wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan melalui pemeriksaan;

- (7) Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment melalui sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin meningkat;

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp395.639.557.901,00 atau 108,82 persen dari proyeksi yang ditetapkan setelah perubahan Rp363.568.236.100,00. Dengan demikian Tahun 2008, realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat melampaui target penerimaan sebesar Rp.32.071.321.801,00 atau 8,82 persen.

Upaya-upaya yang intensif telah dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara lain :

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- c) Dilakukan intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- d) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait.

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tergambar pada tabel 3.4.

TABEL 3.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2008

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
I	Retribusi Jasa Umum	76.462.301.340,00	71.025.643.306,00	(5.446.945.034,00)	92,89
II	Retribusi Jasa Usaha	74.236.166.010,00	65.811.165.762,00	(8.425.000.248,00)	88,65
III	Retribusi Perizinan Tertentu	212.869.768.750,00	258.802.748.833,00	45.969.900.083,00	121,58
Jumlah Retribusi Daerah (I,II dan III)		363.568.236.100,00	395.639.557.901,00	32.071.321.801,00	108,82

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta (I,II dan III)

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan yang merupakan wajib Retribusi jasa umum. Adapun obyeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp71.025.643.306,00 atau 92,89 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp76.462.301.340,00. Dengan demikian Tahun 2008, realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target sebesar Rp5.446.945.034,00 atau 7,11 persen.

Rincian Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2008, dapat dilihat pada table 3.5.

TABEL 3.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2008

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	28.887.998.000,00	20.037.667.800,00	(8.850.330.200,00)	69,36
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	250.140.000,00	351.736.378,00	101.596.378,00	140,62
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.474.040.840,00	2.672.425.600,00	198.384.760,00	108,02
4	Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa	5.539.166.000,00	6.550.750.000,00	1.001.297.000,00	118,26
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.295.850.000,00	1.293.312.953,00	(2.537.047,00)	99,80
6	Retribusi Pengukuran & Pengujian Hasil Hutan	2.461.136.500,00	-	(2.461.136.500,00)	-
7	Retribusi Pemanfaatan Air Bersih	42.480.000,00	34.923.000,00	(7.557.000,00)	82,21
8	Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu	1.007.480.000,00	351.625.084,00	(655.854.916,00)	34,90
9	Retribusi Persampahan/ Kebersihan	7.106.520.000,00	7.517.227.750,00	410.707.750,00	105,78
10	Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman	7.541.690.000,00	7.743.821.000,00	202.131.000,00	102,68
11	Retribusi Pengukuran Situasi Tanah	5.000.000.000,00	6.928.995.925,00	1.928.995.925,00	138,58
12	Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota	1.500.000.000,00	2.123.265.817,00	623.265.817,00	141,55
13	Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur	525.000.000,00	1.525.464.150,00	1.000.464.150,00	290,56
14	Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan	12.500.000.000,00	13.687.210.889,00	1.187.210.889,00	109,50
15	Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan	176.000.000,00	25.000.000,00	(151.000.000,00)	14,20
16	Retribusi Pemeliharaan Data dan Penggantian Biaya Cetak Peta	154.000.000,00	163.941.200,00	9.941.200,00	106,46
17	Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus	800.000,00	-	(800.000,00)	-
	Jumlah	76.462.301.340,00	71.025.643.306,00	(5.446.945.034,00)	92,89

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2008 antara lain sebagai berikut:

(1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp20.037.667.800,00 atau 69,36 persen dari proyeksi yang

ditetapkan Rp28.887.998.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di tahun 2008, tidak mencapai target sebesar Rp8.850.330.200,00 atau 30,64 persen.

Turunnya target penerimaan retribusi ini, utamanya disebabkan menurunnya volume pengujian terhadap kendaraan mobil barang, bus & kendaraan khusus dan mobil berpenumpang umum.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain :

- (a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (b) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- (c) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum.

(2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa

Realisasi Penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan jasa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp 6.550.720.000,00 atau 118,26 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp.5.539.166,00. Dengan demikian Tahun 2008, target penerimaan retribusi ini terjadi peningkatan sebesar Rp.1.001.297.000,00 atau 18,26 persen.

Pelampauan penerimaan Retribusi ini utamanya diperoleh dari penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK), biaya pencatatan mutasi data, penggantian biaya cetak KTP dan Kartu Identitas pendatang.

Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP antara lain :

- (a) Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai peraturan-peraturan kependudukan, sehingga dengan sosialisasi ini diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kependudukan.
- (b) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi.
- (c) Peningkatan koordinasi dan pengawasan dilapangan kepada masyarakat melalui Operasi Yustisi Kependudukan.

(3) Retribusi Persampahan/Kebersihan

Realisasi penerimaan retribusi ini sampai dengan akhir Tahun 2008 sebesar Rp7.517.227.750,00 atau 105,78 persen dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran Tahun 2008 sebesar Rp7.106.520.000,00. Dari target ini terlihat adanya peningkatan sebesar Rp410.707.750,00 atau 5,78 persen.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain :

- (a) Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi;
- (b) Intensifikasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
- (c) Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi;
- (d) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait.
- (e) Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam pemungutan retribusi sampah.

(4) Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp7.743.821.000,00 atau 102,68 persen dari target yang ditetapkan Rp7.541.690.000,00. Dengan demikian Tahun 2008, terdapat pelampauan target penerimaan sebesar Rp202.131.000,00 atau 2,68 persen.

Pelampauan target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka tiga tahun dan perpanjangan sewa tanah makam.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman antara lain:

- (a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (b) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan Yayasan yang bergerak dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

(5) Retribusi Pengukuran Situasi Tanah

Retribusi ini efektif dipungut mulai Tahun 2007, sejalan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah. Target penerimaan Retribusi Pengukuran Situasi Tanah yang telah ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00 adapun realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp6.928.995.925,00 atau 138,58 persen. Realisasi tersebut terlihat terjadi

peningkatan sebesar Rp1.928.995.925,00 atau 38,58 persen. Peningkatan realisasi retribusi ini, dapat dicapai dengan upaya-upaya yang optimal seperti;

- (a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (b) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- (c) Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada wajib retribusi yang menunggak;
- (d) Pelaksanaan terpadu di 5 (lima) wilayah kotamadya.

(6) Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan

Retribusi ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dan efektif di pungut mulai tahun 2007. Target penerimaan Retribusi Penataan Perpetakan pada jalur jalan setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp12.500.000.000,00, realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp13.687.210.889,00 atau 109,50 persen. Dengan demikian terlihat adanya peningkatan sebesar Rp1.187.210.889,00 atau 9,50 persen.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target retribusi ini antara lain:

- (a) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- (b) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- (c) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b) Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang

bersangkutan, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi dengan menggunakan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi ini realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp65.811.165.762,00 atau 88,65 persen dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp74.236.116.010,00. Dengan demikian tahun 2008, Retribusi jasa umum tidak mencapai target sebesar Rp8.425.000.248,00 atau 11,35 persen.

Rincian Realisasi Retribusi jasa usaha Tahun Anggaran 2008 dapat di gambarkan pada tabel 3.6.

TABEL 3.6
Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2008

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	34.675.129.510,00	30.888.432.890,00	(3.786.696.620,00)	89,08
2	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	2.500.000.000,00	2.058.967.777,00	(441.032.223,00)	82,36
3	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	19.650.000,00	20.968.000,00	1.318.000,00	106,71
4	Retribusi Tempat Rekreasi	17.356.545.500,00	17.541.812.025,00	185.266.525,00	101,07
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.337.500.000,00	2.567.763.749,00	230.263.749,00	109,85
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	176.000.000,00	168.268.000,00	(7.732.000,00)	95,61
7	Retribusi Potong Hewan	1.417.000.000,00	1.145.720.160,00	(271.279.840,00)	80,86
8	Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah	1.850.000.000,00	1.072.360.000,00	(777.640.000,00)	57,97
9	Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan	346.986.000,00	350.075.000,00	3.089.000,00	100,89
10	Retribusi Penyedotan Kakus	1.554.480.000,00	1.551.600.000,00	(2.880.000,00)	99,81
11	Retribusi Jasa Terminal	11.715.186.000,00	8.377.498.161,00	(3.337.687.839,00)	71,51
12	Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian	10.000.000,00	4.041.500,00	(5.958.500,00)	40,42
13	Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan	277.689.000,00	63.658.500,00	(214.030.500,00)	22,92
	J u m l a h	74.236.166.010,00	65.811.165.726,00	(8.425.000.248,00)	88,65

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi pendapatan Retribusi jasa usaha Tahun Anggaran 2008 antara lain sebagai berikut:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp30.888.432.890,00 atau 89,08 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp34.675.129.510,00. Dengan demikian Tahun 2008, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.786.696.620,00 atau 10,92 persen.

Realisasi penerimaan retribusi tersebut, bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja. Seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik Daerah.

(2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp2.058.967.777,00 atau 82,36 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.500.000.000,00. Dengan demikian Tahun 2008, realisasi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dapat melampaui target penerimaan Rp441.032.223,00 atau sebesar 17,64 persen.

Upaya yang optimal dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan antara lain;

- (a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (b) Penambahan sarana dan prasarana yang disewakan kepada masyarakat;
- (c) Intensifikasi pemungutan retribusi.

(3) Retribusi Tempat Rekreasi

Realisasi penerimaan retribusi ini sampai dengan Tahun Anggaran 2008 tercatat sebesar Rp17.541.812.025,00 atau 101,07 persen. Dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp17.356.545.500,00. Dari target realisasi tersebut terlihat penerimaan retribusi terjadi peningkatan sebesar Rp185.266.525,00 atau 1,07 persen. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi di peroleh dari kebudayaan dan permuseuman, Taman Margasatwa Ragunan dan Planetarium dan Observatorium.

(4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp2.567.763.749,00 atau 109,85 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.337.500.000,00. Tahun 2008 realisasi retribusi ini melampaui target Rp230.263.749,00 atau 9,85 persen. Pemerintah retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian kolam renang, gedung olah raga dan stadion olah raga.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, yaitu antara lain :

- (a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (b) Dilakukannya pemantauan dan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat.

(5) Retribusi Jasa Terminal

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Terminal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp8.377.498.161,00 atau 71,51 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp11.715.186.000,00. Dengan demikian Tahun

2008, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.337.687.839,00 atau sebesar 28,49 persen.

Target yang tidak dapat dicapai pada retribusi ini antarlain pemakaian fasilitas di terminal penumpang, pemakaian fasilitas terminal mobil barang dan pemakaian pangkalan taxi.

Upaya yang intensif dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain :

- (a) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- (b) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- (c) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal.
- (d) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp258.802.748.833,00 atau 121,58 persen dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp212.869.768.750,00. Dengan demikian di tahun 2008, retribusi ini tercatat terjadi peningkatan sebesar Rp45.969.900.083,00 atau 21,58 persen.

Rincian realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu dapat di sajikan pada table 3.7.

TABEL 3.7
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2008

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Retribusi Izin Trayek	2.038.850.000,00	1.406.712.500,00	(632.137.500,00)	69,00
2	Retribusi Izin Usaha ANgkutan dan Izin Opsional	-	10.350.000,00	10.350.000,00	-
3	Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasi	392.598.000,00	1.129.210.200,00	736.612.200,00	287,63
4	Retribusi Perizinan Perhubungan Laut	30.000.000,00	29.100.000,00	(900.000,00)	97,00
5	Retribusi Perizinan Perhubungan Udara	30.000.000,00	53.400.000,00	23.400.000,00	178,00
6	Izin Undang-Undang Gangguan	4.050.000.000,00	4.189.097.500,00	139.097.500,00	103,43
7	Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan	9.794.806.750,00	14.960.450.000,00	5.165.643.250,00	152,74
8	Retribusi Perizinan Bidang Peternakan	125.000.000,00	193.040.000,00	68.040.000,00	154,43
9	Retribusi Perizinan Bidang Perikanan	68.850.000,00	61.750.000,00	(7.100.000,00)	89,69
10	Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata	1.150.000.000,00	3.520.020.000,00	2.370.020.000,00	306,09
11	Retribusi Izin Ketenagalistrikan	520.320.000,00	63.000.000,00	(457.320.000,00)	12,11
12	Retribusi Izin Penggalian/Pengukuran dan Pengeboran	8.480.000,00	-	(8.480.000,00)	-
13	Retribusi Pertambangan Umum	28.440.000,00	-	(28.440.000,00)	-
14	Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi	1.089.200.000,00	1.100.000.000,00	10.800.000,00	100,99
15	Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air	578.460.000,00	488.700.000,00	(89.760.000,00)	84,48
16	Retribusi Izin Pemakaian Mesin	106.284.000,00	38.400.000,00	(67.884.000,00)	36,13
17	Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya	15.630.000,00	29.247.928,00	13.617.928,00	187,13
18	Retribusi Izin Operasional Penyediaan	20.840.000,00	300.000,00	(20.540.000,00)	1,44
19	Reribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja	31.260.000,00	16.400.000,00	(14.860.000,00)	52,46
20	Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman	278.750.000,00	239.793.000,00	(38.957.000,00)	86,02
21	Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota	2.000.000.000,00	1.398.657.400,00	(601.342.600,00)	69,93
19	Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan	13.225.000.000,00	16.103.938.600,00	2.878.938.600,00	121,77
20	Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian	30.000.000.000,00	40.653.460.000,00	10.653.460.000,00	135,51
21	Retribusi Perijinan Persetujuan Prinsip	15.000.000.000,00	32.376.257.325,00	17.376.257.325,00	215,84
22	Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah	15.000.000.000,00	38.333.611.040,00	23.333.611.040,00	255,56
23	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	104.380.000.000,00	90.211.811.467,00	(14.168.188.533,00)	86,43
24	Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan	5.500.000.000,00	7.790.749.884,00	2.290.749.884,00	141,65
25	Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan	20.000.000,00	95.150.000,00	75.150.000,00	475,75
26	Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan	100.000.000,00	542.556.519,00	442.556.519,00	542,56
27	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	7.000.000,00	2.500.000,00	(4.500.000,00)	35,71
28	Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas	4.930.000.000,00	1.472.410.470,00	(3.457.589.530,00)	29,87
29	Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung	100.000.000,00	130.940.000,00	30.940.000,00	130,94
30	Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan	2.250.000.000,00	2.161.735.000,00	(88.265.000,00)	96,08
Jumlah		212.869.768.750,00	258.802.748.833,00	45.969.900.083,00	121,58

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

(1) Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp14.960.450.000,00 atau 152,74 persen dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran Rp9.794.806.750,00. Dari realisasi tersebut terlihat terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp5.165.643.250,00 atau 52,74 persen.

Penerimaan retribusi ini utamanya diperoleh dari surat tanda daftar rekanan dan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan, antara lain:

- (a) Peningkatan Pengawasan di lapangan;
- (b) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (c) Koordinasi yang intensif dengan unit satuan Kerja terkait.

(2) Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan

Target retribusi ini setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp13.225.000.000,00 adapun realisasinya adalah sebesar Rp16.103.938.600,00 atau 121,77 persen. Dari realisasi ini terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp2.878.938.600,00 atau 21,77 persen.

Adapun upaya-upaya yang efektif telah dilakukan dalam pencapaian target antara lain:

- (a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (b) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- (c) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan Kerja terkait;
- (d) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan.

(3) Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci

Target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp30.000.000.000,00 adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp40.653.460.000,00 atau 135,51 persen. Pada tahun 2008, tercatat terjadi peningkatan penerimaan retribusi sebesar Rp10.653.460.000,00 atau 35,51 persen, yang utamanya di peroleh dari persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci:

Upaya-upaya yang optimal dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain:

- (a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (b) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- (c) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan;
- (d) Koordinasi yang intensif dengan unit satuan Kerja terkait.

(4) Retribusi Perijinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian koefisien

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp32.376.257.325,00 atau 215,84 persen, dari penetapan setelah perubahan anggaran tahun 2008 Rp15.000.000.000,00. Dengan demikian terlihat terjadi peningkatan penerimaan yang sangat signifikan sebesar Rp17.376.257.325,00 atau 115,84 persen.

Pencapaian target penerimaan retribusi ini dilakukan upaya-upaya yang intensif seperti:

- (a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi;
- (b) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- (c) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan Kerja terkait maupun wajib retribusi.

(5) Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp38.333.611.040,00 atau 255,56 persen, dari proyeksi yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp15.000.000.000,00. Dengan demikian terdapat pelampauan target penerimaan Rp23.333.611.040,00 atau 155,56 persen.

Pelampauan yang sangat signifikan ini utamanya diperoleh dari penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah antara lain:

- (a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (b) Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada wajib retribusi yang menunggak;
- (c) Pelaksanaan pelayanan terpadu di 5 (lima) wilayah kotamadya;
- (d) Peningkatan Koordinasi dengan unit Satuan Kerja terkait.

(6) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp90.211.811.467,00 atau 86,43 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp104.380.000.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp14.168.188.533,00 atau 13,57 persen.

Walaupun retribusi ini tidak mencapai target, upaya yang optimal dilakukan seperti :

- (a) Penyederhanaan proses administrasi kepengurusan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan Bangunan melalui percepatan proses pelayanan;
- (b) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan IPMB/IMB;
- (c) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang persyaratan permohonan IMB;
- (d) Peningkatan pengawasan di lapangan berkaitan dengan kegiatan pembangunan di 5 wilayah kotamadya dan menindak tegas pemilik bangunan yang membangun tanpa memiliki izin.

(7) Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp7.790.749.884,00 atau 141,65 persen dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp5.500.000.000,00. Dengan demikian terlihat terjadi peningkatan sebesar Rp2.290.749.884,00 atau 41,65 persen.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk pencapaian target retribusi ini antara lain :

- (a) Peningkatan pelayanan kepada wajib retribusi;
- (b) Peningkatan pengawasan kepada wajib retribusi;
- (c) Peningkatan penyuluhan kepada petugas pemungut dan wajib retribusi;
- (d) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan Kerja terkait.

3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp160.776.060.356,00 atau 94,03 persen dari proyeksi yang ditetapkan sebesar Rp170.976.913.465,00. Dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp10.200.853.109,00 atau 5,97 persen.

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2008 digambarkan pada tabel 3.8.

TABEL 3.8
Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2008

No	Uraian	Tahun Anggaran 2008		Berlebih (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5(4-3)	6(4:3)
1	Perusahaan Milik Daerah	41.669.011.865,00	37.772.976.145,00	(3.896.035.720,00)	90,65
2	Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga	125.400.823.600,00	120.108.565.619,00	(5.292.257.981,00)	95,78
3	Badan Pengelola	1.641.153.000,00	400.653.000,00	(1.240.500.000,00)	24,41
4	Hasil Sewa Aset Daerah	525.000.000,00	369.750.000,00	(155.250.000,00)	70,43
5	Hasil Kerja sama Aset Daerah	1.740.925.000,00	2.124.115.592,00	383.190.592,00	122,01
	Jumlah	170.976.913.465,00	160.776.060.356,00	(10.200.853.109,00)	94,03

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

a). Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (PD)

Penerimaan bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD) Tahun Anggaran 2008 diproyeksikan sebesar Rp41.669.011.865,00 adapun realisasinya sebesar Rp37.772.976.145,00 atau 90,65 persen. Tahun 2008 terlihat realisasi bagian laba ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp3.896.035.720,00 atau 9,35 persen.

Realisasi penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (PD) Tahun Anggaran 2008 dapat digambarkan pada tabel 3.9 dibawah ini.

TABEL 3.9
Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (PD)
Tahun Anggaran 2008

No	Uraian	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PDAM Jaya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100
2	PD. Dharma Jaya	600.000.000,00	504.452.478,00	(95.547.522,00)	84,08
3	PD. Pasar Jaya	29.000.000.000,00	27.872.248.000,00	(1.127.752.000,00)	96,11
4	PD. Pemb. Sarana Jaya	5.069.011.865,00	1.676.957.278,00	(3.392.054.587,00)	33,08
5	PD. PAL Jaya	2.000.000.000,00	2.719.318.389,00	719.318.385,00	135,97
	Jumlah	41.669.001.865,00	37.772.976.145,00	(3.896.035.720,00)	90,65

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

b). Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT. Patungan)

Realisasi bagian laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp120.108.565.619,00 atau 95,78 persen, dari proyeksi yang

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp125.400.823.600,00. Kontribusi Realisasi Penyetoran Modal ini pada Tahun Anggaran 2008 tidak dapat mencapai target sebesar Rp5.292.257.981,00 atau 4,22 persen.

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2008 seperti dapat di lihat pada tabel 3.10.

TABEL 3.10
Penerimaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT.Patungan)
Tahun Anggaran 2008

No	Uraian	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PT. Pembangunan Jaya	2.800.000.000,00	3.960.000.000,00	1.160.000.000,00	141,43
2	PT. Food Station Cipinang	2.010.000.000,00	1.015.218.001,00	(994.781.999,00)	50,51
3	PT. JIEP	4.800.000.000,00	2.293.324.900,00	(2.506.675.100,00)	47,78
4	PT. Delta Jakarta	5.500.000.000,00	5.885.619.600,00	385.619.600,00	107,01
5	PT. Bumi Grafika Jaya	85.175.000,00	-	(85.175.000,00)	-
6	PT. Pembangunan Jaya Ancol	40.500.000.000,00	40.550.400.025,00	50.400.025,00	100,12
7	PT. Ratax Armada	370.648.600,00	-	(370.648.600,00)	-
8	PT. Rheem Indonesia	600.000.000,00	-	(600.000.000,00)	-
9	PT. Kawasan Berikat Nusantara	1.100.000.000,00	495.699.256,00	(604.300.744,00)	45,06
10	PT. Alumindo Perkasa	85.000.000,00	-	(85.000.000,00)	-
11	PT. Cemani Toka	800.000.000,00	-	(800.000.000,00)	-
12	PT. Jaya Nur Sukses	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	-
13	PT. Asuransi Bangun Askrida	3.000.000.000,00	2.247.999.313,00	(752.000.687,00)	74,93
14	PT. Jakarta Provertindo	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	100,00
15	PT. Bank DKI Jakarta	51.000.000.000,00	51.000.000.000,00	-	100,00
16	PT. Jakarta Tourisindo	1.650.000.000,00	1.660.304.524,00	10.304.524,00	100,62
	Jumlah	125.400.823.600,00	120.108.565.619,00	(5.292.257.981,00)	95,78

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

c). Badan Pengelola (BP)

Pada Tahun Anggaran 2008 Penerimaan Badan Pengelola diproyeksikan sebesar Rp1.641.153.000,00. adapun realisasinya sebesar Rp.400.653.000,00 atau 24,41 persen. Realisasi ini diperoleh dari kontribusi BP. THR Lokasari sebagai laba bagian baku penerimaan tahun 2007.

d). Hasil Sewa Aset Daerah

Rencana penerimaan Sewa Aset Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp525.000.000,00 adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp369.750.000,00 atau 70,43 persen. Dengan demikian terlihat bahwa realisasi penerimaan yang tidak dapat mencapai target sebesar Rp155.250.000,00 atau 29,57 persen.

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat pada tabel 3.11.

TABEL 3.11

Realisasi Penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah
Tahun Anggaran 2008

No	Uraian	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Eks Komplek Unit Aloca	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	-
2	Eks Toko Tastra Jaya	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	-
3	PD. Undagi Jaya Klender	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	-
4	Tanah Kav No.I C2	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-
5	Tanah Kav. Blok III A.A No 9 dan 10	75.000.000,00	81.000.000,00	6.000.000,00	108,00
6	Eks Toko Pradipta	65.000.000,00	48.750.000,00	(16.250.000,00)	75,00
	JUMLAH	525.000.000,00	129.750.000,00	(395.250.000,00)	24,71

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

e). Hasil Kerja Sama Aset Daerah

Penerimaan Hasil Kerja Sama Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2008 diproyeksikan sebesar Rp1.740.925.000,00, adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp2.124.115.592,00 atau 122,01 persen. Tahun 2008 realisasi Hasil Kerjasama aset terlihat terjadi peningkatan sebesar Rp383.190.592,00 atau 22,01 persen. Dengan demikian kontribusi PAD yang diperoleh dari Kerjasama Aset Daerah adalah sebesar 1,15 persen, terhadap Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Rincian lebih lanjut penerimaan Hasil Kerjasama Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2008 dapat terlihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12
Penerimaan Kerja Sama Aset Daerah
Tahun Anggaran 2008

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PT. Langgeng Ayom Lestari	100.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00	160,00
2	Yayasan Nawami Bhakti	35.000.000,00	24.115.592,00	(10.884.408,00)	68,90
3	PT. Hotel Cikini Reality	50.000.000,00	900.000.000,00	850.000.000,00	1.800,00
4	Pt. Duta Pertiwi		440.000.000,00	440.000.000,00	-
5	PT. Dharma Alumas Sakti	76.325.000,00	-	(76.325.000,00)	-
6	PT. Rointa Eka Jaya	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	-
7	PT. Wahana Cipta Sejahtera	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
8	PT. AGB Tuna	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
9	PT. Pasifik Prima Buana Mas	229.600.000,00	-	(229.600.000,00)	-
10	PT. Pesona Marga Mandiri	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-
	Jumlah	1.740.925.000,00	2.124.115.592,00	383.190.592,00	122,01

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Kelompok penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp.1.147.381.541.683,00 atau 84,20 persen dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp1.362.727.669.796,00 Dengan demikian Tahun 2008, target realisasi penerimaan PAD tidak dapat dicapai sebesar Rp.215.512.309.018,00 atau 15,80 persen. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008 digambarkan pada tabel 3.13.

**TABEL 3.13. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2008**

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah	75.774.670.000,00	78.273.574.034,00	2.498.904.034,00	103,30
2	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	55.000.000.000,00	37.271.794.044,77	(17.728.205.955,23)	67,77
3	Sewa	20.500.000.000,00	7.891.863.733,00	(12.608.136.267)	38,50
4	Hasil Lelang Titik Reklame	52.441.810.000,00	48.995.247.109,00	(3.446562.891,00)	93,43
5	Klaim Asuransi Aset	2.650.000.000,00	-	(2.650.000.000,00)	0,00
6	Jasa Giro	113.150.000.000,00	125.111.498.761,03	11.961.498.761,03	110,57
7	Pendapatan Bunga	199.632.776.008	185.846.512.432,00	(13.786.263.576,00)	93,09
8	Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	7.000.000.000,00	13.242.467.368,42	6.242.467.368,42	189,118
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.000.000.000,00	4.102271.483,00	3.102.271.483,00	410,83
10	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	9.204.537.000,00	1.070.020.000,00	(8.134.517.000,00)	11,62
11	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjual	2.464.000.000,00	3.251.600.582,00	621.419.707,00	131,96
12	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	639.875.477.992,00	504.936.837.927,00	(134.938.640.065,00)	78,91
13	Biaya Administrasi Surat Keterangan asal	-	366.980.000,00	366.980.000,00	-
14	Sumbangan Jaminan Keseleamatan diluar jam kerja	3.079.000.000,00	5.475.342.246,00	2.396.342.246,00	177,83
15	Perjanjian Kerjasama Taman Marga Satwa Ragunan	650.000.000,00	740.285.600,00	90.285.600,00	113,89
16	Sumbangan dari Perum Jasa Raharja	2.500.000.000,00	5.682.207.000,00	3.182.207.000,00	227,29
17	Pemakaian rusun sederhana Marunda	-	164.218.000,00	164.218.000,00	-
18	Pemakaian rusun sederhana Kapuk	-	790.208.408,00	790.208.408,00	-
19	Pendapatan dari Pengembalian Setelah Tuntutan	62.507.200.400,00	2.566.072.868,00	(59.941.127.532,00)	4,11
20	Hasil Tagih Eks BPPN	-	20.887.016.713,23	20.887.016.713,23	-
21	Pemabayaran Air dan Listrik	-	1.489.498.187,00	1.489.498.187,00	-
22	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	60.156.783.450,00	9.585.929.516,00	(50.570.853.934,00)	15,93
23	Pendapatan Denda Pajak	53.680.580.946,00	63.389.857.666,00	9.709.276.720,00	118,09
24	Pendapatan Denda Retribusi	1.460.834.000,00	10.639.145.115,00	9.178.311.115,00	728,29
	Jumlah	1.362.727.669.796,00	1.147.381.541.653,00	(215.346.128.143,00)	84,20

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008, antara lain sebagai berikut:

a). Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi hasil Penjualan Aset Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp78.273.574.034,00 atau 103,30 persen, dari proyeksi yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 Rp75.774.670.000,00 Dengan demikian Tahun 2008, realisasi penjualan aset ini dapat melampaui target Rp.2.498.908.034,00 atau 3,30 persen.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah dalam Tahun Anggaran 2008 diperoleh antara lain dari :

- (1) Penjualan jalan atau sarana, sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- (2) Penjualan inventaris/barang bekas Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang usia pemakaiannya bertambah, karena telah dihapuskan seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya dan inventaris kantor yang tidak terpakai.
- (3) Penerimaan dari hasil penjualan brandgang yang penggunaannya diberikan kepada masyarakat dengan membayar biaya kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Tahun Anggaran 2008 digambarkan pada tabel 3.14.

TABEL 3.14
Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2008

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Pelepasan Hak Atas Tanah	50.000.000.000,00	67.227.729.725,00	17.227.729.725,00	134,46
2.	Penjualan Brandgang	10.234.350.000,00	8.679.906.000,00	(1.554.444.000,00)	84,81
3.	Penjualan Peralatan/Pelengkapan Kantor tidak terpakai	100.000.000,00	39.585.000,00	(60.415.000,00)	39,59
4.	Penjualan Mesin atau alat berat tdk terpakai	665.320.000,00	30.000.000,00	(635.320.000,00)	4,51
5.	Penjualan Gedung dan Bangunan lain	2.750.000.000,00	476.600.500,00	(2.273.399.500,00)	17,33
6.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	2.600.000.000,00	72.597.455,00	(2.527.402.545,00)	2,79
7.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	9.400.000.000,00	1.739.655.354,00	(7.660.344.646,00)	18,51
8.	Penjualan Lampu Hias Bekas	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	0,00
9.	Penjualan Alat-alat Kesehatan tidak terpakai	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	0,00
	Jumlah	75.774.670.000,00	78.273.574.034,00	2.498.904.034,00	103,30

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

b). Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Realisasi penerimaan atas Hasil penerimaan pihak ketiga yang diperoleh dari Rekomendasi HGB/HPL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp37.271.794.044,77 atau 67,77 persen dari target yang ditetapkan Rp55.000.000.000,00. Realisasi penerimaan ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp17.728.205.955,23 atau 32,23 persen. Penerimaan Rekomendasi HGB/HPL ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak diatas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

c). **Sewa**

Realisasi penerimaan sewa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp7.891.863.733,00 atau 38,50 persen, dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp.20.500.000.000,00. Di tahun 2008 realisasi penerimaan sewa turun sebesar Rp.12.608.136.267,00 atau 61,50 persen.

Realisasi penerimaan sewa ini, diperoleh dari;

- (1) Hasil sewa atas tanah sebesar Rp4.935.365.017,00;
- (2) Hasil sewa gedung sebesar Rp2.956.498.716,00.

d). **Hasil Lelang Titik Reklame**

Realisasi penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp48.995.247.109,00 atau 93,43 persen, dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp52.441.810.000,00. Dengan demikian di tahun 2008, realisasi penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tidak dapat mencapai target sebesar Rp3.446.562.891,00 atau 6,57 persen.

Realisasi penerimaan ini diperoleh dari;

- (1) Hasil Lelang Titik Reklame diatas asset Pemerintah Daerah sebesar Rp47.838.506.629,00;
- (2) Hasil Lelang Titik Reklame atas non Aset Pemerintah Daerah sebesar Rp1.156.740.480,00.

e). **Jasa Giro**

Realisasi penerimaan Jasa Giro sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp.125.111.498.761,03 atau 110,57 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp.113.150.000.000,00. Dengan demikian tahun 2008, realisasinya dapat melampaui target sebesar Rp.11.961.498.761,03 atau 10,56 persen.

Realisasi penerimaan jasa giro diperoleh atas;

(1) Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp107.590.662.790,03,

(2) Jasa Giro Pemegang Kas sebesar Rp.17.520.835.971,00.

Kenaikan realisasi penerimaan jasa giro tersebut disebabkan oleh besarnya saldo kas yang ada di Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang dicatat sebagai SILPA tahun berjalan. Jasa Giro ini sangat bergantung kepada jumlah akumulasi dana yang belum digunakan dan tersimpan di rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

f). Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga ini diperoleh dari bunga deposito atas penempatan dana pada Bank Pemerintah, yang realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008, mencapai sebesar Rp185.846.512.432,00 atau 93,09 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp199.632.776.008,00 Sehingga di tahun 2008 realisasi pendapatan bunga deposito tidak mencapai target sebesar Rp13.786.263.576,00 atau 6,91 persen.

Penurunan realisasi penerimaan Bunga Deposito tersebut disebabkan oleh turunnya tingkat suku bunga Bank.

g). Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.13.242.467.368,42 atau 189,18 persen, dari target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp.7.000.000.000,00. Di tahun 2008 realisasi penerimaan TGR dapat melampaui target sebesar Rp.6.240.966.868,00 atau 89,16 persen.

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh dari:

(1) Kerugian Uang Daerah Rp.11.661.157.040,42

(2) Kerugian Barang Daerah Rp 1.581.310.328,00.

h). Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai di terapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah, yang mempunyai tugas dan fungsi memberi pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLU ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi penerimaan BLUD sampai akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp504.936.837.927,00 atau 78,91 persen, dari proyeksi yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp639.875.477.992,00. Dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2008, tidak dapat dicapai sebesar Rp21,09 persen.

Rincian realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 terlihat pada tabel 3.15.

TABEL 3.15
Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2008

No	Uraian	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran Setelah perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	BLUD RSUD	288.940.167.992,00	269.391.390.602,00	(19.548.777.390,00)	93,23
2	BLUD Puskesmas	72.484.000.000,00	60.065.996.423,00	(12.418.003.577,00)	82,87
3	BLUD Laskesda	2.891.800.000,00	1.724.598.621,00	(1.167.201.379,00)	59,64
4	BLUD BP Parkir	24.150.000.000,00	17.192.595.042,00	(6.957.404.958,00)	71,19
5	BLUD Transjakarta	240.000.000.000,00	150.930.099.159,00	(89.069.900.841,00)	62,89
6	BLUD Ambulan Gawat Darurat	7.000.000.000,00	2.037.511.809,00	(4.962.488.191,00)	29,11
7	BLUD Akademi Perawatan	1.909.510.000,00	1.569.189.731,00	(340.320.269,00)	82,18
8	BLUD Stadion Lebak Bulus	2.500.000.000,00	2.025.456.540,00	(474.543.460,00)	81,02
	Jumlah	639.875.477.992,00	504.936.837.927,00	(134.938.640.065,00)	78,91

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

b. Bagian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi penerimaan daerah atas Dana Perimbangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp8.702.813.393.647,00 atau 102,45 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp8.523.929.667.482,00. Dengan demikian Tahun 2008, realisasi penerimaan Dana

Perimbangan dapat melampaui target sebesar Rp178.883.726.165,00 atau 2,45 persen.

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 digambarkan pada tabel 3.16.

TABEL 3.16
Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2008

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
I.	Bagi Hasil Pajak	8.293.929.667.482,00	8.526.794.672.392,00	232.865.004.910,00	102,81
II.	▪ Pajak Bumi dan Bangunan	1.950.000.000.000,00	1.928.488.284.326,00	(21.511.715.674,00)	98,90
	▪ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.600.000.000.000,00	1.564.290.439.210,00	(35.709.560.790,00)	97,77
	▪ Pajak Penghasilan Orang Pribadi	4.743.929.667.482,00	5.034.015.948.856,00	290.086.281.374,00	106,11
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	230.000.000.000,00	176.018.721.255,00	(53.981.278.745,00)	76,53
	▪ Pendapatan SDA Sektor Perikanan	2.000.000.000,00	979.279.732,00	(1.020.720.268,00)	48,96
	▪ Pendapatan SDA Sektor Minyak Bumi	208.000.000.000,00	163.321.548.023,00	(44.678.451.977,00)	78,52
	▪ Pendapatan SDA Sektor Gas Alam	20.000.000.000,00	11.717.893.500,00	(8.282.106.500,00)	58,59
	JUMLAH	8.523.929.667.482,00	8.702.813.393.647,00	178.883.726.165,00	102,45

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Dana Perimbangan, Tahun 2008 sebagai berikut :

1) Bagi Hasil Pajak

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp8.526.794.672.392,00 atau 102,81 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp8.293.929.667.482,00. Dengan demikian tahun 2008 terlihat realisasi dapat melampaui target sebesar Rp232.865.004.910,00 atau 2,81 persen.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

a). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 realisasinya mencapai Rp1.928.488.284.326,00 atau 98,90 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.950.000.000.000,00 Dengan demikian Tahun 2008, target penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapai Rp21.511.715.674,00 atau 1,10 persen.

Realisasi penerimaan PBB diperoleh dari sumber :

- (1) PBB Rp1.735.651.187.244,00;
- (2) Penerimaan biaya pemungutan PBB Rp136.614.049.960,00;
- (3) Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat Rp56.223.047.122,00.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara lain :

- (1) Pelaksanaan penilaian terhadap objek PBB tertentu secara individual;
- (2) Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait;
- (3) Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada aparat dan masyarakat;
- (4) Pemutakhiran data objek dan subjek PBB;
- (5) Pelaksanaan Pekan Panutan Pembayaran PBB tingkat kotamadya guna percepatan penerimaan;
- (6) Pelaksanaan penagihan yang intensif terhadap tunggakan PBB melalui jemput bola dan operasi sisir.

b). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bagian daerah dari penerimaan BPHTB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 realisasinya mencapai Rp1.564.290.439.210,00 atau 97,77 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.600.000.000.000,00. Dengan demikian Tahun 2008, target realisasi yang tidak dapat dicapai sebesar Rp35.709.560.790,00 atau 2,23 persen.

Realisasi tersebut diperoleh dari sumber penerimaan :

- (1) BPPHTB Rp1.552.058.168.715,00;
- (2) BPHTB Bagian dari Pemerintah Pusat Rp12.232.270.495,00.

Upaya yang intensif dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan BPHTB antara lain :

- (1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada BPN, KPP Pratama, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan PPAT;
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada aparat dan masyarakat;
- (3) Peningkatan pengawasan pembayaran BPHTB oleh Dirjen Pajak melalui pencocokan SSP dan SSB.

c). Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh)

Bagian daerah Provinsi DKI Jakarta dari penerimaan PPh realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp5.034.015.948.856,00 atau 106,11 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp4.743.929.667.482,00. Dengan demikian Tahun 2008, terdapat pelampauan target

penerimaan PPh sebesar Rp290.086.281.374,00 atau 6,11 persen.

Realisasi tersebut diperoleh dari sumber penerimaan;

- (1) PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Rp 302.625.569.924,00;
- (2) PPh Pasal 21 Rp4.731.390.378.932,00.

Dalam rangka pencapaian target penerimaan PPh Tahun Anggaran 2008, dilakukan berbagai upaya yang intensif seperti :

- (1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan penjangkaran objek pajak pada kawasan tertentu, seperti : Mall, Pusat Pertokoan, Pusat Bisnis dan Perdagangan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat (khususnya para Bendaharawan Pemerintah dan Badan Usaha).

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp176.018.721.255,00 atau 76,53 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp230.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2008 tidak dapat dicapai sebesar Rp53.981.278.745,00 atau 23,47 persen.

Realisasi Penerimaan Bagian Daerah atas Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA bersumber dari penerimaan:

- a) Bagi hasil/dari pungutan hasil perikanan Rp979.279.732,00;
- b) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp163.321.548.023,00;

- c) Bagi Hasil dari pertambangan Gas Bumi sebesar Rp11.717.893.500,00.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan bagi hasil SDA, dilakukan langkah-langkah dan upaya yang intensif, seperti :

- a) Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam rangka perhitungan lifting produksi dari dana bagi hasil SDA yang akan diberikan ke daerah;
- b) Dilakukannya konfirmasi data realisasi penerimaan SDA secara periodik.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp63.378.946.200,00 atau 50,00 persen dari target yang ditetapkan Rp126.378.946.200,00. Dengan demikian target yang tidak tercapai di Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp63.000.000.000,00 atau 73,58 persen. Realisasi tersebut merupakan Dana Penyeimbang/Penyesuaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan;

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sebesar Rp29.985.750.000,00;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan tahun 2008, kepada Daerah Provinsi , Kabupaten dan Kota sebesar Rp33.393.196.200,00.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara umum, beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target pendapatan di tahun 2008 antara lain :

- 1) Berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdampak pada turunnya hunian kamar hotel bintang lima dan hotel berbintang lima berlian;
- 2) Adanya kecenderungan, pihak korporat untuk menginap di apartemen, hal ini disebabkan pihak korporat melihat dari segi biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis dan lebih efisien;
- 3) Adanya pembangunan SPBU di pintu masuk arah ke Jakarta, sehingga berdampak pada tidak optimalnya target realisasi pendapatan daerah;
- 4) Beralihnya pemasangan iklan promosi dari media luar ke media elektronik dan media masa yang mengakibatkan berkurangnya pemasangan reklame media luar sebagai media promosi;
- 5) Adanya pelarangan atau *White Area* di daerah tertentu terhadap pemasangan reklame dan pembatasan pemasangan iklan khusus untuk iklan rokok yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pemasangan reklame;
- 6) Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah lebih bersifat sebagai pengaturan (*regulerend*) atas pemakaian/pemanfaatan Air Bawah Tanah oleh masyarakat;
- 7) Adanya pembatasan terhadap pemakaian/pemanfaatan Air Bawah Tanah oleh masyarakat sesuai dengan izin pemakaian/pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diberikan oleh Dinas Pertambangan;
- 8) Sistem transportasi kota yang kian membaik sehingga kendaraan umum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menjalankan

aktifitas kegiatannya mengingat biaya yang dikeluarkan lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi dan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan Mass Rapid Transport/Bus Way;

- 9) Pertumbuhan sarana gedung-gedung dan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta tidak diikuti dengan pertumbuhan *Accupansi*/penggunaan dari marka parkir terutama kendaraan roda empat, mengingat kecenderungan masyarakat mengalihkan model transportasi kendaraan roda empat ke kendaraan roda dua.

b. Solusi

Langkah pemecahan masalah, antara lain :

- 1) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit satuan kerja terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dengan Pemerintah Pusat agar realisasi pendapatan daerah dapat dicapai secara optimal;
- 2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima dengan jalan penyederhanaan proses administrasi agar masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran Pajak Daerah sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah;
- 3) Peningkatan pemeriksaan dan pengawasan kepada masyarakat maupun aparat yang mengelola pendapatan daerah, agar seluruh penerimaan daerah dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
- 4) Dilakukannya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat maupun aparat pemungut dengan tujuan agar adanya pemahaman dari segi ketentuan peraturan yang menjadi dasar pemungutan pendapatan daerah;

- 5) Dilakukannya intensifikasi pendapatan daerah terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah bekerjasama dengan BPKP;
- 6) Dilakukannya ekstensifikasi pendapatan daerah berdasarkan potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, disamping mengkaji peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam pemungutan pendapatan daerah agar target yang ditetapkan dicapai dengan optimal.

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Keuangan Daerah dalam perencanaan program dan kegiatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dengan ketentuan tersebut maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di kelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan lain dalam plaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas antara lain mengatur bahwa :

- a. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup;
- b. Penganggaran untuk setiap pengeluaran harus di dukung dengan dasar hukum yang melandasinya;

- c. Jumlah belanja yang di anggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (*performance-based budgeting*). Yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2008 diproyeksikan sebesar Rp20.117.360.708.333,00, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 realisasinya sebesar Rp15.956.701.805.034,00 atau 79,32 persen, sehingga sisa anggaran di tahun 2008 sebesar Rp4.160.658.903.299,00 atau 20.68 persen. Apabila dilihat dari kebijakan penyusunan APBD yang mengarah kepada surplus/defisit anggaran, maka kondisi belanja daerah di tahun 2008 terjadi surplus anggaran sebesar Rp3.297.365.178.093,03. Hal ini disebabkan, pendapatan daerah di tahun 2008 realisasinya mencapai hasil yang optimal yaitu sebesar Rp19.254.066.983.127,45.

a. Belanja Daerah Menurut Urusan

Belanja Daerah sebagaimana di tetapkan dalam Peratruan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah

daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Realisasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2008, dapat digambarkan pada tabel 3.17 berikut ini.

**TABEL 3.17 Realisasi Belanja Daerah Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2008**

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
I	URUSAN WAJIB	19.488.269.144.211,00	15.487.742.388.678,00	(4.000.526.755.533,00)	79,47
1.	Pendidikan	2.060.304.212.250,00	1.803.061.873.148,00	(257.242.339.102,00)	87,51
2.	Kesehatan	1.289.102.668.632 ,00	1.066.599.852.265,00	(222.502.816.367,00)	82,74
3.	Pekerjaan Umum	2.515.409.568.271,00	1.631.878.236.501,00	(883.531.331.770,00)	64,88
4.	Perumahan	1.120.557.058.302 ,00	544.511.747.206,00	(576.045.311.096,00)	48,59
5.	Penataan Ruang	118.859.799.034,00	79.817.166.782,00	(39.042.632.252,00)	67,15
6.	Perencanaan Pembangunan	56.805.377.576 ,00	44.518.972.012,00	(12.286.405.564,00)	78,37
7.	Perhubungan	1.141.799.362.006,00	901.141.600.615,00	(240.657.761.391,00)	78,92
8.	Lingkungan Hidup	1.148.088.442.675 ,00	904.387.530.697,00	(243.700.911.978,00)	78,77
9.	Pertanahan	30.556.845.374,00	26.767.373.759,00	(3.789.471.615,00)	87,60
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	68.034.864.368 ,00	42.096.191.901,00	(25.938.672.467,00)	61,87
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	76.307.701.498 ,00	71.893.578.368,00	(4.414.123.130,00)	94,22
12.	Sosial	217.249.754.378,00	188.824.130.656,00	(28.425.623.722,00)	86,92
13.	Tenaga Kerja	244.992.993.850 ,00	205.184.255.084,00	(39.808.738.766,00)	83,75
14.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	115.098.907.956,00	45.749.824.199,00	(69.349.083.757,00)	39,75
15.	Penanaman Modal	48.890.499.153 ,00	35.840.799.168,00	(13.049.699.985,00)	73,31
16.	Kebudayaan	185.278.774.145,00	169.681.007.805,00	(15.597.766.340,00)	91,58
17.	Pemuda dan Olahraga	322.207.787.432 ,00	263.127.430.993,00	(59.080.356.439,00)	81,66
18.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	524.706.907.830,00	405.558.608.368,00	(119.148.299.462,00)	77,29
19.	Pemerintahan Umum	7.634.846.357.286 ,00	6.663.066.297.272,00	(971.780.060.014,00)	87,27
20.	Kepegawaian	450.578.833.338,00	315.406.718.348,00	(135.172.114.990,00)	70,00
21.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.788.488.535 ,00	19.852.575.291,00	(5.935.913.244,00)	76,98
22.	Kearsipan	25.421.738.463,00	13.913.579.234,00	(11.508.159.229,00)	54,73
23.	Komunikasi dan Informatika	67.382.201.859 ,00	44.863.039.006,00	(22.519.162.853,00)	66,58
II	URUSAN PILIHAN	629.091.564.122,00	468.959.416.356,00	(160.132.147.766,00)	74,75
1.	Pertanian	208.459.065.464,00	137.102.408.148,00	(71.356.657.316,00)	65,77
2.	Energi dan Sumberdaya Mineral	58.911.516.969,00	45.936.023.494,00	(12.975.493.475,00)	77,97
3.	Pariwisata	124.166.261.598,00	93.690.714.566,00	(30.475.547.032,00)	75,46
4.	Kelautan dan Perikanan	174.682.742.910,00	143.352.572.087,00	(31.330.170.823,00)	82,06
5.	Perdagangan	62.871.977.181,00	48.877.698.061,00	(13.994.279.120,00)	77,74
	Jumlah (I,II)	20.117.360.708.333,00	15.956.701.805.034,00	(4.160.658.903.299,00)	79,32

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

b. Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja

Realisasi Belanja Daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Rincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008, dapat disajikan pada tabel 3.18.

Tabel 3.18
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2008

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2008		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5(4-3)	5(4:3)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.738.436.146.988,00	6.201.069.923.218,00	(537.366.223.770,00)	92,03
I	TUNJANGAN PEGAWAI	6.094.147.011.500,00	5.676.129.009.962,00	(418.018.001.538,00)	93,14
	1. Tambahan Penghasilan PNS	2.919.191.170.135,00	2.729.856.472.309,00	(189.334.697.826,00)	93,51
	2. Tambahan Penghasilan PNS	2.862.940.092.217,00	2.634.535.674.290,00	(228.404.417.927,00)	92,02
	3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	23.005.200.000,00	22.726.343.462,00	(278.856.538,00)	98,79
	4. Belanja Pemungutan Pajak Daerah	289.010.549.148,00	289.010.519.901,00	(29.247,00)	99,99
II	BELANJA BUNGA	15.331.020.000,00	14.998.359.777,00	(332.660.223,00)	97,83
III	BELANJA HIBAH	177.070.600.000,00	177.020.390.700,00	(50.209.300,00)	99,97
	1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	100,00
	2. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	45.000.000.000,00	44.949.817.700,00	(50.182.300,00)	99,89
	3. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	92.070.600.000,00	92.070.573.000,00	(27.000,00)	99,99
IV	BELANJA BANTUAN SOSIAL	369.281.880.000,00	329.840.767.972,00	(39.441.112.028,00)	89,32
	1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	367.206.880.000,00	327.784.517.972,00	(39.422.362.028,00)	89,26
	2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Partai Politik	2.075.000.000,00	2.056.250.000,00	(18.750.000,00)	99,10
V	BELANJA TIDAK TERDUGA	82.605.635.488	3.081.394.807,00	(79.524.240.681,00)	3,73
	BELANJA LANGSUNG	13.378.924.561.345,00	9.755.631.881.816,00	(3.623.292.679.529,00)	7,29
I	BELANJA PEGAWAI	2.322.452.571.448,00	1.918.175.923.298,00	7.433.179.310.368,00	82,54
II	BELANJA BARANG DAN JASA	6.499.519.334.227,57	5.255.609.891.573,00	(1.243.909.442.654,57)	80,86
III	BELANJA MODAL	4.556.952.655.669,40	2.581.612.794.945,00	(1.975.339.860.724,40)	56,65
	JUMLAH	20.117.360.708.333,00	15.956.701.805.034,00	(4.160.658.903.299,00)	79,32

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 sebai berikut :

- 1) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp5.676.129.009.962,00 atau 93,14 persen, dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp6.094.147.011.500,00. Dari realisasi tersebut, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp418.018.001.538,00 atau 6,86 persen;

- 2) Belanja Bunga, digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Belanja Bunga realiasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp14.998.359.777,00 atau 97,83 persen, dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 Rp15.331.020.000,00. Dengan demikian, sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp332.660.223,00 atau 2,17 persen;

Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pemabayaran utang pada Lembaga Keuangan Bank Dunia untuk Proyek JUDP I, II dan III dan pada Lembaga Keuangan Jepang untuk Proyek Pemetaan/Geis, Proyek jaringan Air Minum dan Proyek Kebersiahan.

- 3) Belanja Hibah, digunakan untuk pemberian hibah dalam bantuan uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau

pemerintah daerah lainnya atau kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Realisasi Belanja ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp177.020.390.700,00 atau 99,97 persen, dari proyeksi yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008.

Realisasi tersebut merupakan pemberian hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kepada; Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Komite Olah Raga Nasional (KONI) DKI Jakarta dan Kelompok/Anggota masyarakat.

- 4) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Realisasi Belanja ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp329.840.767.972,00 atau 89,32 persen dari proyeksi yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 Rp369.281.880.000,00, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp39.441.112.028,00 atau 10,68 persen.

Bantuan Sosial ini diberikan kepada; Organisasi sosial Kemasyarakatan, Organisasi sosial Keagamaan, Partai Politik dan Dewan Pimpinan Daerah (DPA).

- 5) Belanja Tidak Terduga, digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan

gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Realisasi belanja ini sampai akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp3.081.394.807,00 atau 3,73 persen, dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan anggaran sebesar Rp82.605.635.488,00. Dengan demikian ditahun 2008, sisa anggaran yang belum digunakan sebesar Rp79.524.240.681,00 atau 96,27 persen;

- 6) Belanja Pegawai pada Belanja Langsung, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi belanja ini sampai akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.918.175.923.298,00 atau 82,59 persen, dari alokasi setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp2.322.452.571.448,03, sedangkan sisa anggaran yang tidak dapat terserap sebesar Rp404.276.648.150,00 atau 17,41 persen;
- 7) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja ini realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp5.255.609.841.573,00 atau 80,86 persen, dari proyeksi yang telah ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp6.499.519.334.227,57, sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp1.243.909.442.654,57 atau 19,14 persen;
- 8) Belanja Modal, digunakan untuk pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya;

Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp2.581.612.794.945,00 atau 56,65 persen dari alokasi yang telah ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2008 sebesar Rp4.556.952.655.669,40. Dengan demikian tahun 2008, sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat diserap sebesar Rp1.975.339.860.724,40 atau 43,35 persen.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, beberapa hambatan dan kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan antara lain adalah :

- a. Terlambatnya pengesahan APBD Tahun Anggaran Maret 2008, sehingga banyak sudah melakukan evaluasi kembali terhadap kemungkinan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2008, dan diganti dengan kegiatan – kegiatan baru yang dapat disahkan dalam pembahasan APBD (september), yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan sehingga tingkat penyerapan anggaran menjadi rendah;
- b. Tidak ada kecocokan harga maupun banyaknya dokumen / sertifikat ganda dalam beberapa kasus pembebasan tanah;
- c. Masih terdapatnya kesalahan dalam penulisan/input kode rekening, volume dan satuan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DPA-SKPD), sehingga perlu adanya revisi dalam rangka penyesuaian melalui pembahaasn APBD yang berakibat pada tertundanya pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan fisik / non fisik yang berlangsung, namun melalui mekasisme lelang, bahkan ada beberapa

kegiatan yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena waktu yang tersisa sudah tidak memungkinkan;

- d. Adanya tagihan-tagihan dari pihak ketiga yang belum dapat direalisasikan di akhir Tahun Anggaran 2008 sehingga akan menjadi beban APBD Tahun Anggaran 2009;
- e. Adanya sikap kehati – hatian dan tidak mau beresiko dari para Kepala sub bidang dan panitia lelang terhadap kegiatan yang berbutget besar.

Langkah pemecahan masalah, antara lain :

- a. Pengesahan Peraturan Daerah APBD dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- b. Pengadaan tanah dihitung berdasarkan nilai NJOP dan nilai kewajarannya dan menitipkan uang dipengadilan untuk sertifikat yang bermasalah.
- c. Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi seluruh SDM pengelola keuangan SKPD, agar SKPD sebagai pengguna Anggaran dapat memahami ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam penggunaan kode rekening. Karena kesalahan pengguna kode rekening, sangat berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan seluruh SKPD dapat memahami ketentuan pelaksanaan APBD bahwa APBD di mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dengan demikian pelaksanaan

kegiatannya harus sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan yang telah ditetapkan.

- d. Sosialisasi dari Bappenas tentang Kepres 80 / 2003

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan, diperoleh dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu yaitu Tahun Anggaran 2007 yang jumlahnya sebesar Rp1.364.256.321.930,00 jumlah ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008.
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp183.115.057.373,00, yang terdiri dari :
 - a. PMP kepada PT MRTJ sebesar Rp.113 Milyar, terdiri dari Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp.63 Milyar dan dana APBD sebesar Rp.50 Milyar
 - b. PMP kepada Bank DKI Jakarta sebesar Rp.30 Milyar
 - c. PMP kepada LKM Bina Ekonomi/PPMK sebesar Rp.83,82 Milyar
 - d. Pelunasan Hutang kegiatan tahun 2007 Rp.13,29 Milyar
 - e. Pembayaran Hutang Pokok sebesar Rp.38,62 Milyar

E. Dana Cadangan Daerah (DCD)

Posisi Dana Cadangan Daerah (DCD) sampai dengan bulan Nopember 2008 sebesar Rp610.249.270.191,56, di tambah dengan bunga deposito periode bulan Nopember 2008 sebesar Rp6.018.896.893,00, maka posisi DCD

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 menjadi sebesar Rp616.268.167.084,56. DCD tersebut di depositokan pada Rekening Bank DKI sebesar Rp244.945.916.581,00 dan pada Rekening Bank BRI sebesar Rp371.322.250.503,56. Sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

1. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
2. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

F. Ringkasan Realisasi APBD

Berdasarkan penjelasan dan data-data Realisasi pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka dapat di iktisarkan dalam ringkasan APBD dalam table berikut ini :

Tabel 3.19 RINGKASAN REALISASI APBD 2008 (triliun rupiah)

No	JENIS	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENDAPATAN DAERAH	19,031	19,221	101.00
2	BELANJA DAERAH	20,117	15,956	79.32
	Surplus/Defisit	(1,086)	3,265	
3	PEMBIAYAAN DAERAH	1,085	1,181	108.85
	Penerimaan Pembiayaan	1,364	1,364	100.00
	Pengeluaran pembiayaan	0.28	0.18	65.83
4	TOTAL APBD	20,395	16,139	79.13
	SILPA th 2008		4,446	

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2007-2012 yang meliputi Program *Dedicated* dan Program-Program Urusan (wajib dan pilihan). Adapun hasil-hasilnya antara lain :

A. Program *Dedicated*

Program *Dedicated* merupakan program prioritas yang bersifat menyeluruh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.

Adapun hasil-hasil program *dedicated* antara lain :

1. Normalisasi Kali

- a. Terlaksananya pemasangan *sheet pile* di Kali Ciliwung-Gajah Mada sepanjang 600 m' (sisi Barat);
- b. Terlaksananya pemasangan *sheet pile* sepanjang 180 m' (pada 2 sisi);
- c. Terlaksananya pengerukan sebanyak 1.600 m³ di Kali Sekretaris;
- d. Terlaksananya inventarisasi sodetan Cakung Lama/Cakung Drain.

2. Pembebasan Tanah Banjir Kanal Timur (BKT)

- a. Terlaksananya pembebasan tanah Banjir Kanal Timur seluas 53.280 m² di Jakarta Utara dan seluas 165.078 m² di Jakarta Timur;
- b. Terlaksananya konsinyasi pada wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur sebanyak 35 persil;
- c. Terpenuhinya kebutuhan total lahan BKT seluas 4.088.955 m²; untuk profil basah 2.570.195 m² dan untuk koridor/jalan 1.518.760 m².

3. Normalisasi Waduk

- a. Terlaksananya pembangunan *sheet pile* sepanjang 150 m;
- b. Terlaksananya perbaikan turap dan pengerukan sebanyak 700 m³ di waduk Papanggo Sunter Utara;
- c. Terlaksananya pembangunan turap batu kali sepanjang 200 m';
- d. Terlaksananya pembangunan saluran beton dan batu kali sepanjang 400 m;
- e. Terlaksananya perbaikan turap 100 m' di kali Sunter Hulu.

4. Penyempurnaan Pelayanan Koridor *Busway* 1 s/d 10

- a. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian jalur *busway*;
- b. Terlaksananya penyempurnaan terowongan kota;
- c. Terlaksananya perbaikan Depo K Pool PPD Dan Mogot (pool *busway* koridor 10);
- d. Terlaksananya perencanaan / DED *busway* koridor 14 dan 15
- e. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana penunjang koridor busway 8, 9, dan 10.

5. Persiapan Pembangunan *Mass Rapid Transport* (MRT)

- a. Terlaksananya kajian dampak lalu lintas pra konstruksi MRT

6. Pembangunan Terminal Pulo Gadung Tahap I

- a. Masih menunggu selesainya penyusunan *master plan* dan rancangan *design* bangunan.

7. Pembangunan/Peningkatan Jalan/Jembatan Mendukung Sentra Primer Timur

- a. Terlaksananya inventarisasi pembebasan tanah Jl. Tembus Sentra Primer Timur - Dr KRT Rajiman;
- b. Terlaksananya inventarisasi pembebasan tanah Jl. Penggilingan Raya.

8. Pembangunan/Peningkatan Jalan/Jembatan mendukung Sentra Primer Barat

- a. Terlaksananya inventarisasi pembebasan tanah Jl. Daan Mogot

- b. Terlaksananya perencanaan penyelesaian terowongan Kembang Kerep sejajar Tol Jakarta Merak.

9. Penyelesaian dan Pembangunan Rumah Susun (Rusun)

- a. terselesaikannya pembangunan Rusun siap huni Pulo Gebang sebanyak 1 blok (100 unit);
- b. Terselesaikannya struktur Rusun Marunda sebanyak 4 blok (400 unit);
- c. Terselesaikannya struktur Rusun Cakung Barat sebanyak 2 blok (150 unit);
- d. Terselesaikannya struktur Rusun Pegadungan sebanyak 2 blok (200 unit);
- e. Terselesaikannya struktur Rusun Pinus Elok sebanyak 4 blok (400 unit).

10. Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Terlaksananya pemberian biaya operasional pendidikan untuk 702.739 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- b. Terlaksananya pemberian biaya operasional pendidikan untuk 258.714 siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
- c. Terlaksananya pemberian biaya operasional pendidikan untuk 92.347 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan;
- d. Terlaksananya pemberian biaya operasional pendidikan untuk 41.615 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

11. Pelayanan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin (Gakin) dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

- a. Terlayannya penanganan kesehatan keluarga miskin dan korban bencana di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.714.414 kasus yang terdiri dari *claim* kasus JPK Gakin sebanyak 1.487.863, *claim* kasus SKTM sebanyak 189.238 dan *claim* kasus bencana sebanyak 37.313;

- b. Terlaksananya pelaksanaan kesehatan untuk keluarga miskin dan korban bencana sebanyak 1.487 kasus;
- c. Terlaksananya pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 189.238 dan *claim* kasus bencana sebanyak 37.313.

12. Penanggulangan DBD, TBC dan Penyakit Pasca Banjir

- a. Terlaksananya penanggulangan DBD sebanyak 28.361 orang
- b. Terlaksananya penanggulangan flu burung pada tahun 2008 yaitu 40% terselamatkan (dari 6 orang yang meninggal 4 orang) dibandingkan pada tahun 2007 hanya 12% yang terselamatkan (dari 8 orang yang meninggal 7 orang).

13. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

- a. Terlaksananya pemberian *claim* khusus pengaman kemiskinan (JPK Gakin) sebanyak 1.487.863 *claim*.

14. Penerapan *Good Governance*

- a. Terselenggaranya *E-Announcement* sebanyak 604 SKPD;
- b. Terselenggaranya Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Berbasis Internet;
- c. Terlaksananya pengelolaan media *online* serta “beritajakarta.com”
- d. Terlaksananya pendelegasian 13 kewenangan pelayanan di tingkat kecamatan dan 3 penguatan di tingkat kelurahan.

15. Pengembangan Wisata Kotatua

- a. Telah beroperasinya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kotatua
- b. Terlaksananya pencahayaan kawasan Kotatua
- c. Terlaksananya penataan kawasan Kotatua (zona Fatahillah).

16. Peningkatan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kota

- a. Terlaksananya penataan taman Ayodya di Jakarta Selatan seluas 6.000 m²;

- b. Pembebasan lahan untuk taman di Jl. Manunggal di Jakarta Timur seluas 645 m2 serta;
- c. Terlaksananya penataan jalur hijau koridor *busway* VIII sepanjang 10.000 m2, koridor *busway* IX sepanjang 7500 m2, koridor *busway* X sepanjang 3.926 m2.

17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- a. Terlaksananya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di 44 kelurahan;
- b. Terlaksananya berbagai kegiatan fisik antara lain saluran, jalan dan jembatan lingkungan, serta penataan kawasan kumuh;
- c. Terlaksananya berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

18. Pengendalian Polusi

- a. Terlaksananya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Jl. Thamrin-Sudirman setiap minggu terakhir pada setiap bulannya.
- b. Terlaksananya uji emisi

B. Program Prioritas SKPD Menurut Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

Program yang telah dilaksanakan pada urusan pendidikan antara lain :

- a. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun**, dengan prioritas kegiatan antara lain : pemberian beasiswa *retrival* atau transisi bagi anak jalanan tingkat SLTP, pemberian beasiswa *retrival* dan transisi bagi siswa putus sekolah tingkat SD, pelaksanaan akreditasi sekolah TK, SD, SMP, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ujian nasional SD, pembinaan peserta untuk mengikuti Porseni tingkat Nasional, penyusunan juknis, pengawasan dan pengendalian BSP SD *on line*, penyelesaian rehab total SD/SMP.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Angka putus sekolah SD adalah 571 orang , dan SMP sebesar 1.947 orang, jumlah guru SD/SMP yang sudah disertifikasi sebesar 5.242;
- 2) Terlaksananya rehab total 5 gedung SD Negeri dan 6 gedung SMP Negeri;
- 3) Terlaksananya jumlah anak jalanan yang mengikuti pendidikan kesetaraan SLTP 300 orang;
- 4) Tersedianya beasiswa reatrival dan transisi bagi siswa putus sekolah untuk 250 siswa SD;
- 5) Tersedianya penerimaan siswa baru (PSB) tingkat SMP *on line*;
- 6) Terlaksanya SD/SMP Negeri dan swasta sebanyak 300 sekolah;
- 7) Terlaksananya 36 SMP Terbuka;
- 8) Terlaksananya pembinaan bakat minat dan kreatifitas siswa SD dan SMP;
- 9) Tercapainya tingkat kelulusan SD 100% dengan rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) 7,26.

b. Program Pendidikan Menengah, dengan prioritas kegiatan antara lain pelatihan kesetaraan bagi anak jalanan, penyusunan system data sekolah terakreditasi, seleksi peserta PSB asal luar DKI, sosialisasi PSB *Real Time On Line* bagi pejabat dan masyarakat tingkat Provinsi Tahun Pelajaran 2008/2009, pelatihan penulisan soal ujian sekolah SMK, penyusunan standar kompetensi lulusan ujian sekolah SMK, serta pelatihan penulisan kisi – kisi dan soal sekolah SMK.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya rehab total sebanyak 6 sekolah, pada tahun 2007 sebanyak 4 sekolah;

- 2) Terlaksananya sertifikasi guru SMA/SMK sebanyak 2836 guru;
- 3) Tersedianya biaya operasional untuk 92.374 siswa SMA Negeri dan 41.615 siswa SMK Negeri;
- 4) Terlaksananya peningkatan jumlah anak jalanan yang mengikuti pendidikan kesetaraan SMA 500 orang;
- 5) Terakreditasinya 100% SMA/SMK;
- 6) Tercapainya 116 SMAN dan 62 SMK Negeri berfungsi dengan baik;
- 7) Terlaksananya PSB SMA/SMK *online*;

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan prioritas kegiatan antara lain ESQ bagi guru, pembinaan organisasi profesi guru, peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris, sertifikasi uji kompetensi dan profesi, kuliah ilmu keguruan bagi Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta yang belum memiliki Ijazah keguruan, penilaian angka kredit guru, serta penyediaan guru dengan kompetensi profesi.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya kompetensi teknis SDM SKPD Pendidikan dan Perpustakaan;
- 2) Tersedianya guru yang kompeten;
- 3) Tersedianya guru bahasa Inggris yang telah memiliki sertifikasi uji kompetensi;
- 4) Terbinanya wawasan perpustakaan 86 orang.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan prioritas kegiatan antara lain biaya operasional kantor, dan pengadaan pakaian dinas guru, serta perlengkapannya.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Tersedianya penunjang operasional kantor SKPD tingkat Provinsi, Wilayah Administrasi Kota/Kabupaten;

- 2) Tersedianya perlengkapan dan pakaian dinas guru;
- 3) Tersedianya pengamanan koleksi perpustakaan 25 boks.

e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan prioritas kegiatan antara lain : pemberian beasiswa rawan putus sekolah SMA/SMK, magang guru produktif SMK dan BPPK di industri, implementasi kerjasama kelembagaan, kerjasama manajemen kelembagaan pendidikan, lokakarya kebutuhan tenaga menengah yang berasal dari lulusan SMK, sosialisasi teknologi informasi pelajar SMA/SMK DKI Jakarta, informasi APBS SMA / SMK Negeri berbasis internet.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya penyediaan beasiswa rawan putus sekolah untuk 2.126 siswa SMA;
- 2) Terlaksananya penyediaan beasiswa rawan putus sekolah untuk 1.195 siswa SMA;
- 3) Terlaksananya magang 100 orang guru SMK dan BPPK di Industri;
- 4) Tersedianya Informasi APBS SMA/SMK Negeri berbasis internet;
- 5) Terakreditasi 100% SMA/SMK.

f. Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan, dengan prioritas kegiatan antara lain penyusunan standar pengelolaan pendidikan non formal, penyusunan standar sarana dan prasarana untuk SMA/ Madrasah Aliyah (MA).

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya penyusunan standar pengelolaan pendidikan non formal;

- 2) Terlaksananya penyusunan standar sarana SMA/MA 1000 buku.

g. Program Pendidikan Non Formal, dengan prioritas kegiatan antara lain kejar paket C setara SD, kejar paket B setara SMP, kejar paket A setara SMA, pengadaan modul ketrampilan perempuan, pendidikan ketrampilan perempuan tingkat trampil.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terselenggaranya pendidikan ketrampilan perempuan sejumlah 900 orang;
- 2) Tersedianya dana operasional untuk 35 PKBM;
- 3) Terlatihnya ketrampilan 350 orang di Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) tingkat dasar/trampil;
- 4) Terlaksananya pemberantasan buta aksara 5400 orang;
- 5) Terdidiknya anak jalan *drop out* (DO) bagi kelas 1 dan 2 sebanyak 200 orang.

h. Program Pendidikan Luar Biasa, dengan prioritas kegiatan antara lain pembinaan manajemen SLB Negeri/SLB Persiapan Negeri, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) SLB, pembinaan gugus dan penyelenggaraan SLB, penyelenggaraan pusat sumber pendidikan inklusif, serta biaya operasional untuk TKLB, SMPLB Negeri dan Swasta.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terselenggaranya pusat kegiatan pendidikan inklusif sebanyak 20 sekolah;
- 2) Tersedianya biaya operasional TKLB/SDLB/SMPLB Negeri.

i. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan prioritas kegiatan antara lain pemetaan dan analisis buku perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar,

evaluasi Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Kelurahan, dan perpanjangan jam layanan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya evaluasi 121 unit (TBM dan Perpustakaan Kelurahan);
- 2) Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan menjadi 565.973 ribu;
- 3) Koleksi bahan bacaan menjadi 145.742 judul dan 381.596 eks;
- 4) Terlaksananya pelatihan pengelola TBM 120 orang.

j. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan prioritas kegiatan antara lain sertifikasi uji kompetensi serta profesi, kuliah strata (S1) ilmu keguruan bagi guru SMK/SMK negeri dan swasta yang belum memiliki ijazah keguruan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tercapainya kualifikasi guru SMA/SMK lulusan S1 351 orang;
- 2) Terlaksananya penyetaraan kualifikasi S2 sebanyak 28 orang (guru SMA/SMK);
- 3) Tercapainya kualitas pendidikan S1 guru SMP sebanyak 340 orang.

k. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan prioritas kegiatan antara lain pengawasan dan pengendalian PAUD Formal dan non Formal, bantuan operasional TK, Pembinaan dan pengembangan minat, bakat dan kreatifitas anak usia dini.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terbentuknya 9 sekolah taman kanak-kanak (TK) Negeri Baru
- 2) Terselenggaranya bantuan operasional untuk 18 TK untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM).

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan pendidikan menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan APM - SMA/SMK dari 81,65% pada tahun 2007 menjadi 85,13% pada tahun 2008, dipertahankannya APK pendidikan dasar di atas 100% yaitu APK SD 113,16% dan APK SMP 102,69%.
- b. Menurunnya Angka Putus Sekolah :
 - 1) SD dari 914 siswa pada tahun 2007 menjadi 571 siswa pada tahun 2008;
 - 2) SMP dari 2.172 siswa pada tahun 2007 menjadi 1.947 siswa pada tahun 2008;
 - 3) SMA dari 1229 siswa pada tahun 2007 menjadi 1253 siswa pada tahun 2008.
- c. Angka kelulusan : SD dari 100% (tahun 2007) menjadi 100% (tahun 2008), nilai rata-rata UAN 7,0 (tahun 2007) menjadi 7,26 (tahun 2008); SMP dari 99,99% (tahun 2007) menjadi 99,99% (tahun 2008) , nilai rata-rata UAN 7,23 (tahun 2007) menjadi 7,11 (tahun 2008); SMA dari 96,11% (tahun 2007) menjadi 92,08% (tahun 2008), nilai rata-rata UAN 7,7 (tahun 2007) menjadi 7,5 (tahun 2008); SMK dari 94,28% (tahun 2007) menjadi 93,82% (tahun 2008), nilai rata-rata UAN 7,17 (tahun 2007) menjadi 7,3 (tahun 2008);
- d. Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah dari 11,16 tahun (tahun 2007) menjadi 11,56 Tahun (tahun 2008)
- e. Meningkatnya jumlah sekolah yang mendapat sertifikasi ISO 9001:2000 :
 - 1) SD dari 0 (tahun 2007) menjadi 2 (tahun 2008)
 - 2) SDLB dari 0 (tahun 2007) menjadi 1 (tahun 2008)
 - 3) SMP dari 0 (tahun 2007) menjadi 5 (tahun 2008)
 - 4) SMA dari 7 (tahun 2007) menjadi 14 (tahun 2008)
 - 5) SMK dari 6 (tahun 2007) menjadi 15 (tahun 2008)
- f. Meningkatnya jumlah sekolah berstandar nasional (SSN) :

- 1) SD dari 51 (tahun 2007) menjadi 85 (tahun 2008)
 - 2) SMP dari 70 (tahun 2007) menjadi 73 (tahun 2008)
 - 3) SMA dari 11 (tahun 2007) menjadi 62 (tahun 2008)
- g. Meningkatnya koleksi perpustakaan 145.420 judul 361.238 eksemplar (tahun 2007) menjadi 147.742 judul 381.596 eksemplar (tahun 2008).

b. Urusan Kesehatan

Program yang telah dilaksanakan pada urusan kesehatan antara lain :

a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan prioritas kegiatan pelayanan untuk Gakin/KLB dan bencana.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlayannya keluarga miskin dan korban bencana di Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 565.982 orang, dengan capaian kinerja kegiatan 1.714.414 kasus yaitu *claim* kasus JPK Gakin 1.487.863, *claim* kasus SKTM 189.238, dan *claim* kasus bencana 37.313;
- 2) Terlaksananya *review* JPK Gakin 2 kali;
- 3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi program JPK Gakin.

b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan prioritas kegiatan antara lain koordinasi dan evaluasi terhadap kualitas air bersih, pengendalian vektor penyakit.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pengendalian vektor penyakit;
- 2) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;

- 3) Terlaksananya koordinasi dan evaluasi terhadap kualitas air bersih.

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Bawah Lima Tahun (Balita), dengan prioritas kegiatan antara lain pertemuan advokasi pencegahan dan penanggulangan masalah gizi buruk dan orientasi peningkatan penggunaan ASI Eksklusif. Hasil yang dicapai antara lain meningkatnya jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan menjadi 100%, antara lain melalui pertemuan advokasi pencegahan & penanggulangan masalah gizi buruk dan orientasi peningkatan penggunaan ASI Eksklusif sebanyak 88 orang

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan menjadi 80%
- 2) Terlaksananya cakupan kunjungan bayi meningkat 80%
- 3) Terlaksananya bayi yang mendapatkan kapsul vit A, 2 x per tahun menjadi 85%;
- 4) Terlaksananya Kelurahan yang telah melakukan UCI 100%
- 5) Terlaksananya pemantauan dan pengawasan cold chain, pengembangan jejaring imunisasi, terbentuknya susunan Komda KIPPI tingkat Provinsi.

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan prioritas kegiatan antara lain Promosi kesehatan melalui kelompok dan kemitraan dengan tujuan meningkatnya kesadaran masyarakat DKI Jakarta tentang pola hidup sehat, sosialisasi berbagai program prioritas, antisipasi KLB dan bencana, serta penyuluhan kesehatan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya peningkatan pola hidup sehat masyarakat Provinsi DKI Jakarta menjadi 80 % .
- 2) Tersedianya juklak/juknis pengendalian DBD
- 3) Promosi kesehatan melalui kelompok dan kemitraan kepada 150 orang.

e. Program upaya Kesehatan Masyarakat, dengan prioritas kegiatan antara lain meningkatnya pengetahuan Ibu Hamil (Bumil) resiko tinggi tentang kesehatan, dengan tujuan Berkurangnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka sakit DBD , flu burung dan angka TBC.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Cakupan imunisasi BCG 80%, DPT 80%, Polio 80%, Hepatitis 80%, Campak 80%;
- 2) Terlaksananya pengembangan GSI (Gerakan Sayang Ibu);
- 3) Sosialisasi pedoman pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Ibu kepada 200 orang.

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular, dengan prioritas kegiatan antara lain pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pemantauan penyakit potensial KLB, serta pelaksanaan *surveillance*.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pekan sadar bencana bidang kesehatan kepada 180 orang;
- 2) Tersedianya mapping kegawat daruratan dan bencana;
- 3) Terlaksananya surveillance potensial KLB;
- 4) Terlaksananya antisipasi KLB di provinsi DKI Jakarta;

- 5) Ditetapkan dan diterapkannya kebijakan pengendalian vektor dengan rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes (>95%) , yaitu penerapan dan sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
- 6) Terpantaunya situasi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI Jakarta selama 12 bulan;
- 7) Tersosialisasinya sistem penanggulangan bencana bidang kesehatan, sebanyak 450 orang;
- 8) Tersedianya obat-obatan gawat darurat dan bencana;
- 9) Terlaksananya bimbingan teknis penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) dan penyakit diare;

g. Program Peningkatan Mutu Cakupan dan Layanan UPT, dengan prioritas kegiatan antara lain peningkatan mutu dan layanan sarana dan prasarana kesehatan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain : terlaksananya peningkatan mutu dan Layanan RSUD, AGD, Balai Kesehatan Karyawan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Akademi Keperawatan Jakarta.

h. Program pengawasan obat dan makanan, dengan prioritas kegiatan antara lain koordinasi kebijakan dan kesepakatan program Farmasi, Makanan dan Minuman (FMM), bimbingan teknis fasilitas produksi kosmetika yang izinnya diterbitkan Depkes, meningkatnya pengawasan obat dan makanan yang beredar bebas. bimbingan teknis fasilitas produksi kosmetika yang izinnya diterbitkan Depkes sesuai target yaitu 100 fasilitas.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Pengawasan fasilitas farmasi makanan dan minuman sebanyak 330 rekomendasi;
- 2) Terlaksananya koordinasi formasi makanan dan minuman.

i. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan prioritas kegiatan antara lain pembinaan pelayanan kesehatan peduli remaja.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan peduli remaja sebanyak 200 orang.

j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan prioritas kegiatan antara lain terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD dengan baik, telah dilakukan antara lain peningkatan sarana dan prasarana RSUD Pasar Rebo, Tarakan, Budhi Asih, Duren Sawit, Cengkareng, Koja.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain : terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar yaitu RSUD Pasar Rebo, Tarakan, Budhi Asih, Duren Sawit, Cengkareng dan Rumah Sakit Koja.

k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dengan prioritas kegiatan antara lain peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas;

- 2) Puskesmas Kecamatan telah melaksanakan Quality Assurance (QA) dan memperoleh sertifikat ISO 9001-2000 mencapai 22,72.%.

I. Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penyelenggaraan Kesehatan, dengan prioritas kegiatan antara lain program penetapan kerangka pembiayaan, kelembagaan dan regulasi penyelenggaraan, kesehatan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersusunnya dokumen PPE RS bagi pembiayaan pasien kurang mampu;
- 2) Terlaksananya pertemuan review pembiayaan penyelenggaraan urusan.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Urusan Kesehatan menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Angka kematian bayi/IMR menurun dari 8,40 persen pada tahun 2007 menjadi 8,20 persen pada tahun 2008;
- b. Meningkatnya jumlah Puskesmas yang mendapatkan sertifikasi manajemen pelayanan ISO 9001:2000 dari 32 Puskesmas Kecamatan pada tahun 2007 menjadi 42 Puskesmas Kecamatan pada tahun 2008;
- c. Angka kesakitan DBD menurun dari 356/100.000 penduduk pada tahun 2007 menjadi 317/100.000 penduduk pada tahun 2008;
- d. Angka kematian DBD menurun dari 0,28 % pada tahun 2007 menjadi 0,09% pada tahun 2008.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Program yang telah dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum antara lain :

- a Program pembangunan jalan dan jembatan**, dengan prioritas kegiatan antara lain : pembangunan jembatan pada Kawasan KBN Marunda (Kali Blencong dan Cakung Drain), penyelesaian pembangunan Fly Over/Jembatan Latuharhari Tahap II, pembangunan jembatan Genit - Kali Angke Tahap III serta pembangunan jembatan Teluk Gong Tahap IV.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terbangunnya jembatan kawasan KBN Marunda (Kali Blencong dan Cakung Drain).
- 2) Terbangunnya Jembatan Teluk Gong Thp IV
- 3) Terbangunnya Fly Over/Jembatan Latuharhari Tahap II,
- 4) Terbangunnya Jembatan Genit - Kali Angke Tahap III.

- b Program Pengerukan Saluran/Waduk**, dengan prioritas kegiatan antara lain : pengerukan saluran drainase kota, pengerukan waduk Sunter Utara serta pengerukan Kali Pakin.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pengerukan saluran drainase kota sepanjang 24.197 M'
- 2) Terlaksananya pengerukan waduk Sunter Utara Sepanjang 1.561 M'
- 3) Terlaksananya pengerukan Kali Pakin sepanjang 606 M'

- c Program Peningkatan Mutu dan Cakupan Layanan UPT**, dengan prioritas kegiatan antara lain : pelaksanaan sistem mutu laboratorium, penyelidikan kondisi jalan untuk perhitungan sisa umur jalan serta pendataan pengukuran Peil Jembatan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya Sistem Mutu Laboratorium
- 2) Terlaksananya penyelidikan kondisi jalan untuk perhitungan sisa umur Jalan di 5 lokasi di Kota Administrasi Jakarta Utara

3) Terdatanya pengukuran *peil* jembatan 90 lokasi di Kota Administrasi Jakarta Timur

- d Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** dengan prioritas kegiatan antara lain : pengadaan perangkat pendukung telemetri & hydrometri sistem peringatan dini banjir di DPU Provinsi DKI Jakarta dan pengendalian piket banjir.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersedianya 1 set perangkat infrastruktur pendukung *telemetri & hydrometri* sistem peringatan dini banjir di DPU Prov. DKI Jakarta;
- 2) Terlaksananya piket banjir selama 365 hari.

- e Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,** dengan prioritas kegiatan antara lain perbaikan jembatan di Wilayah DKI Jakarta, pemeliharaan/peningkatan jalan arteri/kolektor wilayah Jakarta Barat dan Sekitar Frontage Toll Road Jakarta Merak serta pemeliharaan/peningkatan Jalan Arteri/Kolektor di Wilayah Jakarta Timur dan Jl. Penggilingan serta Jl. Pulo Gebang.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya perbaikan jembatan 51 jembatan di 5 wilayah DKI Jakarta;
- 2) Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan Jalan arteri/kolektor wilayah Jakarta Barat dan sekitar *Frontage Toll Road* Jakarta Merak seluas 16.072 m²;
- 3) Terpeliharanya dan meningkatnya Jalan arteri/kolektor di wilayah Jakarta Timur dan Jl. Penggilingan serta Jl. Pulo Gebang sepanjang 2.527.65 m'.

- f Program Pengendalian Banjir**, dengan prioritas kegiatan antara lain : pembebasan tanah Banjir Kanal Timur, pembangunan tanggul dan penataan sistem saluran Muara Baru, Luar Batang, Muara Karang dan Pluit serta *sheet pile* dan pengerukan kali besar.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya Pembebasan Tanah Banjir Kanal Timur
- 2) Terbangunnya dan tertatanya Sistem Saluran Muara Baru (150 M'), Luar Batang (1.330 M'), Muara Karang (1.184,5 M') dan Pluit (443 M').
- 3) Terlaksananya pembangunan Sheet Pile dan Pengerukan Kali Besar sepanjang 1.301 M'

- g Program Pengembangan Penerangan Jalan dan Sarana Umum**, dengan prioritas kegiatan antara lain pengadaan *armature* lengkap HPS *tubular* 150 W dan peningkatan kualitas penerangan pada jalan arteri Wilayah Kota Jakarta Selatan sesuai standar.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersedianya *armature* lengkap HPS *tubular* 150 W (pembangunan dan peningkatan kualitas)
- 2) Bertambahnya 1.310 titik lampu penerangan jalan di jalan umum.
- 3) Terbangunnya titik lampu penerangan jalan pada jalur Busway koridor 8, 9, 10 sebanyak 3.105 titik lampu
- 4) Meningkatnya kualitas 750 titik lampu.

- h Program Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi**, dengan prioritas kegiatan antara lain pembangunan saringan sampah otomatis

Kali Sentiong serta layanan pembersihan saluran Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terbangunnya saringan sampah otomatis Kali Sentiong
- 2) Terlayaninya pembersihan saluran Provinsi DKI Jakarta
- 3) Terlaksananya penyediaan pompa, saringan sampah dan Pintu Air di 5 Kotamadya Jakarta

h. Program Pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota, dengan prioritas kegiatan antara lain pembayaran tagihan rekening penerangan jalan umum dan pengadaan BOX APP untuk KWH meter.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terbayarnya tagihan rekening penerangan jalan umum Rp150.833.066.062;
- 2) Tersedianya 900 unit BOX APP untuk KWH meter
- 3) Tersedianya Komponen lepas lampu, *ballast*, *capasitor*, CMH 150 dan Lampu CMH-T 150 W dan 70 W serta Ballast MH 1000 W

j Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas, dengan prioritas kegiatan antara lain pembangunan ducting untuk crossing sarana jaringan utilitas, perencanaan pembangunan ducting SJU Blok M- Dukuh Atas dan operasional pengendalian akibat perizinan penempatan jaringan utilitas.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terbangunnya ducting untuk crossing sarana jaringan utilitas
- 2) Terencananya pembangunan ducting SJU Blok M - Dukuh Atas

- 3) Terlaksananya operasional pengendalian perizinan penempatan jaringan utilitas pada tahun berjalan.

k Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemda, dengan prioritas kegiatan antara lain: pembangunan fasilitas rekreasi dan olahraga Boker di Jakarta Timur dan penyelesaian pembangunan gedung arsip (Blok B dan D), pembangunan gedung blok C dan D Kantor Walikotamadya Jakarta Timur, pembangunan gedung serbaguna Blok Q Kantor Walikotamadya Jakarta Utara, pembangunan gedung Blok B dan Annex Kantor Walikotamadya Jakarta Barat.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terbangunnya fasilitas rekreasi dan olahraga Boker Jakarta Timur
- 2) Terbangunnya Gedung Arsip Provinsi DKI Jakarta (Blok B dan D)
- 3) Terbangunnya Gedung Blok C dan D Kantor Walikotamadya Jakarta Timur
- 4) Terbangunnya Gedung Serbaguna Blok Q Kantor Walikotamadya Jakarta Utara
- 5) Terbangunnya Gedung Blok B dan *Annex* Kantor Walikotamadya Jakarta Barat.

I Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih, dengan prioritas kegiatan antara lain : perbaikan IPAL yang sudah terbangun dan penyusunan konsep standar pengelolaan air limbah di Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya perbaikan IPAL yang sudah terbangun
- 2) Tersedianya konsep standar pengelolaan air limbah di Provinsi DKI Jakarta

- m Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pekerjaan Umum**, dengan prioritas kegiatan antara lain: *pilot project* pemasangan *solar cell* pada penerangan jalan umum di Kepulauan Seribu.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya *pilot project* pemasangan *solar cell* pada penerangan jalan umum di Kepulauan Seribu

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Urusan Pekerjaan Umum menghasilkan outcome antara lain :

- a. Meningkatnya angka *road ratio* dari 6,27 (tahun 2007) menjadi 6,28 (tahun 2008);
- b. Meningkatnya angka *water ratio* dari 2,92 (tahun 2007) menjadi 2,93 (tahun 2008);
- c. Tersedianya sarana perkantoran Pemda yang memadai di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Program yang telah dilaksanakan pada urusan perumahan rakyat antara lain :

- a. **Program Pembangunan Perumahan**, dengan prioritas kegiatan antara lain pembangunan Rusun serta kelengkapannya, peningkatan Jl. Lingkungan, peningkatan Saluran, peningkatan Jalan orang.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya penyelesaian Pembangunan Rusun Pulo Gebang Blok 2
- 2) Terlaksananya penyelesaian (sruktur) pembangunan Rusun Marunda Cluster B Blok 1 & 2
- 3) Terlaksananya penyelesaian (struktur) pembangunan Rusun Marunda Cluster B Blok 3 & 6

- 4) Terlaksananya penyelesaian (struktur) pembangunan Rusun Cakung Barat Blok 1 & 2
- 5) Terlaksananya penyelesaian (struktur) pembangunan Rusun Pinus Elok Lokasi A Blok1 & 2
- 6) Terlaksananya penyelesaian (struktur) pembangunan Rusun Pinus Elok Lokasi B Blok 1
- 7) Terlaksananya penyelesaian (struktur) pembangunan Rusun Pinus Elok Lokasi B Blok 2
- 8) Terlaksananya penyelesaian (struktur) pembangunan Rusun Pegadungan
- 9) Meningkatnya kualitas permukiman dan perbaikan kampung pada 21 RW seluas 54,51 ha di Jakarta Pusat, pada 25 RW seluas 330,92 ha di Jakarta Utara, pada 16 RW seluas 907 ha di Jakarta Barat, pada 24 RW seluas 625,18 ha di Jakarta Selatan dan pada 13 RW seluas 981,03 ha di Jakarta Timur.

- b. **Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**, dengan prioritas kegiatan antara lain, pembinaan teknis kepada penghuni & pengelola bangunan tinggi, *pilot project* pembangunan Sistem Kebakaran Lingkungan Terhadap Kebakaran (SKLK) Terpadu, dialog interaktif melalui media radio, serta pemeliharaan *breathing apparatus*.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pembinaan teknis kepada penghuni & pengelola bangunan tinggi
- 2) Terbentuknya *pilot project* pembangunan Sistem Kebakaran Lingkungan Terhadap Kebakaran (SKLK) Terpadu
- 3) Terselenggaranya dialog interaktif melalui media radio sebanyak 5 stasion
- 4) Terpeliharanya *breathing apparatus* sebanyak 20 set.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan perumahan Rakyat menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Tersedianya fasilitas rumah susun layak huni sebanyak 1 blok di Pulo Gebang yang dibiayai melalui APBD;
- b. Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat di 5 wilayah kota.

5. **Urusan Penataan Ruang**

Program yang telah dilaksanakan pada urusan penataan ruang antara lain :

- a. **Program Penataan dan Pengawasan Bangunan**, dengan prioritas kegiatan antara lain: Audit Internal di 10 Kecamatan yang telah bersertifikat ISO 9001:2000, penulisan ISO 9001 : 2000 di 10 Kecamatan yang Belum Bersertifikat, Terlaksananya penertiban terhadap pelaku teknis pembangunan yang melanggar ketentuan di Lima Wilayah Kotamadya

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya Audit Internal di 10 Kecamatan yang telah bersertifikat ISO 9001:2000
- 2) Terlaksananya penulisan ISO 9001 : 2000 di 10 Kecamatan yang Belum Bersertifikat
- 3) Terlaksananya penertiban terhadap pelaku teknis pembangunan yang melanggar ketentuan di Lima Wilayah Kotamadya

- b. **Program Penataan Ruang**, dengan prioritas kegiatan antara lain: Penyusunan Panduan Rancang Kota (UDGL) Zona Fatahillah Kawasan Kota Tua, Penyusunan Panduan Rancang Kota (UDGL) Zona Sunda Kelapa Kawasan Kota Tua, sistem integrasi aplikasi administrasi pelayanan dan data spasial, Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Kota di Provinsi DKI Jakarta, Sayembara desain stasiun TOD Dukuh Atas, Pengelolaan dan Pengembangan Website, Revisi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersusunnya Revisi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan
- 2) Tersedianya Rancangan Panduan Rancang Kota (UDGL) untuk Kawasan Kota Tua pada zona Fatahillah
- 3) Tersedianya Rancangan Panduan Rancang Kota (UDGL) untuk Kawasan Kota Tua pada Zona Sunda Kelapa
- 4) Terbangunnya sistem integrasi aplikasi administrasi pelayanan dan data spasial
- 5) Tersusunnya peraturan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Kota di Provinsi DKI Jakarta
- 6) Terselenggaranya sayembara desain stasiun TOD Dukuh Atas
- 7) Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan *website* DTK yang dapat diakses seluruh masyarakat.

- c. **Program Pelayanan Ketatakotaan**, dengan prioritas kegiatan antara lain: Sertifikasi ISO 9001:2000 di 5 Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan,registrasi / keanggotaan ISO,

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersedianya Sertifikasi ISO 9001:2000 di 5 Seksi Dinas Tata Kota Kecamatan
- 2) Tersedianya Registrasi / Keanggotaan ISO

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan penataan ruang menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Terlaksananya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b. Lebih tertibnya penyelenggaraan Penataan Ruang di DKI Jakarta
- c. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan ruang pada kawasan Kotatua

- d. Terwujudnya kualitas pelayanan perizinan penataan ruang dan penataan bangunan di 2 sudin dan 25 kecamatan.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Program yang telah dilaksanakan pada urusan perencanaan pembangunan antara lain :

- a. **Program Pengembangan data/informasi**, dengan prioritas kegiatan antara lain berbagai peraturan perencanaan serta penyusunan panduan perencanaan

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersusunnya Peraturan Gubernur Nomor 175/2008 tentang RKPD 2009
- 2) Pelaksanaan analisis pencapaian SPM Urusan Wajib
- 3) Terselenggaranya Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008
- 4) Tersusunnya Dokumen Usulan Perubahan APBD
- 5) Tersusunnya Laporan Kinerja Pertanggungjawaban
- 6) Tersusunnya Buku Saku Tahun 2008
- 7) Terlaksananya sosialisasi RPJMD Tahun 2007-2012
- 8) Beroperasinya Sistem Informasi Perencanaan APBD.

- b. **Program perencanaan pembangunan daerah**, dengan prioritas kegiatan antara lain penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2009, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Tahun 2008, penyusunan Kebijakan Umum APBD-P (KUA-P) Tahun 2008, serta berbagai kegiatan penelitian.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA tahun 2009 nomor 17 tahun 2008 dan 1231/-1.713 tanggal 28 Oktober 2008
- 2) Tersusunnya Nota Kesepakatan PPA tahun 2009 nomor 18 tahun 2008 dan 1232/-1.713 tanggal 28 Oktober 2008.

- 3) Tersusunnya Nota Keuangan, Pidato Penyampaian RAPBD 2009, Pidato Jawaban Pemandangan Umum Fraksi
- 4) Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA-P tahun 2008 nomor 13 tahun 2008 dan 685/-1.713.6 tanggal 4 Juli 2008.
- 5) Tersusunnya Nota Kesepakatan PPA-P tahun 2008 nomor 14 tahun 2008 dan 686/-1.713.6 tanggal 4 Juli 2008.
- 6) Tersusunnya Nota Keuangan, Pidato Penyampaian APBD-P Tahun 2008, dan Pidato Jawaban Pemandangan Umum Fraksi;
- 7) Terlaksananya Lokakarya Hasil-Hasil Penelitian SKPD Tahun 2007 1 dokumen;
- 8) Penyempurnaan Pergub tentang Mekanisme Penelitian di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta 1 dokumen.

c Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan prioritas kegiatan antara lain koordinasi dan penyusunan dokumen yang berkaitan dengan perencanaan ekonomi.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersusunnya dokumen RKED 2009
- 2) Terinventarisasinya data usulan Renja SKPD di bawah koordinasi Bidang Perekonomian
- 3) Terselenggaranya Rakorbid Bidang Perekonomian.

d Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan prioritas kegiatan antara lain koordinasi perencanaan lingkungan hidup, perencanaan dan analisis tata ruang.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya Rakorbid Bidang SPKLH
- 2) Terinventarisasinya data usulan Renja SKPD di bawah koordinasi Bidang SPKLH

- 3) Terlaksananya analisa rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) 1 Dokumen
- 4) Terlaksananya koordinasi pengaturan dan pembinaan Penataan Ruang DKI Jakarta
- 5) Terlaksananya koordinasi Kebijakan Proyek Tahun Jamak
- 6) Terselenggaranya koordinasi pengembangan kebijakan RTH Publik DKI Jakarta
- 7) Terlaksananya dukungan persiapan proyek pengerukan sungai (JEDI/JUFMP).

e Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan prioritas kegiatan antara lain koordinasi perencanaan pendidikan dan penyusunan program strategis.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terinventarisasinya Data Usulan Renja SKPD di bawah koordinasi Bidang Kesmas
- 2) Terlaksananya Rakorbid Bidang Kesmas
- 3) Terinventarisasinya perencanaan program Penanggulangan Kemiskinan
- 4) Terinventarisasinya perencanaan program Dekon dan TP Bidang Kesmas
- 5) Tersusunnya program strategis bidang Kesmas

f Program Perencanaan Tata Praja dan Aparatur, dengan prioritas kegiatan antara lain koordinasi perencanaan penyelenggaraan pemerintah wilayah dan penyusunan panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terinventarisasinya data usulan Renja SKPD di bawah koordinasi Bidang Tapratur

- 2) Terlaksananya Rakorbid Bidang Tapratu
- 3) Terkoordinasinya perencanaan pengelolaan peraturan dan penegakan hukum 56 kegiatan,
- 4) Terkoordinasinya perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah
- 5) Terkoordinasinya perencanaan pembangunan transparansi kebijakan Daerah
- 6) Terkoordinasinya perencanaan peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan perencanaan pembangunan menghasilkan outcome antara lain : persentase kinerja program pembangunan yang dapat dilaksanakan rata-rata lebih besar dari 80%.

7. Urusan Perhubungan

Program yang telah dilaksanakan pada urusan perhubungan antara lain :

- a. **Program Pengembangan Sarana dan Fasilitas Pos dan Telekomunikasi**, dengan prioritas kegiatan antara lain pengadaan unit *mobile direction finding operation* spesifik pelacak.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain : tersedianya 1 unit *mobile direction finding operation* spesifik pelacak.

- b. **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**, dengan prioritas kegiatan antara lain kegiatan lanjutan pembangunan pelabuhan Muara Angke serta sarana prasarana penertiban.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya lanjutan pembangunan Pelabuhan Muara Angke

- 2) Terlaksananya operasional penertiban atas pelanggaran lalu lintas.

c Program Penetapan Kerangka Pembiayaan Kelembagaan dan Regulasi Perhubungan dengan prioritas kegiatan antara lain penyusunan Raperda Perhubungan dan pemantauan harga komponen tarif angkutan umum :

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersusunnya revisi perubahan Raperda Perhubungan
- 2) Terlaksananya penetapan tarif angkutan umum (bus kota kelas ekonomi dan non ekonomi) untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penetapan tarif sesuai *Willingness To Pay* (WTP) masyarakat pengguna jasa angkutan umum.

d Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan prioritas kegiatan antara lain penyempurnaan terowongan kota dan pembangunan koridor 8,9 dan 10 busway.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya lanjutan pembangunan Terowongan Penyeberangan Orang/TPO Kota;
- 2) Terlaksananya pembangunan koridor busway 8,9 dan 10 sepanjang 74,9 km.

e Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan prioritas kegiatan antara lain pengadaan kendaraan operasional khusus roda 2 dan 4 untuk pemantauan trayek angkutan umum.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain : terlaksananya pengadaan kendaraan operasional khusus roda 2 sebanyak 3 unit dan 4 sebanyak 4 unit.

f Program Peningkatan Mutu dan Cakupan Layanan UPT dengan prioritas kegiatan antara lain operasional bus sekolah.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain : beroperasinya 37 unit angkutan bus sekolah dengan kapasitas 925 penumpang.

Selanjutnya untuk Urusan Perhubungan dapat menghasilkan *outcome*, antara lain :

- a. Meningkatnya kapasitas dan jaringan layanan angkutan massal Busway dari 7 koridor dengan panjang jalan 97,35 Km pada tahun 2007 menjadi 10 koridor dengan panjang jalan 172,25 km pada tahun 2008;
- b. Meningkatnya fasilitas dan kapasitas Pelabuhan Muara Angke rata-rata 25%;
- c. Meningkatnya aksesibilitas sebesar 30% dan kenyamanan pengguna jalan sebesar 100%;
- d. Meningkatnya sarana penunjang keselamatan pelayaran Kapal Angkutan Masyarakat sebesar 100%;
- e. Meningkatnya sarana pelayanan angkutan pelajar sebesar 100 % dengan jumlah pelajar yang terangkut sebanyak 600 pelajar/hari;
- f. Meningkatnya kecepatan deteksi sumber gangguan frekwensi radio sebesar 100%;
- g. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas dari 19.690 kasus pada tahun 2007 menjadi 30.816 kasus pada tahun 2008 atau naik 56,5%;
- h. Meningkatnya kualitas pelayanan melalui penetapan tarif angkutan umum sesuai *Willingness To Pay* (WTP) masyarakat pengguna jasa angkutan umum;
- i. Meningkatnya intensitas koordinasi untuk perumusan masukan kebijakan dan program sebesar 30%;
- j. Meningkatnya jumlah Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) yang disertifikasi sebesar 25%;
- k. Meningkatnya pengetahuan tertib berlalulintas bagi 4000 pelajar pada tahun 2008 dibanding 3250 pelajar pada tahun 2007, naik 23%.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Program yang telah dilaksanakan pada urusan Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Lingkungan Hidup**, dengan prioritas kegiatan antara lain: evaluasi dan penyusunan rencana kerja/program 5 tahun pemantauan kualitas air, penyusunan draft perubahan keputusan gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor.189 Tahun 2002, penyusunan draft perubahan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor. 2863 Tahun 2001.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kerja/Program 5 Tahun Pemantauan Kualitas Air sebanyak 1 dokumen;
- 2) Tersusunnya draft perubahan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.189 Tahun 2002 sebanyak 1 dokumen;
- 3) Tersusunnya draft perubahan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2863 Tahun 2001 sebanyak 1 dokumen.

- b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**, dengan prioritas kegiatan antara lain: koordinasi dan pembinaan pengelolaan limbah padat (sampah), panduan dan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu lintas sektor dan masyarakat berbasis manajemen sumberdaya di Pesisir Pantura dan muara sungai, evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Beroperasinya 841 unit kendaraan angkutan sampah
- 2) Berkurangnya volume sampah melalui Program 3R sebanyak 329.73 ton/hari

- 3) Terlaksananya swastanisasi kebersihan 156 kendaraan dan 5.729,10 M3/hari atau 1,273,13 Ton/hari
- 4) Tertanggulangnya sampah sebanyak 6.174.27 ton
- 5) Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pengelolaan limbah padat (sampah) sebanyak 79 kegiatan
- 6) Terlaksananya penyusunan panduan dan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu lintas sektor dan masyarakat berbasis manajemen sumberdaya di pesisir pantura dan muara sungai sebanyak 1 dokumen;
- 7) Terlaksananya evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan TPA Bantar Gebang.

c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dengan prioritas kegiatan antara lain: pelaksanaan uji petik emisi kendaraan bermotor, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan kualitas perairan dan Muara Teluk Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Meningkatnya kapasitas IPAL di 11 lokasi kantor pemerintah dan dinas teknis
- 2) Berkurangnya pencemaran di 3 waduk
- 3) Terlaksananya uji petik emisi kendaraan bermotor sebanyak 35 kali
- 4) Terpantaunya kualitas air sungai sebanyak 67 titik
- 5) Terpantaunya kualitas perairan dan muara teluk Jakarta sebanyak 82 titik

d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan prioritas kegiatan antara lain: Pelaksanaan P3LE (Pengamatan, Pemantauan, dan Pengendalian Lingkungan dan Evaluasi) dalam rangka PBLL (Pantai Bersih Laut Lestari)

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya P3LE (Pengamatan, Pemantauan, dan Pengendalian Lingkungan dan Evaluasi) dalam rangka PBLL (Pantai Bersih Laut Lestari)
- 2) Terlaksananya pemantauan pada 23 titik di perairan teluk Jakarta yang berjarak 5-20 dari bibir pantai

e Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan prioritas kegiatan antara lain: Penilaian Amdal, Operasionalisasi Sarana Apung, Kajian Lingkungan Strategis (KLS) Pantura

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya Penilaian Amdal sebanyak 300 dokumen
- 2) Terlaksananya Operasionalisasi Sarana Apung
- 3) Terlaksananya Kajian Lingkungan Strategis (KLS) Pantura

f Program Pengendalian Kebersihan Kota, dengan prioritas kegiatan antara lain : operasional pemungutan retribusi, pembinaan administrasi tentang retribusi kebersihan, Evaluasi penerimaan retribusi.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya operasional pemungutan retribusi sebanyak 12 kegiatan
- 2) Terangkutnya sekitar 5.000 ton/hari sampah ke TPA Bantargebang
- 3) Berfungsinya 46 unit truk *compactor* besar, 16 unit truk *compactor* kecil dan 20 unit TPS *indoor waste compacting station vehicle*.
- 4) Terlaksananya pembersihan jalan protokol, jalan utama dan fasilitas umum
- 5) Berfungsinya 2 IPAL yaitu Duri Kosambi dan Pulogebang.

6) Terlaksananya evaluasi penerimaan retribusi.

- h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, dengan prioritas kegiatan antara lain: pemeliharaan prasarana / sarana Jalur Hijau Jalan (JHJ) Blok I, jalur jl. MT.Haryono (Ciliwung s/d Pancoran), Pulau jalur sekitar *fly over* (FO) Pancoran, Pulau jalan sekitar FO. Tegal Parang, jalur jl.Gatot Subroto (Pancoran s/d Kuningan), jalur jl.HR.Rasuna Said, jalur jalan HR. Rasuna Said (lanjutan), jalur jl. Besakih, pemeliharaan prasarana/sarana JHJ Blok VII (Jalur Taman Semanggi), Penataan Taman Ayodia Jakarta Selatan, pembebasan tanah RTH Jl. Manunggal II RT.011/06 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur, pemagaran Taman BMW Jakarta Utara.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pemeliharaan prasarana/ sarana JHJ Blok I jalur jalan MT.Haryono (Ciliwung s/d Pancoran), Pulau jalan sekitar FO.Pancoran, Pulau Jl.Sekitar FO. Tegal Parang, jalur Jl.Gatot Subroto (Pancoran s/d Kuningan), jalur Jl. HR.Rasuna Said, jalur jalan HR. Rasuna Said(lanjutan), jalur Jl. Besakih.
- 2) Terlaksananya pemeliharaan prasarana / sarana JHJ Blok VII (Jalur Taman Semanggi) seluas 103.388 m²
- 3) Terlaksananya penataan Taman Ayodia, Jakarta Selatan
- 4) Terlaksananya Pembebasan Tanah RTH Jl. Manunggal II RT.011/06 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur seluas 645 m²
- 5) Terlaksananya pemagaran Taman BMW, Jakarta Utara sepanjang 7.000 m'

- i. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup**, dengan prioritas kegiatan antara lain: penyusunan bosur, leaflet, booklet, stiker, poster, dan kliping (harian berita lingkungan), pameran pembangunan

berkelanjutan, kampanye pengelolaan air limbah domestik (Pergub Nomor 122 Tahun 2005).

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersusunnya bosur, leaflet, booklet, stiker, poster, dan klipring (harian berita lingkungan) sebanyak 25.000 eksemplar
- 2) Terlaksananya pameran pembangunan berkelanjutan selama 4 hari
- 3) Terlaksananya kampanye pengelolaan air limbah domestik (Pergub No. 122 tahun 2005).

j. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan prioritas kegiatan antara lain: pengadaan pewadahan dan palet kayu, *pilot project* pemilahan limbah B3 dari sampah domestik, operasional *incinerator* PLB3.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersedianya pewadahan dan palet kayu sebanyak 200 *pieces*;
- 2) Terlaksananya *pilot project* pemilahan limbah B3 dari sampah domestik;
- 3) Terlaksananya operasional *incinerator* PLB3.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan lingkungan hidup menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH;
- b. Diperolehnya penghargaan Adipura di 5 wilayah kota.

9. Urusan Pertanahan

Program yang telah dilaksanakan pada urusan pertanahan antara lain :

- a. **Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pertanahan**, dengan prioritas kegiatan antara lain : penyusunan kerangka pelimpahan kewenangan antara

peran regulator dan operator dalam urusan pertanahan, penyusunan Raperda tentang urusan pertanahan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersusunnya kerangka pelimpahan kewenangan antara peran regulator dan operator dalam urusan pertanahan
- 2) Tersusunnya rekomendasi draft Raperda tentang urusan pertanahan.

b. Program Kerjasama Penyelenggaraan Urusan Pertanahan, dengan prioritas kegiatan antara lain fasilitasi dan koordinasi antar instansi terkait (pusat dan daerah) dalam rangka percepatan reformasi di bidang pertanahan, penyusunan dokumen perjanjian kerjasama Gubernur dengan Kepala BPN tentang penyelenggaraan urusan wajib pertanahan di Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi antar instansi terkait (pusat dan daerah) dalam rangka percepatan reformasi dibidang pertanahan.
- 2) Tersusunnya draft dokumen perjanjian kerjasama Gubernur dengan Kepala BPN tentang penyelenggaraan urusan wajib pertanahan di Provinsi DKI Jakarta.

c. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan prioritas kegiatan antara lain, pendataan dan Pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan di Provinsi DKI Jakarta, Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Usaha Pertanahan, Penyusunan sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan berdasarkan PP 38 tahun 2007.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pendataan dan Pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan di Provinsi DKI Jakarta.

- 2) Tersusunnya draft Peraturan Gubernur tentang Tata Usaha Pertanahan
- 3) Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan berdasarkan PP 38 tahun 2007

d. Program Pensertifikatan Tanah Masyarakat, dengan prioritas kegiatan antara lain, Penyusunan standar Operasional Prosedur Perencanaan Pelaksanaan Pensertifikatan Masal di Wilayah DKI Jakarta

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

Tersusunnya draft Keputusan Gubernur tentang Standard Operasional Prosedur Perencanaan Pelaksanaan Pensertifikatan Masal di Wilayah DKI Jakarta.

e. Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), dengan prioritas kegiatan antara lain, koordinasi, pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, otomatisasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta Integrasi Data P4T Hasil Kegiatan 2003-2004.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya koordinasi pendataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- 2) Terlaksananya otomatisasi data Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

f. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, dengan prioritas kegiatan antara lain, updating otomasi data digital dalam peta garis di DKI Jakarta, penyusunan rancang bangun sistem informasi pertanahan dan pemetaan yang online di SKPD tingkat Provinsi, aplikasi GIS untuk monitoring rawan bencana banjir.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya *up dating* otomasi data digital dalam peta garis di DKI Jakarta
- 2) Tersedianya aplikasi GIS untuk monitoring rawan bencana banjir.

g. Program Penyusunan Peta Tematik Sebagai Pendukung Program Lintas Sektor, dengan prioritas kegiatan antara lain, penyusunan peta sebaran lokasi Tempat pembuangan Sampah (TPS dan TPA), peta sebaran cagar budaya Betawi, peta sebaran banjir 5 tahunan, peta sebaran penduduk miskin, pengukuran DAS Ciliwung dalam rangka pengendalian banjir, pengukuran *as built drawing utilitas* atas dan bawah pada Kawasan Pemukiman Marunda, pengukuran *bathimetri* pantai Utara Jakarta

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya peta sebaran lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS dan TPA), peta sebaran cagar budaya Betawi, peta sebaran banjir 5 tahunan, peta sebaran penduduk miskin;
- 2) Terlaksananya pengukuran DAS Ciliwung dalam rangka pengendalian banjir;
- 3) Terlaksananya pengukuran *as built drawing utilitas* atas dan bawah pada Kawasan Permukiman Marunda;
- 4) Terlaksananya pengukuran *bathimetri* pantai utara Jakarta.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan pertanahan menghasilkan *outcome* antara lain :meningkatnya kepemilikan sertifikat tanah masyarakat miskin melalui PRONA sebanyak 6.475 sertifikat.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pada urusan kependudukan dan catatan sipil telah dilaksanakan antara lain :

- a. **Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk dan Penduduk Gelap (Penduduk Rentan Adminduk)**, dengan prioritas kegiatan antara lain, operasi penertiban dokumen orang asing, penyusunan dan penandatanganan MOU kerjasama pengawasan dan pengendalian penduduk terpadu pada wilayah Bodetabekjur, Kampanye Kependudukan pada 44 kecamatan dan 267 kelurahan, Sosialisasi Peraturan Kependudukan pada RT dan RW di Provinsi DKI Jakarta, sosialisasi administrasi kependudukan kepada Pengelola tempat hiburan, pelayanan administrasi kependudukan terpadu (Paket) Bodetabekjur, koordinasi antar instansi terkait yang menangani masalah kependudukan melalui wadah tim SIPORA, koordinasi antar instansi terkait yang menangani masalah urbanisasi kependudukan melalui wadah Tim KOPUR, koordinasi dan kerjasama antar daerah melalui Forum Wadah Mitra Praja Utama (MPU), koordinasi penanganan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta monitoring dan evaluasi OYK.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya operasi penertiban dokumen orang asing, pada 62 perusahaan
- 2) Terlaksananya kerjasama pengawasan dan pengendalian penduduk terpadu pada wilayah Bodetabekjur sesuai MoU kerjasama wilayah Bodetabekjur nomor 4 tahun 2006
- 3) Terlaksananya kampanye kependudukan pada 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
- 4) Terlaksananya sosialisasi peraturan kependudukan pada RT dan RW di Provinsi DKI Jakarta
- 5) Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan kepada 50 pengelola tempat hiburan

- 6) Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan Terpadu (Paket) Bodetabekjur
- 7) Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait yang menangani masalah kependudukan melalui wadah tim SIPORA
- 8) Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait yang menangani masalah urbanisasi kependudukan melalui wadah Tim KOPUR
- 9) Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antar daerah melalui forum wadah Mitra Praja Utama (MPU)
- 10) Terlaksananya koordinasi penanganan penduduk rentan administrasi kependudukan
- 11) Terlaksananya monitoring dan evaluasi OYK

b. **Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Dukcapil**, dengan prioritas kegiatan antara lain, penyusunan draft Revisi Perda 3 Tahun 2001, penyusunan draft Revisi Keputusan Gubernur No. 135 Tahun 2001, penyusunan draft Revisi Pergub No. 16 Tahun 2005, kajian akademis dan seminar Raperda Perubahan Perda No.4/2004, serta penelitian tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dukcapil lima wilayah kodya dan sertifikasi.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya penyusunan draft Revisi Perda 3 Tahun 2001
- 2) Terlaksananya penyusunan draft Revisi Keputusan Gubernur No. 135 Tahun 2001
- 3) Terlaksananya penyusunan draft Revisi Pergub No. 16 Tahun 2005
- 4) Terlaksananya kajian akademis dan seminar Raperda Perubahan Perda No.4/2004.
- 5) Terlaksananya penelitian tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dukcapil lima wilayah kodya dan sertifikasi

- c. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Dukcapil**, dengan prioritas kegiatan antara lain, lokakarya peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil, sosialisasi peraturan kependudukan dan catatan sipil bagi aparat dinas, suku dinas, kecamatan dan kelurahan, pemeliharaan operasionalisasi aplikasi sidik jari, pengembangan *website* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pendataan penduduk untuk perbaikan database.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya lokakarya peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil, sebanyak 100 orang
- 2) Terlaksananya sosialisasi peraturan kependudukan dan catatan sipil bagi aparat dinas, suku dinas, kecamatan dan kelurahan, sebanyak 350 orang
- 3) Terlaksananya pemeliharaan operasionalisasi 1 aplikasi sidik jari
- 4) Terlaksananya pengembangan *website* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 5) Terlaksananya pendataan penduduk untuk perbaikan database.

- d. **Program Penataan Administrasi Dukcapil**, dengan prioritas kegiatan antara lain, pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil tingkat dinas, Suku Dinas dan Kecamatan penyediaan alat tulis kantor, peningkatan akurasi data mobilitas pendatang wna tahun 2008, koordinasi dan monitoring Arus Mudik/Balik Idul Fitri 1429 H di Provinsi DKI Jakarta, penelitian kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, koordinasi dan monitoring pencatatan perkawinan luar balai, serta penataan dan pengelolaan arsip register akta catatan sipil, serta backup data arsip register akta catatan sipil.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pembinaan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tingkat Dinas, Suku Dinas dan Kecamatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 2) Terlaksananya peningkatan akurasi data mobilitas pendatang WNA Tahun 2008, sebanyak 50.311 orang.
- 3) Terlaksananya koordinasi dan monitoring arus mudik/balik Idul Fitri 1429 H di Provinsi DKI Jakarta, berupa arus mudik sejumlah 2.828.508 jiwa dan arus balik sejumlah 2.919.981 jiwa.
- 4) Terlaksananya penelitian kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebanyak 76% dokumen dukcapil.
- 5) Terlaksananya koordinasi dan monitoring Pencatatan Perkawinan Luar Balai, sebanyak 6000 pasang
- 6) Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip register akta catatan sipil, sebanyak 3.482 buku akta register

- e. **Program Pengintegrasian SIAK**, dengan prioritas kegiatan antara lain, Pengadaan perangkat keras dan lunak komputer tahun anggaran 2008, konversi database SIMDUK berbasis SIAK, pembangunan aplikasi EIS berbasis SIAK, koordinasi dan monitoring pendataan formulir F1.01 (SIAK), pengelolaan website dukcapil, pengolahan data kependudukan dalam rangka penyusunan buku informasi pada disdukcapil, Adjustment Komponen SIMDUK di dalam SIAK, Diklat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), pemeliharaan operasionalisasi aplikasi kependudukan dan catatan sipil, pemeliharaan pusat *back up data recovery*, pengadaan Formulir F1.01 (SIAK) Dinas Dukcapil.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pengadaan perangkat keras dan lunak komputer tahun anggaran 2008, sebanyak 10 unit komputer dan 6 software
- 2) Terlaksananya konversi database SIMDUK berbasis SIAK
- 3) Terlaksananya pembangunan aplikasi EIS berbasis SIAK
- 4) Terlaksananya koordinasi dan monitoring pendataan formulir F1.01 (SIAK)
- 5) Terlaksananya pengelolaan website dukcapil,
- 6) Terlaksananya pengolahan data kependudukan dalam rangka penyusunan buku informasi pada disdukcapil, sebanyak 100 buku
- 7) Terlaksananya adjustment komponen SIMDUK di dalam SIAK
- 8) Terlaksananya diklat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 50 orang
- 9) Terlaksananya Pemeliharaan Operasionalisasi Aplikasi Kependudukan dan Catatan Sipil,
- 10) Terlaksananya pemeliharaan pusat *back up data recovery*
- 11) Terlaksananya Pengadaan Formulir F1.01 (SIAK) Dinas Dukcapil.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan kependudukan dan catatan sipil menghasilkan outcome antara lain :

- a. Tercapainya 50% integrasi data SIMDUK ke SIAK
- b. Jumlah KTP ganda yang dicabut sebesar 100%
- c. Tercapainya 95,73% kepemilikan KTP
- d. Tercapainya 80% kepemilikan KTP computer.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang telah dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain :

- a. **Program Penguatan Kelembagaan Pengurusan Taman Gender dan Anak**, dengan prioritas kegiatan antara lain

berbagai lomba, sosialisasi serta serta pengarusutamaan gender.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terwujudnya kegiatan pemerintah yang responsif gender.
- 2) Terlaksananya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat Komunitas semakin meningkat.
- 3) Terlaksananya pertemuan bagi pengelola program Pemberdayaan Perempuan sebanyak 120 Instansi
- 4) Terselenggaranya Lomba GSI tingkat Provinsi
- 5) Terselenggaranya Lomba P2WKSS tingkat Provinsi DKI Jakarta
- 6) Terselenggaranya pelatihan Pengaruh Utama Gender bagi 267 Aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 7) Terselenggaranya monitoring dalam program pemberdayaan perempuan.
- 8) Terselenggaranya sosialisasi bagi pengurus ormas, tikmas, Islam dan dewan mesjid sebanyak 2 kali.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menghasilkan outcome antara lain :

- a. Berkembangnya jumlah organisasi perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari 20 (2007) menjadi 24 organisasi aktif (2008);
- b. Berkembangnya kelompok ekonomi perempuan yang produktif dan mandiri 520 (2007) menjadi 620 kelompok (2008).

12. Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Program yang telah dilaksanakan pada urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain :

- a. **Program Keluarga Berencana (KB) Mandiri**, dengan prioritas kegiatan antara lain pemantauan komitmen pelayanan KB dan sosialisasi KB.

Realisasi kegiatan Tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pemantapan komitmen pelayanan KB Mandiri bagi 305 petugas KB
- 2) Terlaksananya operasional petugas penghubung dokter dan Bidan praktek swasta di 5 Wilayah administrasi sebanyak sebanyak 1208 orang.
- 3) Meningkatnya pengetahuan dan sikap perilaku terhadap keluarga berencana melalui pemantapan KIE.

- b. **Program Keluarga Berencana (KB)**, dengan prioritas kegiatan antara lain pembentukan paguyuban KB pria dan konsultasi teknis medis pengelola KB.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya operasional kelompok paguyuban KB pria tingkat kelurahan di 5 wilayah administrasi sebanyak 192 kelompok.
- 2) Terlaksananya temu konsultasi teknis medis dan pengelola pelayanan KB bagi 5 Walikota Administrasi dan 250 orang.
- 3) Bertambahnya peningkatan peserta KB Aktif dan KB Mandiri.

- c. **Program Pelayanan Kontrasepsi**, dengan prioritas kegiatan antara lain pelayanan KB melalui mobil keliling dan pelayanan KB mantap pria.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta KB baru
- 2) Terlaksananya pelayanan KB melalui mobil unit pelayanan KB keliling di 50 Lokasi

- 3) Terlaksananya distribusi alat kontersepsi (alkon) dan non alkon di 5 wilayah Kota Administrasi.
- 4) Tersedianya stok opname alat kontrasepsi dan non kontrasepsi bkkbd di 5 wilayah Kota Administrasi.
- 5) Terlaksananya operasional pelayanan kontrasepsi mantap pria di 6 wilayah Kota Administrasi bagi 907 orang.
- 6) Terlaksananya operasional pelayanan kontrasepsi mantap wanita di 5 wilayah Kota Administrasi bagi 1071 orang.
- 7) Terlaksananya operasional pelayanan KB Implan tingkat Kecamatan di 6 wilayah Kota Administrasi bagi 3138 orang.
- 8) Terlaksananya operasional pelayanan pencabutan KB Implan di 6 wilayah Kota Administrasi bagi 3589 orang.
- 9) Terlaksananya operasional pelayanan KB IUD tk.Kelurahan di 5 wilayah Kota Administrasi bagi 5048 orang.

- d. **Program penetapan kerangka pembiayaan/kelembagaan dan regulasi pelayanan KB/KS**, dengan prioritas kegiatan antara lain pertemuan jaringan informasi program KB dan penyediaan website.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terselenggaranya pengaturan pembiayaan urusan pelayanan Keluarga Berencana.
- 2) Tersusunnya kerangkakelembagaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 3) Terlaksananya pertemuan jaringan informasi program Keluarga Berencana di 6 Wilayah administrasi bagi sekitar 310 orang.
- 4) Tersedianya Website BKKBD.

- e. **Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu-PAUD**, dengan prioritas kegiatan antara lain pengoperasian BKB-PAUD-BKKB dan pelaksanaan Rakor pelayanan KB.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terintegrasinya pelayanan Terpadu antara BKB dan Posyandu.
- 2) Beroperasinya BKB-Posyandu-PAUD BKKB di 5 wilayah Kota Administrasi bagi 56 kelompok.
- 3) Terlaksananya monitoring pelayanan KB di Posyandu BKKBD di 6 wilayah Kota Administrasi di 720 Posyandu.
- 4) Terlaksananya 11 kali Rakor pelayanan KB di 5 Wilayah Kota Administrasi.

f. **Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan Konseling KKR** dengan prioritas kegiatan antara lain pelayanan KIE PIK KRR.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Beroperasinya pelayanan KIE PIK KRR di 6 Wilayah Kota Administrasi sebanyak 152 PIK KRR.
- 2) Beroperasinya pelayanan KIE PIK KRR jalur sekolah di 6 Wilayah Kota Administrasi sebanyak 152 PIK KRR.

g. **Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja,** dengan prioritas kegiatan antara lain gebyar kreatifitas kesehatan reproduksi remaja dan pertemuan saka kencana.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Meningkatnya pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga dan remaja terhadap keluarga berencana dan reproduksi remaja.
- 2) Terlaksananya Gebyar Kreatifitas Kesehatan Reproduksi remaja bagi 600 orang remaja.

- 3) Terlaksananya pertemuan pimpinan saka kencana di 5 wilayah Kota Administrasi bagi 300 orang pimpinan saka kencana.
- 4) Terlaksananya dialog interaktif di 2 radio swasta
- 5) Terlaksananya advokasi dan KIE KRR bagi Taga dan Toma di 6 wilayah kota administrasi dan diikuti sebanyak 900 orang.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menghasilkan outcome antara lain :

- a. Meningkatnya kelangsungan pemakaian alat dan obat kontrasepsi pasangan usia subur dari 60% (2007) menjadi 61% (2008)
- b. Mempertahankan total *fertility rate* (TFR) sebesar 2,1% (Data *Survey Demografi* dan Kesehatan Indonesia tahun 2007)
- c. Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (pil, suntik, kondom) dari 581.352 peserta pada tahun 2007 menjadi 646.373 peserta pada tahun 2008
- d. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, MOW, MOP, Implan) dari 301.081 peserta pada tahun 2007 menjadi 335.848 peserta pada tahun 2008.

13. Urusan Sosial

Program yang telah dilaksanakan pada urusan sosial antara lain :

- a. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**, dengan prioritas dengan prioritas kegiatan antara lain, Santunan Sosial penyandang cacat, Pelayanan Sosial orang terlantar dan korban tindak kekerasan, Penyaluran sosial PMKS jalanan hasil penertiban ke daerah asalnya, Perlindungan sosial kepada Lansia, Pembuatan filler tentang keagamaan dan kesejahteraan sosial, dan pembuatan dan penayangan sinetron tentang Bintal dan Kesos

Realisasi Kegiatan Tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya kegiatan pemberian santunan sosial bagi penyandang cacat 60 orang,
- 2) Terselenggaranya pelayanan sosial orang terlantar dan korban tindak kekerasan 5.100 orang
- 3) Terlaksananya penyaluran sosial PMKS jalanan hasil penertiban ke Daerah asalnya 600 orang
- 4) Terlaksananya perlindungan sosial kepada Lanjut Usia (Lansia) sebanyak 150 orang;
- 5) Terlaksananya pembuatan filler tentang keagamaan dan kesejahteraan sosial pada Tahun 2008;
- 6) Terlaksananya pembuatan dan penayangan sinetron tentang Bintal dan Kesos pada Tahun 2008.

- b. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**, dengan prioritas kegiatan antara lain, Pelayanan teknis pembangunan tempat ibadah Tingkat Provinsi, Sosialisasi peraturan tentang pembangunan tempat ibadah, Perlindungan Sosial kepada keluarga miskin Tk. Provinsi, Penguatan kemandirian keluarga bermasalah, Pembinaan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan Orsos, Kesiapsiagaan bencana, dan Pelayanan Sosial Penanggulangan Korban Bencana, dan Silaturahmi Gubernur dengan para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan para pejuang lainnya, dan Pemenuhan kebutuhan dasar PSAA/NPSAA.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya kegiatan pelayanan teknis pembangunan tempat ibadah di Tingkat Provinsi di DKI Jakarta;
- 2) Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang pembangunan tempat ibadah 100 orang;
- 3) Terlaksananya perlindungan sosial kepada keluarga miskin tingkat provinsi 100 KK;
- 4) Terlaksananya penguatan kemandirian keluarga bermasalah sebanyak 300 orang;

- 5) Terlaksananya pembinaan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan Orsos dalam peningkatan pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) sebanyak 50 orang;
- 6) Tersusun dan tersedianya pedoman pelayanan anak terlantar di Provinsi DKI Jakarta;
- 7) Tersusun dan tersedianya rencana induk/peta penyebaran tempat ibadah;
- 8) Terlaksananya kegiatan silaturahmi tatap muka Gubernur dengan para perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan dan pejuang lainnya;
- 9) Terlaksananya penguatan kinerja tenaga pendamping penyelenggara pelayanan Kesos anak, remaja, keluarga dan lansia, sebanyak 4 kali/kegiatan;
- 10) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana pada tahun 2008;
- 11) Terlaksananya peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNS) TK. Nasional;
- 12) Terlaksananya silaturahmi kunjungan Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya;
- 13) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)/Non Panti Sosial Asuhan Anak (NPSAA), 1821 orang;
- 14) Terlaksananya operasional Pokja Kesuma dalam rangka pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) kepada masyarakat 267 Kelurahan.

- c. **Program Pembinaan Anak Terlantar**, dengan prioritas kegiatan antara lain : penguatan kemandirian bagi anak jalanan, terlantar dan remaja bermasalah, penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) TK Provinsi, dan perlindungan sosial kepada anak terlantar dan anak jalanan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya penguatan kemandirian bagi anak jalanan, terlantar dan remaja bermasalah, 300 orang;
- 2) Terlaksananya penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) TK Provinsi, 1000 orang;
- 3) Terlaksananya perlindungan sosial kepada anak terlantar dan anak jalanan 2130 orang.

- d. **Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial**, dengan prioritas kegiatan antara lain : Pembinaan kader penanganan eks narkoba, dan pembinaan penguatan kemandirian sosial (praktek belajar kerja bekas hukuman)

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terselenggaranya pembinaan kader penanganan eks Narkoba 50 orang;
- 2) Terselenggaranya pembinaan penguatan kemandirian sosial (praktek belajar kerja bekas hukuman) 50 orang.

- e. **Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**, dengan prioritas kegiatan antara lain : pembinaan dan perawatan WBS anak cacat ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang, pembinaan dan perawatan WBS Psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung, Koordinasi dan penyaluran bantuan bagi bagi Penderita mental psikotik asal provinsi DKI Jakarta di Yayasan Nurussalam Semarang, Apresiasi kompetisi penyandang cacat TK. Provinsi.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya kegiatan pembinaan dan perawatan Warga Binaan Sosial (WBS) anak cacat ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang 50 orang;
- 2) Terlaksananya kegiatan pembinaan dan perawatan WBS Psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung 25 orang;

- 3) Terlaksananya koordinasi dan penyaluran bantuan bagi bagi Penca mental psikotik asal provinsi DKI Jakarta di Yayasan Nurussalam Semarang 1 kali/kegiatan;
- 4) Terlaksananya kegiatan apresiasi kompetisi penyandang cacat TK. Provinsi 1 kali/kegiatan.

f. **Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Sosial**, dengan Prioritas kegiatan antara lain : sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang cacat, Evaluasi pelayanan panti sosial anak dan lansia, dan penyusunan klasifikasi pelayanan sosial.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang cacat;
- 2) Terselenggaranya evaluasi pelayanan panti sosial anak dan lansia;
- 3) Tersusun dan tersedianya klasifikasi pelayanan sosial.

g. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan prioritas kegiatan antara lain : rehab gedung lama Dinas Bintel dan Kesos; Rehab PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung; Rehab PSBN Cahaya Bathin Cawang; Rehab berat PSBG Belaian Kasih Pegadungan; Rehab berat PSBL Harapan sentosa 1 Cengkareng; rehab berat PSAA putra Utama 1 Klender; dan Pemutakhiran data identifikasi PMKS, Potensial sosial dan mental spiritual

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya rehab gedung lama Dinas Bintel dan Kesos;
- 2) Terlaksananya Rehab PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung;
- 3) Terlaksananya rehab PSTW Budi Mulya 3 Ciracas;
- 4) Terlaksananya Rehab PSBN Cahaya Bathin Cawang;
- 5) Terlaksananya rehab berat PSBG Belaian Kasih Pegadungan;

- 6) Terlaksananya Rehab berat PSBL Harapan sentosa 1 Cengkareng;
- 7) Terlaksananya rehab berat PSAA putra Utama 1 Klender;
- 8) Terlaksana dan tersedianya pemutakhiran data identifikasi PMKS, Potensial sosial dan mental spiritual

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan sosial menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang dapat beraktivitas dengan lancar dari 85 orang (2007) menjadi 105 orang (2008);
- b. Meningkatnya jumlah tenaga pendamping penyelenggara pelayanan Kesos anak, remaja, keluarga dan lansia terlantar yang terampil melayani PMKS dari 50 orang (2007) menjadi 75 orang (2008);
- c. Meningkatnya jumlah anak terlantar yang dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya dari 1.750 orang (2007) menjadi 1.821 orang (2008);
- d. Meningkatnya jumlah anak terlantar dan jalanan yang dapat ditampung di Panti Sosial dari 1.200 orang (2007) menjadi 2.130 orang (2008);
- e. Meningkatnya kapasitas panti dari 4.155 orang (2007) menjadi 4.332 orang (2008).

14. Urusan Tenaga Kerja

Program yang telah dilaksanakan pada urusan tenaga kerja antara lain :

- a. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan kegiatan antara lain Pelatihan Las Plat 3G-4G GTAW dan Plat 3G-4G + CO2, pelatihan pemberangkatan tahap 1 bagi peserta program pemagangan IMM Jepang, pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terselenggaranya pelatihan las Plat 3G-4G GTAW sebanyak 32 orang
- 2) Terselenggaranya pelatihan las Plat 3G-4G + CO2 sebanyak 32 orang
- 3) Terlaksananya Pelatihan pemberangkatan tahap 1 bagi peserta program pemagangan IMM Jepang sebanyak 360 orang
- 4) Terlaksananya Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebanyak 600 orang.

- b. **Program Peningkatan Kesempatan Kerja**, dengan kegiatan antara lain pembentukan tenaga kerja mandiri melalui TTG, pengisian lowongan kerja di perusahaan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya pembentukan tenaga kerja mandiri melalui TTG sebanyak 200 orang
- 2) Terlaksananya pengisian lowongan kerja di perusahaan sebanyak 600 orang.

- c. **Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**, dengan kegiatan antara lain penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial; pembinaan hubungan industrial.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 300 kasus;
- 2) Terlaksananya pembinaan hubungan industrial sebanyak 300 orang.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Urusan Tenaga Kerja menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp. 900.560,- pada tahun 2007 menjadi Rp 972.604,- pada tahun 2008 atau naik 8%.
- b. Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada perusahaan di DKI Jakarta sebanyak 3.543.028 orang pada tahun 2007 menjadi 3.616.207 pada tahun 2008

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Program yang telah dilaksanakan pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah antara lain:

- a. **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**, dengan prioritas kegiatan antara lain fasilitasi pengembangan kemitraan antara KUKM dengan BUMN/D dan perusahaan swasta.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain tersedianya fasilitasi pengembangan kemitraan antara KUKM dengan BUMN/D dan perusahaan swasta.

- b. **Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**, dengan kegiatan antara lain: penyempurnaan draft Raperda Perkoperasian; revisi SK Gubernur Nomor 111 Tahun 2004 tentang Penataan Lokasi Usaha PKL di Provinsi DKI Jakarta; fasilitasi pembinaan dan pengembangan koperasi sekolah dan pondok pesantren; penyusunan pedoman pelaksanaan pemeringkatan koperasi sekunder dan promoter tingkat provinsi; pembuatan sistem pengelolaan dan seleksi calon pengelola LKM Koperasi PPMK; pemantapan penyiapan koperasi pengelola dana bergulir PPMK.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya penyempurnaan draft Raperda Perkoperasian
- 2) Terlaksananya revisi SK Gubernur Nomor 111 Tahun 2004 tentang Penataan Lokasi Usaha PKL di Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan 50 Koperasi Sekolah dan Pondok Pesantren
- 4) Terlaksananya penyusunan pedoman pemeringkatan Koperasi di DKI Jakarta
- 5) Terseusunnya standar operasional prosedur dan hasil seleksi calon pengelola 267 LKM Koperasi PPMK
- 6) Terlaksananya sertifikasi halal 20 UKM
- 7) Terlaksananya penyusunan konsep kebijakan pembinaan PKL, Pemulung dan Asongan
- 8) Terlaksananya pembuatan sistem pengelolaan dan seleksi calon pengelola LKM Koperasi PPMK
- 9) Terlaksananya penyiapan 267 Koperasi Pengelola Dana Bergulir PPMK

c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan antara lain : pemberdayaan UKM Souvenir khususnya yang berciri khas Jakarta; partisipasi pameran dan promosi UKM; Gelar Pasar Rakyat; penyelenggaraan event promosi dan publikasi di Jakarta UKM Center di Waduk Melati; Penilaian UKM berprestasi; pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran KUKM; fasilitasi permodalan KUKM pola konvensional dan syariah

Realisasi kegiatan antara lain :

- 1) Terdatanya peningkatan penjualan souvenir pada 7 kios UKM
- 2) Terlaksananya pameran dan promosi UKM 10 event
- 3) Terselenggaranya Gelar Pasar Rakyat sebanyak 2 kali

- 4) Meningkatnya akses koperasi dan UKM terhadap sumber dana, pasar dan teknologi
- 5) Terlaksananya penilaian UKM berprestasi Tingkat Provinsi sebanyak 100 UKM
- 6) Terlaksananya *work shop* kiat bisnis usaha mikro dan kecil
- 7) Terlaksananya jaringan pemasaran UKM dalam negeri dan luar negeri sebanyak 100 UKM
- 8) Terfasilitasinya peminjaman permodalan ke lembaga keuangan bank dan non bank 160 orang.

- d. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah**, dengan kegiatan antara lain : perencanaan pembangunan lokasi binaan Rawa Buaya; pembinaan dan penataan lokasi sementara PKL di 5 wilayah kota administrasi; peningkatan kerjasama pengembangan kemitraan antar provinsi.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya perencanaan pembangunan lokasi binaan Rawa Buaya sebanyak 1 lokasi.
- 2) Terlaksananya penataan lokasi sementara PKL di 5 wilayah kota administrasi.
- 3) Terlaksananya kerjasama UKM antar Provinsi.
- 4) Terlaksananya pembinaan mutu produk UKM makanan dan minuman di DKI Jakarta.

- e. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**, dengan kegiatan antara lain : fasilitasi pengembangan Koperasi Sivitas Akademika (KOSIKA), peningkatan jaringan usaha dan kelembagaan koperasi, revitalisasi koperasi lokasi binaan, fasilitasi audit koperasi, peningkatan kelembagaan koperasi strategis (koperasi pensiunan Pemda DKI, Koppas, KSU), fasilitasi pembentukan koperasi kelompok/ormas

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya pembinaan sivitas akademika (KOSIKA) di Jakarta sebanyak 25 koperasi
- 2) Terwujudnya jaringan usaha dan kelembagaan koperasi
- 3) Terlaksananya revitalisasi lokasi binaan pada 20 koperasi
- 4) Terlaksananya audit koperasi pada 30 koperasi
- 5) Terwujudnya peningkatan kelembagaan koperasi strategis (Koperasi Pensiunan Pemda DKI, Koppas, KSU)
- 6) Terlaksananya pembentukan koperasi kelompok/ormas sebanyak 10 koperasi
- 7) Terselenggaranya Pekan Raya Koperasi

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya jaringan pemasaran UKM tahun dalam dan luar negeri menjadi 100 UKM tahun 2008 dari 75 UKM tahun 2007 meningkat 33%.
- b. Meningkatnya permodalan pada 160 KUKM melalui perbankan baik pola konvensional maupun pola syariah
- c. Meningkatnya jumlah partisipan pelaku usaha dari 200 UKM pada tahun 2008 dibanding 160 UKM pada tahun 2007 atau meningkat 20%
- d. Meningkatnya produk UKM yang bersertifikat halal dari 20 jenis produk UKM pada tahun 2008 dibanding 12 jenis produk pada tahun 2007, naik 67%
- e. Meningkatnya jumlah koperasi yang direvitalisasi pada tahun 2008 sebanyak 20 koperasi dibandingkan tahun 2007 sebanyak 16 koperasi, atau naik 25%.

16. Urusan Penanaman Modal

Program yang telah dilaksanakan pada urusan penanaman modal antara lain :

- a. Program Peningkatan Iklim Investasi,** dengan prioritas kegiatan antara lain penerapan Undang-Undang Penanaman Modal dan implikasinya terhadap Iklim investasi di Jakarta; *investor gathering* serta akurasi data perusahaan PMA/PMDN; Operasionalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian persetujuan penanaman modal
- 2) Terlaksananya implementasi lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal.
- 3) Beroperasinya pelayanan terpadu satu pintu
- 4) Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal antar wilayah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Tertanganinya permasalahan penanaman modal di Jakarta melalui *task force*.
- 6) Terbentuknya *Jakarta Investment Center* di Manca Negara 5 kota (Jakarta, Singapore, Melbourne, Hongkong, dan Taipei)
- 7) Terlaksananya evaluasi terhadap PTSP
- 8) Terlaksananya operasional pelayanan terpadu satu pintu.

- c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,** dengan prioritas kegiatan antara lain penyusunan Pra Proposal Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan *Investing in Jakarta's Public Services and Infrastructure* di Timur Tengah dan Belanda

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terinformasinya peluang investasi dan kondisi perekonomian Jakarta dan Indonesia melalui promosi dalam dan luar negeri serta *bussines* forum maupun Pekan Raya Jakarta.
- 2) Terlaksananya kerjasama investasi dengan daerah sekitar terutama dalam perencanaan dan promosi.

- 3) Terlaksananya informasi kepada masyarakat tentang peluang investasi melalui media bahan promosi dan media elektronik.
- 4) Tersedianya beberapa kajian tentang pendayagunaan aset dan verifikasi aset dalam rangka optimalisasi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

d Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan prioritas kegiatan antara lain pengadaan Perlengkapan Kantor dan prasarana operasional lainnya.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kantor SKPD.
- 2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang telah ada.
- 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan (dimatikan) pada program ini adalah pembangunan Gedung Kantor BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.4.350.000.000. kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena belum memiliki SK *multi years*.

e. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Usaha Daerah, dengan prioritas kegiatan antara lain penyusunan standar kompetensi SDM BUMD dan portofolio pengembangan BUMD serta pembinaan, pengendalian dan pengembangannya.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Tersedianya Hasil Evaluasi RKAP BUMD
- 2) Tersedianya Calon Pengurus BUMD yang diseleksi melalui Fit and Proper Test.
- 3) Terlaksananya monitoring, pembinaan, pengendalian dan pengembangan BUMD serta pembinaan terhadap pengurus BUMD.

- 4) Tersusunya Standar Kompetensi SDM BUMD dan Portofolio Pengembangan BUMD.
- 5) Tersedianya Kajian perubahan bentuk badan hukum BUMD.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Urusan Penanaman Modal menghasilkan outcome antara lain :

- a. Jumlah realisasi investasi PMA tahun 2007 sebesar US\$ 4,678,862.8 ribu dengan jumlah proyek 365 dan tahun 2008 sebesar US\$ 9,928,00 ribu dengan jumlah proyek 434
- b. Jumlah realisasi investasi PMDN tahun 2007, sebesar Rp.4.218.044,20 (juta) dengan jumlah Proyek 34 dan tahun 2008 Rp. 1.751.280,30 (juta) dengan jumlah proyek 33
- c. PAD yang bersumber dari BUMD tahun 2008 sebesar Rp. 158.282.194.763 nilai ini naik dibanding tahun 2007 sebesar Rp. 142.214.204.685,-
- d. Meningkatnya hubungan kemitraan bisnis dengan 100 pengusaha Brunei Darussalam, 27 pengusaha Australia dengan 1 MoU dan 27 Pengusaha New Zealand
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan melalui penurunan waktu penyelesaian dari 151 hari menjadi 38 hari pada tahun 2008

17. Urusan Kebudayaan

Program yang telah dilaksanakan pada urusan Kebudayaan antara lain:

- a. Program Peningkatan Mutu dan Cakupan Layanan UPT,**
dengan prioritas kegiatan antara lain pembinaan dan sosialisasi kebudayaan

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya pembinaan kesenian tradisional betawi sebanyak 5 jenis
- 2) Terlaksananya sertifikasi pelaku seni budaya di Balai Latihan Kesenian sebanyak 1.440 orang

- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**, dengan prioritas kegiatan antara lain pemeliharaan cagar budaya serta geragam kesenian tradisional

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pemeliharaan benda cagar budaya kelas A sebanyak 216, kelas B sebanyak 100 dan kelas C sebanyak 100
- 2) Terlaksananya pengendalian perkembangan 15 seni tradisi dan 10 hak karya cipta
- 3) Terlaksananya ferfasilitas pendirian 6 museum dan 4 galeri senii
- 4) Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan cagar budaya di kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata budaya

- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**, dengan prioritas kegiatan antara lain pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana serta promosi kebudayaan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya pembangunan Teater Besar PKJ-TIM bertaraf internasional dengan kapasitas daya tampung sebanyak 1490 tempat duduk
- 2) Terlaksananya promosi seni budaya dan permuseuman sebanyak 40 kegiatan tingkat daerah, 10 kegiatan tingkat nasional dan 8 kegiatan tingkat internasional
- 3) Terlaksananya pagelaran seni budaya tingkat daerah sebanyak 320 pagelaran, tingkat nasional sebanyak 18 pagelaran dan tingkat internasional sebanyak 8 pagelaran

d. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan prioritas kegiatan antara lain pembinaan dan sertifikasi terhadap pelaku budaya

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pengkajian/penelitian seni budaya sebanyak 10 kajian/penelitian
- 2) Terlaksananya pemberian penghargaan terhadap 30 orang pelaku budaya
- 3) Terlaksananya sertifikasi perizinan, rekomendasi bidang seni budaya dan permuseuman sebanyak 25 sertifikat
- 4) Terlaksananya pembinaan kelembagaan kesenian dan kebudayaan sebanyak 55 kelompok seni budaya
- 5) Terlaksananya pembinaan para pelaku seni budaya melalui pelatihan sebanyak 600 orang

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Urusan Kebudayaan menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya kualitas fasilitas pertunjukan teater besar PKJ-TIM bertaraf internasional dengan kapasitas daya tampung sebanyak 1490 tempat duduk sekaligus meningkatkan citra kota Jakarta sebagai kota budaya
- b. Meningkatnya kualitas dan nilai daya tarik Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di kawasan Kotatua sebagai destinasi wisata budaya
- c. Meningkatnya potensi obyek wisata budaya pada 11 bangunan cagar budaya yang direvitalisasi
- d. Meningkatnya angka kunjungan 8 museum milik Pemprov DKI Jakarta dari 860.000 orang pada tahun 2007 menjadi 976.500 orang pada tahun 2008
- e. Meningkatnya sertifikasi pelaku seni budaya di 5 Balai Latihan Kesenian dari 750 orang pada tahun 2007 menjadi 1.440 orang pada tahun 2008

18. Urusan Pemuda dan Olahraga

Program yang telah dilaksanakan pada urusan pemuda dan olahraga antara lain :

- a. **Program peningkatan mutu dan cakupan layanan UPT**, dengan prioritas kegiatan antara lain: peningkatan pelayanan fasilitas UPT olah raga serta peningkatan pelayanan fasilitas olah raga

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terselenggaranya pelayanan urusan pemuda dan olahraga pada 10 UPT SKPD olahraga
- 2) Terlaksananya peningkatan pemanfaat layanan fasilitas lepas olahraga dari 10.000 orang tahun 2007 menjadi 16.000 orang dari target 15.000 pada tahun 2008
- 3) Terlaksananya kunjungan layanan 4 Gelanggang Olahraga sebanyak 923.000 orang.
- 4) Terlaksananya kunjungan Gelanggang Remaja Kotamadya dan Gelanggang Remaja Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.863.300 orang

- b. **Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga**, dengan prioritas kegiatan antara lain pembinaan prestasi serta pemassalah olah raga

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terselenggaranya pembinaan prestasi 43 cabang olahraga
- 2) Terselenggaranya pemassalan 14 cabang olahraga
- 3) Terselenggaranya pengiriman atlet pada 3 event olahraga tingkat Internasional dan 2 event olahraga tingkat nasional
- 4) Terselenggaranya pelaksanaan 6 event olahraga tingkat internasional.

- c. **Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga**, dengan prioritas kegiatan antara lain :rehabilitasi sarana dan prasana olah raga.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) terselesaikannya rehabilitasi 8 prasarana olahraga dan pemuda
- 2) Terbangunnya 30 lapangan olahraga masyarakat.

- d. **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**, dengan prioritas kegiatan antara lain : pembinaan organisasi kepemudaan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terbinanya 30 organisasi kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Terselenggaranya Raimuna Nasional di Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan pemuda dan olah raga menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah pengguna layanan Gelanggang Olah Raga milik Pemprov DKI Jakarta dari 903.000 orang tahun 2007 menjadi 923.000 orang tahun 2008;
- b. Meningkatnya jumlah pengguna layanan Gelanggang Remaja Kodya & Kec. dari 1.490.640 orang tahun 2007 menjadi 1.863.300 orang tahun 2008;
- c. Peringkat Kedua pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII/2008 di Kalimantan Timur;
- d. Peringkat Kedua pada Invitasi Bola Basket *Sister City*;
- e. Peringkat Kedua pada Kejuaraan Internasional Polo Air Betawi Cup;
- f. Peringkat Kedua Lomba Seni dan Budaya Pemuda Pelopor Tingkat Nasional;

- g. Sepuluh Besar Lomba Sarjana Pemuda Penggerak Pedesaan (SP3) Tingkat Nasional.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program yang dilaksanakan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain :

- a. **Program Pendidikan Politik Masyarakat**, dengan prioritas kegiatan antara lain, dialog interaktif antara Pemerintah dengan DPRD, Anggota Dewan Kota dan Dewan Kelurahan, peningkatan partisipasi politik perempuan bagi organisasi wanita dan LSM, fasilitasi pendaftaran baru/ulang bagi organisasi kemasyarakatan dan LSM, Sarasehan membangun etika politik bagi pengurus partai politik, dialog interaktif antara pemerintah dengan organisasi sosial politik, sosialisasi implementasi kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, sosialisasi implementasi HAM bagi aparat dan masyarakat, sosialisasi UU Pemilu kepada pemilih pemula (pelajar), tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ormas, di DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya Dialog Interaktif Antara Pemerintah dengan DPRD, Anggota Dekot dan Dekel, dengan jumlah peserta 320 orang
- 2) Terlaksananya peningkatan partisipasi politik perempuan bagi organisasi wanita dan LSM, dengan jumlah peserta 300 orang
- 3) Terlaksananya fasilitasi pendaftaran baru/ulang bagi organisasi kemasyarakatan dan LSM
- 4) Terlaksananya sarasehan membangun etika politik bagi pengurus partai politik, dengan jumlah peserta 160 orang.
- 5) Terlaksananya dialog interaktif antara pemerintah dengan organisasi sosial politik, dengan jumlah peserta 160 orang.

- 6) Terselenggaranya sosialisasi implementasi kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, dengan jumlah peserta 450 orang
- 7) Terselenggaranya sosialisasi implementasi HAM bagi aparat dan masyarakat, dengan jumlah peserta 320 orang
- 8) Terlaksananya sosialisasi UU Pemilu kepada pemilih pemula (pelajar), tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ormas, di DKI Jakarta, dengan jumlah peserta 1.800 orang

b. **Program Pengendalian dan Pengawasan Potensi Konflik di Masyarakat**, dengan prioritas kegiatan antara lain, pemantauan Ipoleksosbud di Provinsi DKI Jakarta, pemantapan operasional deteksi dini, Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), sarasehan antisipasi kerawanan sosial menghadapi pemilu tahun 2009, aktualisasi nilai bela negara dan ketahanan nasional, serta sarasehan tentang perkembangan situasi Ipoleksosbud yang berdampak terhadap kerawanan sosial di Prov. DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pemantauan Ipoleksosbud di Provinsi DKI Jakarta,
- 2) Terlaksananya pemantapan operasional deteksi dini, sebanyak 800 orang
- 3) Beroperasinya Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
- 4) Terlaksananya Sarasehan Antisipasi Kerawanan Sosial Menghadapi Pemilu Tahun 2009, dengan jumlah peserta 700 orang
- 5) Terlaksananya aktualisasi nilai bela negara dan ketahanan nasional, sebanyak 255 orang
- 6) Terlaksananya Sarasehan tentang Perkembangan Situasi Ipoleksosbud yang Berdampak Terhadap Kerawanan Sosial di Prov. DKI Jakarta, dengan jumlah peserta 400 orang.

c. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, dengan prioritas kegiatan antara lain, penyusunan model penyelesaian

kasus keresahan sosial berlatar belakang agama, pelaksanaan wawasan kebangsaan, peningkatan peran tokoh suku/etnis dalam rangka memperkuat kerukunan hidup antar kelompok suku/etnis, dialog interaktif dalam rangka penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi FKUB Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Tersusunnya model penyelesaian kasus keresahan sosial berlatar belakang agama
- 2) Terlaksananya wawasan kebangsaan, sebanyak 340 orang
- 3) Terlaksananya peningkatan peran tokoh suku/etnis dalam rangka memperkuat kerukunan hidup antar kelompok suku/etnis, sebanyak 425 orang
- 4) Terlaksananya dialog interaktif dalam rangka penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, dengan jumlah peserta 240 orang
- 5) Terlaksananya peningkatan koordinasi dan komunikasi FKUB Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, 60%
- b. Menurunnya jumlah pelanggaran HAM, 20%
- c. Semakin mandirinya ormas / LSM, 40%
- d. Berkurangnya potensi konflik yang terjadi di masyarakat, 60%.

20. Urusan Pemerintahan Umum

Program yang dilaksanakan pada urusan pemerintahan umum antara lain :

- a. **Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Administrasi Pemerintahan**, dengan prioritas kegiatan antara lain, inventarisasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas. Badan dan Kantor di Provinsi

DKI Jakarta, perencanaan pendelegasian urusan OTDA kepada Kota Adm/Kab Adm. Kecamatan dan Kelurahan, Rekonstruksi pembinaan OTDA terhadap Dinas-dinas dalam rangka peningkatan pelayanan lintas sektoral, Penyusunan proyeksi konsepsi OTDA sebagai regulator peningkatan pelayanan masyarakat, Penyusunan hasil kajian tentang penyusunan draft pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kota/kabupaten administrasi, Penyusunan Raperda tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Setda dan Setwan, Penyusunan Raperda tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Lembaga Teknis Daerah, Penyusunan Raperda tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Dinas Daerah, Penyusunan Raperda tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Kotamadya, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan, Penyusunan Rapergub tentang Pengaturan Ruang SKPD sebagai tindak lanjut Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pemantauan piutang bagian laba usaha daerah, Penyusunan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai penetapan pemberian bantuan, penyempurnaan peraturan/Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta penyusunan pedoman dan sistem komunikasi dan informatika kehumasan.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Tersusunnya hasil inventarisasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas. Badan dan Kantor di Provinsi DKI Jakarta
- 2) Tersusunnya hasil perencanaan pendelegasian urusan OTDA kepada Kota Adm/Kab Adm. Kecamatan dan Kelurahan
- 3) Terlaksananya rekonstruksi pembinaan OTDA terhadap Dinas-dinas dalam rangka peningkatan pelayanan lintas sektoral.
- 4) Tersusunnya proyeksi konsepsi OTDA sebagai regulator peningkatan pelayanan masyarakat

- 5) Tersusunnya hasil kajian tentang penyusunan draft pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kota/kabupaten administrasi
- 6) Tersusunnya Raperda tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Setda dan Setwan.
- 7) Tersusunnya Raperda tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Lembaga Teknis Daerah.
- 8) Tersusunnya Raperda tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Dinas Daerah.
- 9) Tersusunnya Raperda tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Kotamadya, Kabipaten, Kecamatan dan Kelurahan.
- 10) Tersusunnya Rapergub tentang Pengaturan Ruang SKPD sebagai tindak lanjut Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- 11) Terlaksananya pemantauan piutang bagian laba usaha daerah sebanyak 100 orang
- 12) Terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai penetapan pemberian bantuan sebanyak 1 paket
- 13) Terlaksananya penyempurnaan peraturan / Keputusan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah sebanyak 1 SK
- 14) Terlaksananya penyusunan pedoman dan sistem komunikasi dan informatika kehumasan sebanyak 1 Peraturan Gubernur
- 15) Terlaksananya penetapan dan penegasan batas wilayah perbatasan.

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan prioritas kegiatan antara lain, pelaksanaan penanganan kasus - kasus pengaduan masyarakat dan penyalahgunaan wewenang aparat, operasional Tromol Pos 008, pemantauan tindak lanjut pemeriksaan APIP atas pemeriksaan / penanganan kasus - kasus pengaduan masyarakat, serta Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan

(PAMJAB) Kepala Unit / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya penanganan kasus - kasus pengaduan masyarakat dan penyalahgunaan wewenang aparat
- 2) Terselenggaranya operasional Tromol Pos 008
- 3) Terlaksananya pemantauan tindak lanjut pemeriksaan APIP atas pemeriksaan / penanganan kasus - kasus pengaduan masyarakat
- 4) Terlaksananya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (PAMJAB) Kepala Unit / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

c Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat,

dengan prioritas kegiatan antara lain, Pelaksanaan pemusnahan barang-barang hasil operasi penertiban antara lain miras, VCD, pengawasan dan penertiban PMKS dan sejenisnya, penanganan krisis penanggulangan gejala bencana, Penanganan pengaduan masyarakat dan pemberitaan mass media mengenai gangguan tempat usaha, Koordinasi kamtibmas dengan muspida (armabar TNI AL, TNI AU, kepolisian daerah, kejaksanaan tinggi, kodam jaya, pengadilan tinggi), Pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), Pelaksanaan penertiban taman BMW Jakarta Utara, serta Operasi penertiban terhadap gangguan-gangguan kamtibmas / praja wibawa.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pemusnahan barang-barang hasil operasi penertiban antara lain miras, VCD dll sebanyak 36.369 botol miras
- 2) Terlaksananya pengawasan dan penertiban PMKS dan sejenisnya sebanyak 5000 orang

- 3) Terlaksananya penanganan krisis penanggulangan gejala bencana
- 4) Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dan pemberitaan mass media mengenai gangguan tempat usaha
- 5) Terlaksananya koordinasi kamtibmas dengan muspida (armabar TNI AL, TNI AU, kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, kodam jaya, pengadilan tinggi)
- 6) Terlaksananya pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- 7) Terlaksananya penertiban taman BMW Jakarta Utara
- 8) Terlaksananya operasi penertiban terhadap gangguan-gangguan kamtibmas / praja wibawa.
- 9) Terlaksananya pengawasan, pemeriksaan dan penertiban terhadap tempat usaha

d Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan prioritas kegiatan antara lain, Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, serta Diklat Akuntansi Pemerintahan.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor;
- 2) Terlaksananya Diklat Akuntansi Pemerintahan.

e Program Pelayanan Kerumahtanggaan Daerah, dengan prioritas kegiatan antara lain, Bimbingan Teknis Implementasi Revisi Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2002 di lingkungan Satminkal Dinas Provinsi DKI Jakarta, penataan arsip pada Tata Usaha Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Para Asisten, Operasional Pembangunan SIMPENADI Satminkal, penataan dan perawatan naskah dinas Pimpinan Daerah, penggantian/perbaikan peningkatan kelengkapan instalasi STP Balaikota, pemeliharaan/perawatan instalasi listrik halaman dan

lampu luar gedung Blok G Balaikota, serta *updating* program-program *data base* pimpinan Pemerintah Daerah.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya bimbingan teknis implementasi revisi Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2002 di lingkungan Satminkal Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 2) Terlaksananya penataan arsip pada tata usaha Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Para Asisten
- 3) Beroperasinya Pembangunan SIMPENADI Satminkal
- 4) Terlaksananya penataan dan perawatan naskah dinas pimpinan daerah
- 5) Terlaksananya penggantian/perbaikan peningkatan kelengkapan instalasi STP Balaikota
- 6) Terlaksananya pemeliharaan/perawatan instalasi listrik halaman dan lampu luar Gedung Blok G Balaikota
- 7) Terlaksananya *updating* program-program *data base* pimpinan pemerintah daerah.

- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah**, dengan prioritas kegiatan antara lain, Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006, Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Operasional Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh), Pendataan dan Peningkatan Penerimaan PBB, Penyusunan konversi laporan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta, Pendampingan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, Rekonsiliasi akuntansi belanja terhadap laporan realisasi anggaran SKPD, Rekonsiliasi akuntansi pendapatan dalam rangka penelitian penerimaan daerah, serta Penyusunan laporan interm dan pragnosis laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2005.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi daerah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006
- 2) Terlaksananya evaluasi dan penyusunan peraturan operasional pajak reklame dan pajak penerangan jalan
- 3) Terlaksananya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak penghasilan (PPh)
- 4) Terlaksananya pendataan dan peningkatan penerimaan PBB
- 5) Terlaksananya penyusunan konversi laporan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 laporan keuangan
- 6) Terlaksananya pendampingan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah sebanyak 1 buku
- 7) Terlaksananya rekonsiliasi akuntansi belanja terhadap laporan realisasi anggaran SKPD sebanyak 1 laporan
- 8) Terlaksananya rekonsiliasi akuntansi pendapatan dalam rangka penelitian penerimaan daerah sebanyak 1 laporan
- 9) Terlaksana penyusunan laporan *interim* dan *pragnosis* laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2005.

g Program Pelayanan Keprotokolan Daerah, dengan prioritas kegiatan antara lain, operasional petugas pelaksana acara 2.769 kali, penancangan apel dan malam resepsi HUT Kota Jakarta, penyiapan bahan acara Gubernur/rapat Pimpinan Provinsi DKI Jakarta, Monitoring dan evaluasi kegiatan keprotokolan acara pimpinan daerah, serta pelaksanaan jamuan resmi Pemprov DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya operasional petugas pelaksana acara 2.769 kali
- 2) Terselenggaranya penancangan apel dan malam resepsi HUT Kota Jakarta sebanyak 3 kegiatan

- 3) Tersedianya penyiapan bahan acara Gubernur/rapat Pimpinan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 670 kali
- 4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan keprotokolan acara pimpinan daerah sebanyak 434 kali
- 5) Terpenuhinya kebutuhan untuk pelaksanaan jamuan resmi Pemprov DKI Jakarta sebanyak 163 kali.

h Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan prioritas kegiatan antara lain, koordinasi patroli keamanan sekolah, patroli keamanan sekolah (PKS), dialog tramtib bagi RT/RW di 30 Kecamatan, pembinaan ketenteraman ketertiban sejak dini, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perda 8 Tahun 2007.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya koordinasi patroli keamanan sekolah dengan 500 orang peserta
- 2) Terlaksananya patroli keamanan sekolah (PKS)
- 3) Terlaksananya dialog tramtib bagi RT/RW di 30 Kecamatan
- 4) Terlaksananya pembinaan ketenteraman ketertiban sejak dini
- 5) Terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perda 8 Tahun 2007

i Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dengan prioritas kegiatan antara lain, fasilitasi kerjasama Mitra Praja Utama, fasilitasi BKSP Jabodetabekjur, kunjungan kerja ke 6 kota-kota sister city Jakarta, fasilitasi penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan kota sister city, penyusunan konsep kebijakan dan kerjasama jabodetabekjur, penyelenggaraan rapat kerja APPSI, partisipasi Jakarta pada kelembagaan UCGL ASPAC dan UCGL World, pengiriman delegasi Jakarta pada Asia Pacific Cities Summit, partisipasi Jakarta dalam forum ANMC 21, monitoring program kerjasama antar daerah, Pengembangan kerjasama antar daerah kabupaten pada 4 kabupaten, penyusunan program

strategis wilayah perkotaan, serta pelayanan permohonan pelayanan yang diajukan Kedubes negara sahabat di Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya fasilitasi kerjasama Mitra Praja Utama dengan 33 daerah
- 2) Terlaksananya fasilitasi BKSP Jabodetabekjur sebanyak 5 kali
- 3) Terlaksananya kunjungan kerja ke 6 kota-kota sister city Jakarta
- 4) Terfasilitasinya penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan kota sister city ke 3 kota
- 5) Tersusunnya konsep kebijakan dan kerjasama jabodetabekjur
- 6) Terselenggaranya rapat kerja APPSI
- 7) Terlaksananya partisipasi Jakarta pada kelembagaan UCGL ASPAC dan UCGL World
- 8) Terlaksananya pengiriman delegasi Jakarta pada Asia Pacific Cities Summit
- 9) Terlaksananya partisipasi Jakarta dalam forum ANMC 21 pada 11 kota
- 10) Terlaksananya monitoring program kerjasama antar daerah kabupaten pada 8 kabupaten
- 11) Terlaksananya pengembangan kerjasama antar daerah kabupaten pada 4 kabupaten
- 12) Terlaksananya penyusunan program strategis wilayah perkotaan
- 13) Terlayannya permohonan pelayanan yang diajukan Kedubes negara sahabat di Jakarta sebanyak 30 pelayanan.

- j Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Keuangan Daerah**, dengan prioritas kegiatan antara lain, Pemantauan piutang bagian laba usaha daerah, Penyusunan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai penetapan pemberian bantuan, serta penyempurnaan peraturan / Keputusan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pemantauan piutang bagian laba usaha daerah sebanyak 100 orang
- 2) Terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai penetapan pemberian bantuan sebanyak 1 paket
- 3) Terlaksananya penyempurnaan peraturan / Keputusan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah sebanyak 1 SK.

k Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kamtibmas, dengan prioritas kegiatan antara lain, penyusunan buku Renops Penanggulangan Banjir, penyusunan modul dan silabus diklat Polisi Pamong Praja tingkat lanjut, koordinasi Satkorlak PBP antisipasi banjir dan kemarau, penyusunan juklak penyimpanan dan pengeluaran barang di gudang Tramtib dan Linmas, serta penyempurnaan renstra Dinas Tramtib dan Linmas.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Tersusunnya buku Renops Penanggulangan Banjir sebanyak 600 buku.
- 2) Tersusunnya modul dan silabus diklat Polisi Pamong Praja tingkat lanjut sebanyak 1 set
- 3) Terlaksananya koordinasi Satkorlak PBP antisipasi banjir dan kemarau
- 4) Tersusunnya juklak penyimpanan dan pengeluaran barang di gudang Tramtib dan Linmas
- 5) Terlaksananya penyempurnaan renstra Dinas Tramtib dan Linmas

l Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Kotamadya/Kabupaten, dengan prioritas kegiatan antara

lain, operasional pelayanan terpadu satu atap di wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi, serta koordinasi, evaluasi dan pelayanan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Beroperasinya pelayanan terpadu satu atap di wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi
- 2) Terlaksananya koordinasi, evaluasi dan pelayanan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

m Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah/Kabupaten, dengan prioritas kegiatan antara lain, inventarisasi dan penghapusan barang/aset daerah, koordinasi monitoring/evaluasi PPMK dan peningkatan dan kapasitas kelurahan, pembinaan program peningkatan pelayanan publik kecamatan dan kelurahan, koordinasi pelaksanaan penyaluran raskin, koordinasi operasi yustisi dan penegakan peraturan daerah, pembinaan budaya kerja bagi aparatur Pemerintah Kodya Jakarta Selatan, koordinasi & evaluasi Program Bangun Praja, operasional dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kotamadya, peningkatan dan pengembangan kualitas kehumasan, pembinaan program peningkatan pelayanan publik kecamatan, sreta operasional kehumasan dan keprotokolan kotamadya.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya Inventarisasi dan Penghapusan Barang/Aset Daerah
- 2) Terlaksananya Koordinasi Monitoring/Evaluasi PPMK dan Peningkatan dan Kapasitas Kelurahan
- 3) Terlaksananya Pembinaan Program Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan
- 4) Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan penyaluran raskin

- 5) Terlaksananya Koordinasi Operasi Yustisi dan Penegakan Peraturan Daerah
- 6) Terlaksananya Pembinaan Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah Kota Jakarta Selatan
- 7) Terlaksananya Koordinasi & Evaluasi Program Bangun Praja
- 8) Terlaksananya Operasional dan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kotamadya
- 9) Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kehumasan
- 10) Terlaksananya Pembinaan Program Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan
- 11) Terlaksananya operasional kehumasan dan keprotokolan kotamadya

n Program Peningkatan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kota/Kabupaten, dengan prioritas kegiatan antara lain, sosialisasi Undang-undang tentang Pemerintahan Provinsi Republik Indonesia Jakarta pada Anggota Dewan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta bagi 100 anggota Dewan Kota/kabupaten, Evaluasi RT, RW dan Dewan Kelurahan, serta Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Program Adipura.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya sosialisasi Undang-undang tentang Pemerintahan Provinsi Republik Indonesia Jakarta pada Anggota Dewan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta bagi 100 anggota Dewan Kota/kabupaten.
- 2) Terlaksananya evaluasi RT, RW dan Dewan Kelurahan
- 3) Terlaksananya monitoring, koordinasi dan evaluasi Program Adipura.

o Program Penataan peraturan Perundang-undangan, dengan prioritas kegiatan antara lain, pengundangan Perda dan Pergub

dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Penyusunan Raperda hasil penyempurnaan Perda No. 10 Tahun 1999, Penyusunan naskah akademis mengenai perkoperasian, Inventarisasi dan klarifikasi peraturan bidang sosial, pertamanan dan perhubungan, Evaluasi dan kajian peraturan perundangan di bidang pembentukan Badan Pembinaan Hukum Daerah, serta Penyusunan Naskah Akademis Mengenai Dana Cadangan Daerah.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pengesahan Perda dan Pergub dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah
- 2) Tersusunnya Raperda hasil penyempurnaan Perda No. 10 Tahun 1999
- 3) Tersusunnya naskah akademis mengenai perkoperasian sebanyak 1 naskah
- 4) Terlaksananya inventarisasi dan klarifikasi peraturan bidang sosial, pertamanan dan perhubungan, sebanyak 3 dokumen.
- 5) Terlaksananya kajian peraturan per-UU-an di bidang pembentukan Badan Pembinaan Hukum Daerah sebanyak 1 dokumen
- 6) Tersusunnya Naskah Akademis Mengenai Dana Cadangan Daerah sebanyak 1 dokumen.

- p. Program Peningkatan Kapasitas dan Mutu Pelayanan Publik Kelurahan dan Kecamatan,** dengan prioritas kegiatan antara lain, koordinasi Camat, Danramil dan Kapolsek di Provinsi DKI Jakarta, keningkatan kapasitas dalam peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak di 5 Kota Administrasi, pelaksanaan 3 kewenangan lurah di bidang kebersihan, kesehatan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan 13 kewenangan camat yaitu bidang ketentraman dan ketertiban, pekerjaan umum air, pekerjaan umum jala, pertamanan, penerangan jalan umum dan SJU, perumahan, kebersihan, koperasi dan UKM, ketatakotaan,

penataan dan pengawasan bangunan, pembinaan mental dan kesejahteraan sosial, olah raga dan pemuda.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya koordinasi Camat, Danramil dan Kapolsek di Provinsi DKI Jakarta
- 2) Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi 60 Lurah dalam peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan Anak di 5 Kota Administrasi
- 3) Terselenggaranya 3 kewenangan lurah di bidang kebersihan, kesehatan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Terselenggaranya 13 kewenangan camat yaitu bidang ketentraman dan ketertiban, pekerjaan umum air, pekerjaan umum jala, pertamanan, penerangan jalan umum dan SJU, perumahan, kebersihan, koperasi dan UKM, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pembinaan mental dan kesejahteraan sosial, olah raga dan pemuda.

- q. Program Pelayanan Hukum**, dengan prioritas kegiatan antara lain, Penyelesaian masalah sengketa pertanahan di DKI Jakarta, Inventarisasi dan evaluasi perkara yang masuk ke Biro Hukum, Pengurusan perkara Perdata dan TUN, serta Forum komunikasi diantara instansi penegak hukum.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) terselesaikannya masalah sengketa pertanahan di DKI Jakarta, dari rencana 250 masalah pertanahan realisasinya 250 masalah pertanahan.
- 2) Terlaksananya inventarisasi dan terevaluasinya perkara yang masuk ke Biro Hukum, sebanyak 30 perkara.
- 3) Terlaksananya pengurusan perkara Perdata dan TUN, sebanyak 20 perkara.

- 4) Terselenggarakannya forum komunikasi diantara instansi penegak hukum, dari rencana 4 instansi realisasinya 4 instansi.

r Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM, dengan prioritas kegiatan antara lain, sosialisasi PP 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada Dinas, Badan dan Kantor di Provinsi DKI Jakarta, penyusunan format pola pelaporan SKPD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007, penyusunan laporan Biro Administrasi Wilayah, evaluasi kegiatan Biro Administrasi Wilayah Tahun 2008 dan penyusunan program kerja tahun 2009, pembuatan Kartu Tanda Anggota PPNS, peningkatan pengetahuan hukum di tingkat keluarga, penyusunan warta, abstrak, dan informasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan, serta updating data produk hukum pada situs informasi Biro Hukum.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya sosialisasi PP 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada Dinas, Badan dan Kantor di Provinsi DKI Jakarta
- 2) Tersusunnya format pola pelaporan SKPD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007
- 3) Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007
- 4) Terbuatnya Kartu Tanda Anggota PPNS, dari rencana 100 PPNS realisasinya 100 PPNS
- 5) Meningkatnya pengetahuan hukum di tingkat keluarga, sebanyak 50 keluarga
- 6) Tersusunnya warta, abstrak, dan informasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan, sebanyak 400 instansi
- 7) Ter-*update*-nya data produk hukum pada situs informasi Biro Hukum

- s. Program Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Masyarakat serta Kenyamanan Lingkungan,** dengan prioritas kegiatan antara lain, pengawasan dan penertiban kaki lima (PKL), pengawasan dan penertiban terhadap rumah kost, pembinaan anggota linmas dan pemberian bantuan perlengkapan bagi anggota Linmas RT/RW dan Sat. Perlindungan Masyarakat (Linmas) obyek vital, pengawasan dan penertiban media informasi dan promosi, serta pengawasan dan penertiban terhadap terminal bayangan.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pengawasan dan penertiban kaki lima (PKL) sebanyak 1.611 pedagang, serta 1.860 gubuk liar.
- 2) Terlaksananya pengawasan dan penertiban terhadap rumah kost sebanyak 151 buah.
- 3) Terlaksananya pembinaan anggota linmas dan pemberian bantuan perlengkapan bagi anggota Linmas RT/RW dan Sat. Linmas Obyek Vital sebanyak 24 kali.
- 4) Terlaksananya pengawasan dan penertiban media informasi dan promosi
- 5) Terlaksananya pengawasan dan penertiban terhadap terminal bayangan

- t. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Kesmas, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi Wilayah,** dengan prioritas kegiatan antara lain, fasilitasi penyerahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008, monitoring dan evaluasi Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, penyusunan draft Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan, Kunjungan kerja dan silaturahmi Gubernur ke Wilayah, Peningkatan sinergi OTDA terhadap pelayanan langsung di Kecamatan dan Kelurahan, Penyusunan Perda tentang Pedoman Pelimpahan Urusan di

Provinsi DKI Jakarta, Evaluasi pelaksanaan program Kerja Walikota/Bupati Adm. Kep. Seribu Camat dan Lurah di Provinsi DKI Jakarta, Pembinaan peningkatan kemampuan perangkat kelurahan dalam mendeteksi dan mengantisipasi gejolak sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, penyusunan tipologi Kecamatan, Stabilitas ketahanan pangan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pemberdayaan potensi ekonomi kota Jakarta dan memelihara/ meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta, study kawasan ekonomi khusus, pengembangan transportasi dan regulasi perpasaran, pengembangan potensi pariwisata.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya penyerahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008
- 2) Terlaksananya monitoring dan evaluasi Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
- 3) Tersusunnya draft Peraturan Daerah tentang Lembaga Masyarakat
- 4) Terlaksananya kunjungan kerja dan silaturahmi Gubernur ke Wilayah
- 5) Terlaksananya peningkatan sinergi OTDA terhadap pelayanan langsung di Kecamatan dan Kelurahan
- 6) Terlaksananya penyusunan Perda tentang Pedoman Pelimpahan Urusan di Provinsi DKI Jakarta
- 7) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan program Kerja Walikota/Bupati Adm. Kep. Seribu Camat dan Lurah di Provinsi DKI Jakarta
- 8) Terlaksananya pembinaan peningkatan kemampuan perangkat kelurahan dalam mendeteksi dan mengantisipasi gejolak sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta
- 9) Terlaksananya penyusunan tipologi Kecamatan

- 10) Terlaksananya stabilitas ketahanan pangan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pemberdayaan potensi ekonomi kota Jakarta dan memelihara/meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta.
- 11) Terlaksananya study kawasan ekonomi khusus, pengembangan transportasi dan regulasi perpasara.

u Program Penanggulangan Bencana, dengan prioritas kegiatan antara lain, operasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pengamanan penampungan korban bencana, pengendalian pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial korban, operasional *crisis center*, pelaksanaan pekan sadar bencana, serta pembekalan potensi masyarakat di daerah rawan bencana banjir.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya operasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan mendirikan 333 tempat penampungan
- 2) Terlaksananya pengamanan penampungan korban bencana pada 34 kecamatan dan 125 kelurahan
- 3) Terlaksananya pengendalian pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial korban
- 4) Beroperasinya *crisis center*
- 5) Terlaksananya Pekan Sadar Bencana
- 6) Terlaksananya pembekalan potensi masyarakat di daerah rawan bencana banjir.

v Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan prioritas kegiatan antara lain, penyusunan format Badan Legislatif, pengembangan wawasan staf (*knowledge consulting*), sosialisasi fungsi dan kewenangan dewan terhadap masyarakat pers, kajian dan dialog interaktif fasilitasi aspirasi warga mengenai kemitraan kelurahan dan dewan kelurahan, Dialog DPRD dengan Tokoh

Masyarakat di 5 Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Kepulauan Seribu, serta pembahasan Raperda.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Tersusunnya Format Badan Legislatif
- 2) Terlaksananya pengembangan wawasan staf (*knowledge consulting*)
- 3) Terlaksananya sosialisasi fungsi dan kewenangan dewan terhadap masyarakat pers
- 4) Terlaksananya kajian dan dialog interaktif fasilitasi aspirasi warga mengenai kemitraan kelurahan dan dewan kelurahan
- 5) Terlaksananya dialog DPRD dengan Tokoh Masyarakat di 5 Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Kepulauan Seribu
- 6) Terlaksananya pembahasan Raperda

W Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media

Massa, dengan prioritas kegiatan antara lain, peliputan acara/kegiatan Pemprov. DKI Jakarta, pemuatan *advetorial*, sponsor artikel dan rubrik khusus di media cetak, publikasi acara/kegiatan Pemrov. DKI Jakarta, sosialisasi melalui kemitraan dengan media televisi, sosialisasi melalui kemitraan dengan media radio, pengembangan layanan informasi dan multi media online “beritajakarta.com”, serta pengembangan komunikasi, informasi media massa.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya peliputan acara/kegiatan Pemprov. DKI Jakarta sebanyak 1.250 acara, 3.660 frame, 120 keping
- 2) Terlaksananya pemuatan *advetorial*, sponsor artikel dan rubrik khusus di media cetak sebanyak 69 judul
- 3) Terlaksananya publikasi acara/kegiatan Pemrov. DKI Jakarta 215 peliputan

- 4) Terlaksananya sosialisasi melalui kemitraan dengan media televisi sebanyak 12 kali
- 5) Terlaksananya sosialisasi melalui kemitraan dengan media radio sebanyak 12 dialog publik, 14 *feature*
- 6) Terlaksananya pengembangan layanan informasi dan multi media *on line* “beritajakarta.com” sebanyak 12.420 audio dan video
- 7) Pengembangan komunikasi, informasi media massa, media cetak sebanyak 4.800 buku

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan pemerintahan umum menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Informasi kepada masyarakat tentang status siaga bencana Lebih cepat 2 jam
- b. Terdidiknya 14% dari total pegawai Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta
- c. Masyarakat terhindar dari minuman keras ilegal sebesar 15%
- d. Berkurangnya PMKS yang beroperasi di Jalan Protokol sebesar 50%
- e. Meningkatnya jumlah ijin usaha masyarakat menjadi 9.365 UUG
- f. Meningkatnya lahan untuk sarana publik seluas 26 Ha
- g. Bertambahnya produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan peraturan sebanyak 175 peraturan, dengan rincian Perda sebanyak 165 dan Pergub sebanyak 10.
- h. Meningkatnya kapasitas aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di 44 kecamatan dan 267 kelurahan
- i. Meningkatnya tertib administrasi batas kewilayahan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Banten
- j. Meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan di 267 kelurahan
- k. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di 267 kelurahan

- I. Meningkatnya kepastian hukum aset pemda berupa tanah yang bersertifikat sebanyak 2.730 aset seluas 15.432.553 m2.

21. Urusan Kepegawaian

Program yang telah dilaksanakan pada urusan kepegawaian antara lain :

a. Program Pengelolaan SDM di tingkat SKPD, dengan prioritas kegiatan antara lain, Pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja PTT dilingkungan Pemerintah DKI Jakarta, Pengangkatan CPNS dari tenaga Honorer Pemerintah DKI Jakarta, Pengolahan Database dan penyelesaian surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) PNS, *Updating* dan *Maintenance situs (website)* BKD Provinsi DKI Jakarta, Input, Editing dan Pemutakhiran data pegawai Pemerintah Pemprov DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya perpanjangan perjanjian kerja PTT dilingkungan Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 13.506 SK
- 2) Terlaksananya pengangkatan CPNS dari tenaga Honorer Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 3.254 CPNS
- 3) Terlaksananya Pengolahan *Database* dan penyelesaian surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) PNS sebanyak 3.655 surat
- 4) Terlaksananya *Updating* dan *Maintenance situs (website)* BKD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 program/website
- 5) Terlaksananya *Input, Editing* dan Pemutakhiran data pegawai Pemerintah Pemprov. DKI Jakarta sebanyak 85.000 data

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan prioritas kegiatan antara lain, Pengadaan CPNS di Pemerintah DKI Jakarta, Monitoring dan Pembinaan Praja IPDN, Koordinasi, Sinkronisasi dan penyamaan persepsi dalam kebijakan

kepegawaian, Reformasi dan Birokrasi di lingkungan Pemrov DKI Jakarta, Pelaksanaan pembekalan pembuatan karya tulis ilmiah bagi Guru golongan IV/a keatas, Penelitian data kenaikan pangkat bagi pegawai, serta Pelaksanaan penyuluhan mekanisme kenaikan pangkat jabatan fungsional guru.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pengadaan CPNS di Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 5.695 formasi
- 2) Monitoring dan Pembinaan Praja IPDN sebanyak 52 orang
- 3) Adanya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyamaan persepsi dalam kebijakan kepegawaian
- 4) Terlaksananya Reformasi dan Birokrasi di lingkungan Pemrov DKI Jakarta sebanyak 66 SKPD
- 5) Terlaksananya Pelaksanaan pembekalan pembuatan karya tulis ilmiah bagi Guru golongan IV/a keatas sebanyak 600 orang
- 6) Terlaksananya Penelitian data kenaikan pangkat bagi pegawai sebanyak 12.000 orang
- 7) Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan mekanisme kenaikan pangkat jabatan fungsional guru sebanyak 400 orang

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan prioritas kegiatan antara lain, Pembinaan rohani pegawai BKD, Pengembangan wawasan pegawai BKD, Pemrosesan administrassi kepegawaian Pegawai BKD, Sosialisasi dan Bintek dalam rangka penyusunan dan kajian terhadap usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, Pengelolaan Pegawai Tugas Belajar, Pengelolaan Pelayanan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penilaian Ulang Sistem Manajemen Mutu ISO, Penyusunan Bahan Pembelajaran (Modul), serta Pengelolaan Humas dan Buletin.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pembinaan rohani pegawai BKD sebanyak 200 pegawai
- 2) Terlaksananya pengembangan wawasan pegawai BKD sebanyak 27 pegawai
- 2) Terlaksananya pemrosesan administrasi kepegawaian Pegawai BKD sebanyak 5.000 pegawai
- 3) Terlaksananya sosialisasi dan Bintel dalam rangka penyusunan dan kajian terhadap usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 59 SKPD
- 4) Terlaksananya Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 10 SKPD
- 5) Terselenggaranya Pengelolaan Pegawai Tugas Belajar sebanyak 105 orang
- 6) Terselenggaranya Pengelolaan Pelayanan Perpustakaan
- 7) Terselenggaranya Pengelolaan dan Penilaian Ulang Sistem Manajemen Mutu ISO
- 8) Terselenggaranya Penyusunan Bahan Pembelajaran (Modul)

d. Penetapan Kerangka Pembiayaan Kelembagaan dan Regulassi Kepegawaian, dengan prioritas kegiatan antara lain, Pembinaan Badan Cendana Bakti Jaya, Pembinaan DPD Korpri Pemda DKI Jakarta, Pembinaan Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta, Pembinaan Paguyuban Werdatama, serta Pembinaan Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- a) Terlaksananya pembinaan Badan Cendana Bakti Jaya
- b) Terlaksananya Pembinaan DPD Korpri Pemda DKI Jakarta
- c) Terlaksananya Pembinaan Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta

- d) Terlaksananya Pembinaan Paguyuban Werdatama
- e) Terlaksananya Pembinaan Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta

e. Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai, dengan prioritas kegiatan antara lain Pelaksanaan hiburan karyawan DKI dan keluarganya, Pembuatan KTP Askes termasuk pensiun, Penelitian dan pendataan pemberian taperum, serta Penyelesaian administrasi penghargaan kepada pejabat yang telah selesai masa bhakti dan penghargaan PNS janda/duda.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pembuatan KTP Askes termasuk pensiun sebanyak 2.125 KTP
- 2) Terlaksananya penelitian dan pendataan pemberian taperum sebanyak 3.057 pegawai
- 3) Terlaksananya penyelesaian administrasi penghargaan kepada pejabat yang telah selesai masa bhakti dan penghargaan PNS janda/duda sebanyak 4.406 pegawai

f. Program Pengembangan Strategi kaderisasi SDM dalam jangka panjang, dengan prioritas kegiatan antara lain, Evaluasi dan monitoring pejabat struktural di lingkungan pemerintah DKI Jakarta, Monitoring dan evaluasi pejabat fungsional kesehatan dan pendidikan, Monitoring pendidikan formal PNS dengan biaya sendiri diluar jam kerja, Evaluasi tim penilai angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, serta Monitoring kepesertaan pegawai dalam diklat kepemimpinan Tk. II, III dan IV.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya evaluasi dan monitoring pejabat struktural di lingkungan pemerintah DKI Jakarta

- 2) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pejabat fungsional kesehatan dan pendidikan
- 3) Terlaksananya monitoring pendidikan formal PNS dengan biaya sendiri diluar jam kerja sebanyak 29 pegawai
- 4) Terlaksananya evaluasi tim penilai angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 40 orang
- 5) Terlaksananya monitoring kepesertaan pegawai dalam diklat kepemimpinan Tk. II, III dan IV sebanyak 29 orang

g. Program Pendidikan Kedinasan, dengan prioritas kegiatan antara lain, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Prajabatan Golongan II dan III, Penyelenggaraan Pegawai Tugas Dalam Negeri serta Luar Negeri.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 120 orang
- 2) Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 49 orang
- 3) Terselenggaranya Diklat Prajabatan Golongan II dan III Tersedianya sebanyak 319 orang
- 4) Terselenggaranya Pegawai Tugas Dalam Negeri sebanyak 67 orang
- 5) Terselenggaranya Pegawai Tugas Luar Negeri sebanyak 5 orang

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan kepegawaian menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Terpenuhinya kebutuhan, pendayagunaan dan peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 60%

- b. Terciptanya regenerasi SDM jabatan struktural yang berkesinambungan (sustainable) sebanyak 6.436 jabatan dari 6.968 jabatan (92.4%)
- c. Meningkatnya kualitas pejabat struktural yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diemban sebesar 35,85%
- d. Terlaksananya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan SKPD rata-rata 80%

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Program yang telah dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, dengan prioritas kegiatan antara lain : bimbingan teknis TTG serta Training Of Trainer (TOT) kader pemberdayaan masyarakat

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya bimbingan teknis TTG di Kelurahan
- 2) Terlaksananya TOT bagi masyarakat

- b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan prioritas kegiatan antara lain : Bulan Bhakti Gotong Royong serta penerapan teknologi pengolahan limbah rumah tangga berbasis komunitas

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong
- 2) Terlaksananya penerapan Teknologi Pengolahan Limbah di kelurahan

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan Pemberdayaan Masyarakat menghasilkan *outcome*, antara lain :

- a. Bertambahnya sebanyak 22 lokasi pembangunan sarana dan prasarana fisik dasar di 3 wilayah Kota Administrasi dalam kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Manunggal Membangun Kelurahan (MMK) dan Manunggal Karya Jaya (MKJ)

- b. Bertambahnya jumlah kecamatan sebagai tempat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan 14 Kecamatan menjadi menjadi 43 Kecamatan.

23. Urusan Kearsipan

Program yang telah dilaksanakan pada urusan kearsipan antara lain :

- a. Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kearsipan**, dengan prioritas kegiatan antara lain, Penyusunan Pergub tentang tata cara kerja sama di bidang kearsipan, Penyusunan pergub tentang pengelolaan arsip dinamis in aktif, Penyusunan pergub tentang pengelolaan pengelolaan arsip statis, serta Penyusunan kerangka pelimpahan kewenangan antara regulator dan operator dalam urusan kearsipan.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Tersusunnya Pergub Tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Kearsipan, sebanyak 1 Rapergub.
- 2) Tersusunnya Pergub Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif, sebanyak 1 Rapergub.
- 3) Tersusunnya Pergub Tentang Pengelolaan Pengelolaan Arsip Statis, sebanyak 1 Rapergub.
- 4) Tersusunnya kerangka pelimpahan kewenangan antara regulator dan operator dalam urusan kearsipan, sebanyak 1 paket.

- b. Program Peningkatan Pelayanan Arsip Daerah**, dengan prioritas kegiatan antara lain, penduplikasian dokumen arsip daerah dalam bentuk mikrofilm, penduplikasian dokumen arsip daerah dalam bentuk digital, penduplikasian arsip/dokumen dalam bentuk informasi, penduplikasian penyusutan dokumen in aktif yang tersimpan di KAD, penataan arsip in aktif, akuisisi arsip dan dokumen yang bernilai guna, enkapsulasi arsip/dokumen daerah, serta Pemeliharaan mikrofilm.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terduplikasinya dokumen arsip daerah dalam bentuk mikrofilm, sebanyak 4.500 halaman.
- 2) Terduplikasinya dokumen arsip daerah dalam bentuk digital, sebanyak 3.000 lembar.
- 3) Terduplikasinya arsip/dokumen dalam bentuk informasi, sebanyak 100.000 halaman.
- 4) Terlaksananya penyusutan dokumen in aktif yang tersimpan di KAD, sebanyak 4 SKPD.
- 5) Terlaksananya penataan arsip in aktif, sebanyak 5.000 boks.
- 6) Terlaksananya akuisisi arsip dan dokumen yang bernilai guna, sebanyak 10 SKPD.
- 7) Terlaksananya enkapsulasi arsip/dokumen daerah, sebanyak 300 lembar.
- 8) Terpeliharanya mikrofilm, sebanyak 500 roll.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan kearsipan menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Bertambahnya dokumen/arsip daerah yang didokumentasikan melalui media sebanyak 107.500 lembar
- b. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat .

24. Urusan Komunikasi dan Informatika

Program kegiatan yang dilaksanakan pada urusan komunikasi dan informatika antara lain:

- d. Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Komunikasi dan Informatika**, dengan prioritas kegiatan antara lain, operasional *steering committee*, pelaksanaan *program management* (WPA), Pelaksanaan konsultasi evaluasi pengadaan *hardware*, software dan NW, serta penyusunan harga satuan teknologi informasi.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Operasional *steering committee* selama 12 bulan

- 2) Terlaksananya program management (WPA) sebanyak 2 modul
- 3) Terlaksananya konsultasi evaluasi pengadaan *hardware*, software dan NW, selama 12 bulan
- 4) Terlaksananya penyusunan harga satuan teknologi informasi, sebanyak 2 kali

e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan prioritas kegiatan antara lain sewa *software OS mainframe*, sewa *bandwith internet*, sewa jaringan *fiber optik*, Pemeliharaan dan suku cadang *router cisco*, serta pemeliharaan *mainframe* MP 30000, DASD ESSS 2105, CCU 3740.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya sewa *software OS mainframe*, selama 12 bulan
- 2) Terlaksananya sewa *bandwith internet*, selama 12 bulan
- 3) Terlaksananya sewa jaringan *fiber optik* selama 12 bulan
- 4) Terlaksananya pemeliharaan dan suku cadang *router cisco*, selama 12 bulan
- 5) Terlaksananya pemeliharaan *mainframe* MP 30000, DASD ESSS 2105, CCU 3740, sebanyak 12 bulan.

f. Program Peningkatan Citra Positif Pemprov di Mata Masyarakat, dengan prioritas kegiatan antara lain pengembangan *website* www.jakarta.go.id, pengembangan dan perawatan *e-mail*, nota dinas dan konsul *web mail*, penyediaan informasi melalui informasi media online warta DKI “beritajakarta.com”, penerbitan majalah media jaya, penerbitan majalah mitra, sosialisasi kebijakan melalui tatap muka dan dialog publik, sosialisasi kebijakan melalui media luar ruang (*running text*), wawancara/*dialog interaktif* di radio, serta penyusunan synopsis/klarifikasi/analisa berita media massa dan

opini publik serta Monitoring Aplikasi Kebijakan Pemprov. DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pengembangan *website* www.jakarta.go.id, sebanyak 1 modul
- 2) Terlaksananya pengembangan dan perawatan *e-mail*, nota dinas dan konsul web mail, sebanyak 3 modul.
- 3) Tersedianya informasi melalui informasi media *online* warta DKI “beritajakarta.com”, sebanyak 6.960 berita.
- 4) Terlaksananya penerbitan majalah media jaya, sebanyak 7 edisi.
- 5) Terlaksananya penerbitan Majalah Mitra, sebanyak 7 edisi
- 6) Terlaksananya sosialisasi kebijakan melalui tatap muka dan dialog publik, sebanyak 8 kegiatan.
- 7) Terlaksananya sosialisasi kebijakan melalui media luar ruang (*running text*), sebanyak 12 tema
- 8) Terlaksananya wawancara/dialog interaktif di radio, sebanyak 30 kali
- 9) Tersusunnya synopsis/klarifikasi/analisa berita media massa dan opini publik serta Monitoring Aplikasi Kebijakan Pemprov. DKI Jakarta, sebanyak 445 buku.

g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi,

dengan prioritas kegiatan antara lain, pemeliharaan dan pengembangan SIPBAT, implementasi *master plan* TI (pembangunan SI pengelolaan keuangan daerah), pengembangan aplikasi *E-procurement*, Publikasi dan sosialisasi *E-procurement*, serta Pelaksanaan migrasi aplikasi dari MP 3.000 ke *Z-series*.

Realisasi kegiatan tahun 2008, antara lain :

- 1) Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan SIPBAT, sebanyak 1 aplikasi.

- 2) Terlaksananya Implementasi *Master Plan* TI (Pembangunan SI Pengelolaan Keuangan Daerah), sebanyak 1 aplikasi
- 3) Terlaksananya pengembangan aplikasi *E-Procurement*, sebanyak 40 SKPD
- 4) Terlaksananya publikasi dan sosialisasi *E-Procurement* , sebanyak 61 SKPD
- 5) Terlaksananya migrasi aplikasi dari *MP 3.000* ke *Z-series*, sebanyak 3 aplikasi

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Urusan Komunikasi dan Informatika menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Terlaksananya Implementasi *Master Plan* TI (Pembangunan SI Pengelolaan Keuangan Daerah)
- b. Meningkatnya transparansi penyediaan barang dan jasa melalui e-announcement sebanyak 609 dari 722 SKPD.
- c. Meningkatnya aksesibilitas informasi

C. Program Prioritas SKPD Menurut Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian

Program yang telah dilaksanakan pada urusan pertanian antara lain :

- a. **Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**, dengan prioritas antara lain : pengembangan sarana teknologi hidroponik, outsourcing pakar tata boga pada pengolahan pangan, pengujian masa kadaluarsa produk olahan, pengelolaan produksi dan pemasaran produk *hidroponik*, pemeliharaan alsintan, pengembangan sayuran ramah lingkungan, penerapan sayuran ramah lingkungan, penerapan intensifikasi sawah, pemberdayaan P3A.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya pengembangan Sarana Teknologi Hidroponik sebanyak 2 (dua) *green house* total luas 5.000 m².
- 2) Terlaksananya pelatihan tentang olahan pangan sebanyak 2 jenis
- 3) Terlaksananya pengujian produk olahan sebanyak 1 jenis produk olahan.
- 4) Terlaksananya pengelolaan *sentra hidroponik* di 2 (dua) lokasi.
- 5) Terlaksananya pemeliharaan alat mesin pertanian selama 12 bulan.
- 6) Terlaksananya perluasan lahan pengembangan sayuran ramah lingkungan seluas 9 Ha.
- 7) Terlaksananya perluasan sawah yang menerapkan sistem intensifikasi seluas 15 Ha.
- 8) Terlaksananya pendistribusian air irigasi pertanian di 3 Wilayah produksi padi.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan antara lain : pengadaan alat mesin pertanian, pembangunan TC Klender tahap III, pemeliharaan pagar kebun bibit cibubur, rehabilitasi gedung teknis Jalan Gunung Sahari

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya penyediaan 4 jenis alat mesin pertanian
- 2) Terlaksananya Pembangunan TC Klender seluas 2.500 m²
- 3) Terlaksananya pemeliharaan pagar kebun di kebun bibit Cibubur
- 4) Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Teknis Jalan Gunung Sahari 2 lantai.

c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan antara lain : penanaman tanaman produktif, pemeliharaan hasil penghijauan

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya penanaman tanaman produktif sebanyak 12.500 pohon
- 2) Terlaksananya pemeliharaan hasil Penghijauan sebanyak 22.500 pohon

d. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan antara lain :
Peningkatan teknologi pengolahan pangan, Pelaksanaan inspeksi keamanan pangan, lomba dan sarasehan pengolahan pangan, temu usaha eksportir dengan petani tanaman hias, pembinaan kemitraan usaha biofarmaka, pembangunan Taman Anggrek Ragunan (TAR) Tahap II, Pembangunan Pusat Pemasaran Tanaman Hias PIK Tahap I.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pelatihan teknologi pengolahan pangan dengan 30 orang peserta.
- 2) Terlaksananya Inspeksi Keamanan Pangan dengan hasil 2 (dua) laporan.
- 3) Terlaksananya lomba dan sarasehan pengolahan pangan sebanyak 1 (satu) kali.
- 4) Terlaksananya temu usaha eksportir dengan petani tanaman hias sebanyak 50 orang.
- 5) Terlaksananya Pembinaan Kemitraan Usaha Biofarmaka terhadap 50 orang.
- 6) Terlaksananya pembangunan Taman Anggrek Ragunan seluas 175 m²
- 7) Terbangunnya pusat pemasaran tanaman hias PIK seluas 1.200 m².

e. Progam Peningkatan Mutu dan Cakupan Layanan UPT, dengan kegiatan antara lain : penyelenggaraan lelang bunga/tanaman hias P3HPHH Rawabelong.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

Terselenggaranya Lelang Bunga/Tanaman Hias P3HPHH

Rawabelong sebanyak 12 kali

- f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan**, dengan kegiatan antara lain : Sosialisasi dan Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2004, pembinaan mutu produk segar, pembinaan mutu produk olahan, penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH), Pembinaan KK rawan pangan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain ;

- 1) Terlaksananya sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2004 kepada 80 orang
- 2) Terlaksananya pembinaan mengenai mutu produk segar 1 kelompok
- 3) Terlaksananya pembinaan mutu produk olahan sebanyak 2 jenis
- 4) Terlaksananya penyusunan buku pola pangan harapan sebanyak 10 buku
- 5) Terlaksananya pembinaan keluarga rawan pangan sebanyak 60 keluarga

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Urusan Pertanian menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya Produktifitas *Leafy Vegetables* (bayam, kangkung, pakcoy, caisin) dalam setahun menghasilkan sayuran sebanyak 11,5 ton dan buah (melon) sebanyak 31,4 ton.
- b. Meningkatnya produktivitas sawah intensifikasi masyarakat pada tahun 2008 sebesar 3,05 % atau lebih dari yang ditargetkan sebesar 3 %
- c. Meningkatnya jumlah pohon produktif di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta pada tahun 2008 sebanyak 90.000

pohon dibanding pada tahun 2007 sebanyak 77.500 pohon atau naik sebesar 20%

- d. Meningkatnya mutu olahan hasil pertanian sesuai dengan Standar Prima-3 melalui sertifikasi untuk 60 orang pelaku usaha
- e. Meningkatkan mutu olahan hasil pertanian melalui pengujian produk olahan dengan pengambilan sampel uji di 50 tempat penjualan

2. Urusan Kehutanan

Program yang telah dilaksanakan pada urusan kehutanan antara lain :

- a. **Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**, dengan prioritas kegiatan antara lain : peningkatan kelembagaan forum Daerah Aliran Sungai (DAS), pemeliharaan penghijauan pohon kehutanan, pengembangan arboretum mangrove, pemeliharaan habitat biota mangrove di kawasan konservasi, gerakan penghijauan pohon kehutanan, sosialisasi dan aplikasi sumur resapan biopori, Pemeliharaan hutan kota

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya peningkatan kelembagaan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan hasil pertemuan sebanyak 5 kali.
- 2) Terlaksananya pemeliharaan pohon kehutanan di 5 wilayah
- 3) Terlaksananya pengembangan arboretum mangrove 1 lokasi
- 4) Terlaksananya pemeliharaan biota mangrove sebanyak 10 jenis
- 5) Terlaksananya penanaman pohon kehutanan sebanyak 4.000 pohon
- 6) Terlaksananya sosialisasi sumur resap biopori sebanyak 5 kali
- 7) Terlaksananya pemeliharaan hutan kota di 8 lokasi

- b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, dengan kegiatan antara lain : Pengendalian sampah di kawasan konservasi, Pemeliharaan mangrove di SM Pulau Rambut dan Arboretum Mangrove, Pemeliharaan mangrove hutan lindung angke kapuk

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pengangkatan sampah di kawasan konservasi sebanyak 40 m3
- 2) Terlaksananya pemeliharaan mangrove di 2 lokasi
- 3) Terlaksananya pemeliharaan mangrove hutan lindung angke kapuk sebanyak 120 guludan.

- c. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan**, dengan kegiatan antara lain : Pengelolaan data peredaran hasil hutan di Provinsi DKI Jakarta, Inventarisasi perusahaan pengumpul terdaftar, Pengawasan dan penertiban peredaran hasil hutan dan kawasan hutan dan pertanian

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya pengelolaan data peredaran hasil hutan sebanyak 12 laporan
- 2) Terlaksananya inventarisasi perusahaan pengumpul terdaftar sebanyak 100 perusahaan
- 3) Terlaksananya pendataan peredaran hasil hutan dan kawasan hutan sebanyak 12 laporan.

- d. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan**, dengan kegiatan antara lain : pembangunan jalan control hutan lindung Angke Kapuk, pembangunan sarana dan prasarana hutan kota UI.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terbangunnya jalan control hutan lindung angke kapuk sepanjang 70 m'
- 2) Terbangunnya jalan kontrol di hutan kota UI sepanjang 3.700 m'.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan kehutanan menghasilkan *outcome* antara lain :

- 1) Peningkatan luas hutan kota sebesar 3,08 %
- 2) Peningkatan jasa perkayuan 1,02 %
- 3) Jumlah perusahaan pengumpul yang dibina sebanyak 100 perusahaan
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sumur resapan biopori terhadap 100 orang
- 5) Peningkatan jumlah pohon penghijauan yang dipelihara di 8 lokasi hutan kota

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program yang telah dilaksanakan pada urusan energi dan sumber daya mineral, antara lain :

- a. **Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah**, dengan prioritas kegiatan antara lain pengadaan BBM solar untuk Kepulauan Seribu, serta pembangunan sumur bor dan sumur resapan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya pengadaan BBM solar di Pulau Seribu.
- 2) Terlaksananya pembangunan sumur bor Kelurahan Cakung
- 3) Terlaksananya pembangunan sumur resapan di 4 kota administrasi.

- b. **Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi**, dengan prioritas kegiatan antara lain pelaksanaan diklat teknis

di bidang ESDM, dan evaluasi dan monitoring bangunan fasilitas migas.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain:

- 1) Terlaksananya pelatihan teknis bidang ESDM.
- 2) Terlaksananya evaluasi dan monitoring bangunan fasilitas migas sebanyak 250 bangunan

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan energi dan sumber daya mineral menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya pemanfaatan air bawah tanah melalui sumur resapan sebesar 100%.
- b. Meningkatnya penghematan penggunaan BBM Solar di Kepulauan Seribu

4. Urusan Pariwisata

Program yang telah dilaksanakan pada urusan pariwisata antara lain :

- a. **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**, dengan kegiatan antara lain Partisipasi promosi pariwisata luar negeri dan dalam negeri; Pemasangan iklan di media elektronik dalam negeri dan luar negeri; Pemasangan iklan di media cetak dalam negeri dan luar negeri

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya promosi pariwisata luar negeri sebanyak 8 event (Indonesian Food and Culture Festival di Istanbul Turkey, ATM Dubai, KOTFA Korea, ITE Hongkong, TTF India, MATTA Fair Malaysia, ITCMA Bangkok, JATA Jepang) dan dalam negeri sebanyak 8 event;
- 2) Terlaksananya pemasangan iklan di media elektronik dalam negeri sebanyak 19 station dan luar negeri sebanyak 4 station.
- 3) Pemasangan iklan di media cetak dalam negeri sebanyak 8 media cetak dan luar negeri sebanyak 2 media cetak.

- b. **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**, dengan kegiatan antara lain Penyelenggaraan Final Abang dan None Jakarta Tahun 2008, Penyelenggaraan *Jakarta Fashion Week*.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya penyelenggaraan Abang dan None Jakarta Tahun 2008
- 2) Terselenggaranya *Jakarta Fashion Week*

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Urusan Pariwisata menghasilkan *outcome* antara lain :

- 1) Meningkatnya jumlah event promosi pariwisata di luar negeri dari 6 event menjadi 8 event dengan jumlah pengunjung stand pameran sebanyak 24.000 orang
- 2) Meningkatnya jumlah event promosi pariwisata di dalam negeri dari 6 event menjadi 8 event di 10 Provinsi dengan jumlah pengunjung stand pameran sebanyak 36.000 orang
- 3) Meningkatnya pemasangan iklan di media elektronik dalam negeri dari 10 menjadi 19 station sebanyak 1.329 spot.
- 4) Meningkatnya pemasangan iklan di media elektronik luar negeri dari 2 menjadi 4 station sebanyak 338 spot.
- 5) Meningkatnya publikasi di media cetak dalam negeri dari 10 menjadi 15 media
- 6) Meningkatnya publikasi di media cetak luar negeri dari 1 media menjadi 2 media
- 7) Meningkatnya jumlah penyelenggaraan event pariwisata skala internasional di Jakarta dari 6 menjadi 7 event dengan 850 partisipan
- 8) Meningkatnya jumlah tenaga kerja profesi pariwisata terlatih dari 11.546 orang menjadi 11.924 orang atau naik 4 %
- 9) Meningkatnya partisipasi dan sadar wisata masyarakat
- 10) Meningkatnya citra Jakarta Sebagai Destinasi wisata dengan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2008 sebanyak 1.534.785 orang atau naik 26,21%, dan wisatawan nusantara pada tahun

2008 sebanyak 15.741.961 orang atau turun sebesar 24 % dari tahun 2007

11) Meningkatnya Penerimaan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2008 sebesar Rp.1.524.882.384.329 atau naik 25,5 % dari tahun 2007

12) Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara sebanyak 1.534.728 orang.

13) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 15.741.967 orang

14) Penerimaan devisa Wisman US \$ 736,70 juta

15) Penerimaan Devisa Wisnus Rp. 14.17 Triliun

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Program yang dilaksanakan pada urusan kelautan dan perikanan antara lain :

a. **Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Wasdal SDK**, dengan kegiatan antara lain pembuatan *fish shelter*.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pembuatan *fish shelter*
- 2) Terlaksananya penyuluhan peternakan perikanan dan kelautan melalui media cetak dan elektronik.

b. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**, dengan kegiatan antara lain koordinasi, supervisi dan sosialisasi pembarantasan *brucellosis*.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya koordinasi, supervisi dan sosialisasi
- 2) Pemberantasan *brucellosis* dan pengadaan vaksin dan obat-obatan

- c. **Program Pengembangan Budidaya Perikanan**, dengan kegiatan antara lain pelatihan teknis budaya dan pelatihan penangkapan ikan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pelatihan teknis budidaya laut.
- 2) Pelatihan teknis penangkapan ikan

- d. **Program Peningkatan Keamanan Hasil Perikanan**, dengan kegiatan antara lain pengadaan sarana alih usaha, pengendalian mutu ikan di pasar swalayan dan sentra hasil perikanan

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pengadaan sarana alih usaha
- 2) Terlaksananya Pembuatan Fish Shelter
- 3) Tersedianya cold storage sebanyak 1 unit
- 4) Terlaksananya penyuluhan peternakan perikanan dan kelautan melalui media massa Cetak dan elektronik
- 5) Pemberantasan penyakit hewan antara lain Flu Burung

- e. **Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner**, dengan kegiatan antara lain Pembangunan RPH Kapuk Tahap II, pemeriksaan kesehatan pemotongan hewan di RPH Cakung dan RPH Kapuk

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pembangunan RPH Babi Kapuk tahap II
- 2) Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pemotongan hewan di RPH Cakung dan Kapuk

- f. **Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**, dengan kegiatan antara lain pameran dan promosi jak aqua zo, fasilitasi pasar hasil peternakan dan perikanan

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pameran dan promosi *jak aqua zoo*
- 2) Terlaksananya fasilitasi pasar hasil peternakan dan perikanan,
- 3) Terlaksananya pembinaan teknologi diversifikasi olahan hasil perikanan.

g. **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dan Perikanan**, dengan kegiatan antara lain pengadaan *cold storage*,

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pengadaan *cold storage*
- 2) Terlaksananya pembinaan teknologi diversifikasi olahan hasil perikanan.

h. **Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**, dengan kegiatan antara lain analisa dampak pertumbuhan industri terhadap perekonomian masyarakat nelayan di Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya analisa dampak pertumbuhan industri terhadap perekonomian masyarakat
- 2) Tterlaksananya pemetaan potensi ekonomi dan potensi industri nelayan

i. **Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**, dengan kegiatan antara lain pembangunan jalan akses keluar dari pasar grosir.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya penyelesaian pembangunan pasar grosir
- 2) Terlaksananya pembangunan jalan akses keluar dari pasar grosir.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan kelautan dan perikanan menghasilkan *outcome* antara lain :

1. Meningkatnya pemeliharaan ekosistem laut melalui penempatan fish shelter pada tahun 2008 sejumlah 3.522 buah dibandingkan pada tahun 2007 sejumlah 3.410 buah atau naik sebesar 3,3% dengan peningkatan produksi ikan per unit fish shelter rata-rata 40%
2. Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan PPI Muara Angke terhadap luapan banjir laut (ROB) dengan peningkatan produktifitas rata-rata 30%
3. Meningkatnya optimalisasi penangkapan ikan dan produksi hasil perikanan rata-rata 20%
4. Meningkatnya daerah pengelolaan ekosistem laut seluas 122,1 Ha pada tahun 2008 dibandingkan pada tahun 2007 seluas 45 Ha atau naik sebesar 171%
5. Meningkatnya perkembangan Terumbu Karang pada tahun 2008 seluas 16,9 Ha dibandingkan pada tahun 2007 seluas 8 Ha atau sebesar 35 % dari target 71 Ha.
6. Meningkatnya mutu hasil perikanan sebesar 20%
7. Meningkatnya Populasi Ikan Konsumsi di Perairan Umum wilayah DKI sebesar 10% dari 1.603.200 ekor tahun 2007 menjadi 3.700.000 ekor tahun 2008
8. Meningkatnya produksi hasil perikanan budidaya air tawar yang dipasarkan di DKI Jakarta sebesar 2% dari 3.532.600 ton pada tahun 2007 menjadi 3.603.252 ton pada tahun 2008
9. Meningkatnya produksi hasil tambak di DKI Jakarta sebesar 2% dari 100.000 ton pada tahun 2007 menjadi 102.000 ton pada tahun 2008
10. Meningkatnya produksi hasil budidaya air laut di DKI Jakarta sebesar 2% dari 1.529.400 ton pada tahun 2007 menjadi 1.559.988 ton pada tahun 2008

11. Meningkatnya jaminan keamanan ikan yang dipasarkan di swalayan dan sentra pemasaran.
12. Meningkatnya jumlah ikan hias yang dipasarkan di DKI Jakarta sebesar 5% dari 55.066.868 ekor pada tahun 2007 menjadi 57.820.211 ekor tahun 2008

6. Urusan Perdagangan

Program yang telah dilaksanakan pada urusan perdagangan antara lain :

- a. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**, dengan kegiatan antara lain monitoring perkembangan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat DKI Jakarta di Pasar Tradisional, biaya operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya Monitoring Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat DKI Jakarta di Pasar Tradisional
- 2) Terlaksananya operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- b. **Program Peningkatan Promosi dan Pengembangan Ekspor**, dengan kegiatan antara lain Promosi dan Pemasaran IKDK di Gedung Pusat Promosi Kerajinan Jakarta (Kuningan, Cassablanca) Prov. DKI Jakarta, Partisipasi Pameran di Negara German, Partisipasi Pameran di Negara United Emirat Arab (UEA)

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya Promosi dan Pemasaran IKDK di Gedung Pusat Promosi Kerajinan Jakarta (Kuningan, Cassablanca) Prov. DKI Jakarta
- 2) Terlaksananya Pameran di Negara German

3) Terlaksananya Pameran di Negara United Emirat Arab (UEA)

- c. **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri**, dengan kegiatan antara lain Pelaksanaan Pasar Lelang di DKI Jakarta

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya pelaksanaan Pasar Lelang di DKI Jakarta

- d **Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**, dengan kegiatan antara lain promosi produk di dalam dan di luar negeri; pelatihan para pengusaha.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya promosi produk di dalam negeri sebanyak 5 kali
- 2) Terlaksananya promosi produk di luar negeri sebanyak 2 kali
- 3) Terlaksananya pelatihan para pengusaha sebanyak 200 orang

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa perdagangan menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya kepastian pemenuhan 15 jenis kebutuhan pokok pada masyarakat;
- b. Meningkatnya intensitas pelaksanaan pasar lelang agro menjadi 160 transaksi dengan jumlah peserta 273 orang.
- c. Meningkatnya subsidi penyaluran kacang kedelai pada tahun 2007 sejumlah 3.500 perajin menjadi 4.720 perajin pada tahun 2008, dengan nilai 17,9 miliar atau sebesar 98,89 persen dari jumlah anggaran tersedia (Rp18,2 miliar).

7. Urusan Perindustrian

Program yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian antara lain :

- a. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan antara lain Penyediaan Listrik Gedung Kantor, Biaya Telepon dan Biaya Pemakaian Air (TAL), Pengadaan Alat-alat Uji Laboratorium Tekstil.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya penyediaan Listrik Gedung Kantor, Biaya Telepon dan Biaya Pemakaian Air (TAL), Pengadaan Alat-alat Uji Laboratorium Tekstil
- 2) Terlaksananya penyediaan alat-alat Uji Laboratorium Tekstil

- b. **Program Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Perindustrian Yang Ramah Lingkungan**, dengan kegiatan antara lain pelaksanaan Konvensi Gugus Mutu serta perluasan usaha berwawasan lingkungan.

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya konvensi gugus mutu di 27 industri baru
- 2) Terlaksananya perluasan usaha yang menerapkan industri berwawasan lingkungan 3 kawasan

- c. **Program Revitalisasi Sentra-sentra Industri**, dengan kegiatan antara lain penerapan *Sistem Quality Control*

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

Terlaksananya IKM yang menerapkan prinsip mutu (GKM/TQC) sejumlah 340 IKM

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa urusan perindustrian menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menerapkan Gugus Kendali Mutu, sebesar 8 %

- b. Meningkatnya jumlah Industri berwawasan lingkungan sejumlah 27 industri.
- c. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pengusaha industri kecil dan menengah sebanyak 150 pengusaha

8. **Urusan Transmigrasi**

Program yang telah dilaksanakan pada urusan transmigrasi antara lain :

- a. **Program Pengembangan Transmigrasi**, dengan prioritas kegiatan antara lain Penjajakan dan Kerjasama Penetapan Daerah Tujuan Transmigrasi, Penempatan Transmigran ke Lokasi Transmigrasi, Penempatan Transmigran 25 KK di Lokasi Transmigrasi, Survey Animo Masyarakat Bantaran Kali dan Banjir Kanal Timur

Realisasi kegiatan tahun 2008 antara lain :

- 1) Terlaksananya Kerjasama Penetapan Daerah Tujuan Transmigrasi
- 2) Terlaksananya Penempatan Transmigran ke Lokasi Transmigrasi
- 3) Terlaksananya Penempatan Transmigran 25 KK di Lokasi Transmigrasi
- 4) Terlaksananya survey terhadap animo masyarakat Bantaran Kali dan Banjir Kanal Timur

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Urusan Transmigrasi menghasilkan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya pengiriman jumlah penduduk yang menempati daerah bantaran kali untuk bertransmigrasi dari 135 KK pada tahun 2007 dan menjadi 160 KK pada tahun 2008 atau naik 18,5 %.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transmigrasi.

- c. Meningkatnya hubungan kerjasama transmigrasi antar daerah dari 5 daerah menjadi 8 daerah penerima.

D. Permasalahan dan Solusinya

Secara umum permasalahan dan solusinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008, antara lain :

1. Banyak kegiatan pembebasan tanah untuk sarana prasarana umum tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat masih menginginkan harga tanah di atas NJOP. Untuk itu, Perpres 36 Tahun 2006 perlu diterapkan secara konsekwen.
2. Banyak terdapat kesalahan kode rekening, sehingga perlu diperbaiki dan menunggu Perubahan APBD, sehingga terjadi keterlambatan. Untuk itu, perlu pelatihan dan sosialisasi kode rekening dan menyediakan waktu yang cukup untuk input DPA-SKPD.
3. Pemahaman aparat tentang Kepres 80 Tahun 2003 beserta penyempurnaannya masih perlu ditingkatkan lagi agar proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa tidak mengalami keterlambatan.
4. Kekhawatiran pelaksanaan kegiatan (Pengguna Anggaran Cabang dan Panitia Lelang) akan resiko yang harus dipikul berdampak pada kelulusan saat proses mendapatkan sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga sulit untuk menunjuk pelaksana kegiatan.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Dasar Hukum dari Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka Tugas Pembantuan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan Sistem dan Prosedur Penugasan Pemerintah kepada Daerah serta Penugasan dari Provinsi kepada Kabupaten dan atau dari Kotamadya/Kabupaten ke Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi tugas.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi.

Sesuai mekanisme, pemberi Tugas Pembantuan tidak secara langsung memerintahkan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan, namun terlebih dahulu memberitahukan secara resmi kepada penerima Tugas Pembantuan mengenai adanya rencana pemberian Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008 sebanyak 74 program dan 148 kegiatan yang tersebar di 20 SKPD. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pembantuan Yang Berasal Dari Departemen Kelautan Dan Perikanan.

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan melaksanakan program antara lain :

a. Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan dan Kelautan melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya. Adapun realisasinya antara lain : terbangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk nelayan, serta tersalurkannya bantuan langsung masyarakat.

b. Pengembangan Agribisnis

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen. Adapun realisasinya antara lain : terlaksananya pengadaan pos hewan serta pengadaan alat bagi petugas.

2. Tugas Pembantuan Yang Berasal Dari Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program antara lain:

a. Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan fasilitas dukungan manajemen ketransmigrasian di wilayah cepat tumbuh. Adapun realisasinya antara lain terfasilitasinya dukungan manajemen ketransmigrasian guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengerahan dan penempatan transmigrasi di wilayah strategis cepat tumbuh.

2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan pembinaan promosi, investasi dan kemitraan di wilayah strategis cepat tumbuh. Adapun realisasinya antara lain : pelaksanaan promosi, investasi dan kemitraan guna memasyarakatkan kebijakan dan kegiatan P4T (Pembinaan, Penyusunan, Pelaksanaan Persiapan Pemukiman dan Transmigrasi) terhadap 30 KK.

- 3) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah strategis dan cepat tumbuh. Adapun realisasinya antara lain : terfasilitasinya penggerakan dan perpindahan serta penempatan transmigrasi yang memenuhi kriteria aman, nyaman sesuai prosedur yang telah ditetapkan di wilayah strategis dan cepat tumbuh terhadap 30 KK

b. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

- 1) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum. Adapun realisasinya adalah pelaksanaan, pengawasan selama 12 bulan, serta terselenggaranya pembinaan untuk penggunaan tenaga kerja asing sebanyak 30 orang.
- 2) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara melaksanakan kegiatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum. Adapun realisasinya adalah pelaksanaan, pengawasan selama 12 bulan, serta terselenggaranya pembinaan penggunaan tenaga kerja asing sebanyak 30 orang.
- 3) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum. Adapun realisasinya adalah pelaksanaan, pengawasan selama 12 bulan, serta terselenggaranya pembinaan penggunaan tenaga kerja asing sebanyak 50 orang.
- 4) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur melaksanakan kegiatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum. Adapun realisasinya adalah pelaksanaan, pengawasan selama 12 bulan, serta terselenggaranya pembinaan penggunaan tenaga kerja asing sebanyak 30 orang.

c. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

- 1) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi/seminar/workshop/publikasi. Adapun realisasinya antara lain terselenggaranya sosialisasi penggunaan tenaga kerja asing pada 150 perusahaan.
- 2) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat melaksanakan kegiatan Pembinaan / penyusunan program, rencana kerja dan anggaran. Adapun realisasinya antara lain terciptanya koordinasi antara unit kerja dan terlaksananya program kerja bidang pelatihan dan produktivitas tahun 2008 sebanyak 1 dokumen.
- 3) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembinaan / penyusunan program, rencana kerja dan anggaran . Adapun realisasinya antara lain terciptanya koordinasi antar unit kerja dan tersusunnya program kerja bidang pelatihan dan produktifitas tahun 2008 sebanyak 1 dokumen.
- 4) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur melaksanakan kegiatan pembinaan / penyusunan program, rencana kerja dan anggaran. Adapun realisasinya antara lain terciptanya koordinasi antar unit kerja dan tersusunnya program kerja bidang pelatihan dan produktivitas tahun 2008 sebanyak 1 dokumen.
- 5) Kabupaten Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan Pembinaan Penyusunan Program, Rencana Tenaga Kerja. Adapun realisasinya antara lain terciptanya koordinasi antara unit kerja dan tersusunnya program kerja bidang pelatihan dan produktivitas tahun 2008 sebanyak 1 dokumen.
- 6) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembinaan teknis

asuransi. Adapun realisasinya adalah tersedianya dukungan administrasi selama 12 bulan.

- 7) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi. Adapun realisasinya adalah tersedianya dukungan administrasi selama 12 bulan.
- 8) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis masyarakat. Adapun realisasinya adalah tersedianya sumber daya masyarakat yang terampil dan kompeten sebanyak 160 orang.
- 9) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur melaksanakan kegiatan penyediaan pembinaan teknis administrasi. Realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Adapun realisasinya adalah tersedianya dukungan administrasi selama 12 bulan.
- 10) Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur melaksanakan kegiatan penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis masyarakat. Adapun realisasinya adalah tersedianya SDM yang terampil dan kompeten sebanyak 80 orang.
- 11) Sekretaris Kab. Kep Seribu melaksanakan pembinaan teknis administrasi. Adapun realisasinya adalah tersedianya dukungan administrasi kegiatan selama 12 bulan.
- 12) BLK Las Condet melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis masyarakat. Adapun realisasinya adalah tersedianya SDM yang trampil dan kompeten sebanyak 160 orang.
- 13) BLKPI Pasar Rebo melaksanakan kegiatan pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan 2 kejuruan (teknis mesin dan teknis elektro), kegiatan pelatihan kerja berbasis masyarakat dengan 10 kejuruan yaitu : las, teknis pendingin, mesin logam, sepeda motor, otomotif, eletronika industri, sekretaris, listrik, bahasa inggris, dan administrasi kantor, kegiatan pelatihan kerja keliling *Mobile*

Training Unit (MTU) dengan 10 kejuruan yaitu las, bangunan, mesin logam, sepeda motor, tata busana, elektronika komunikasi, administrasi bisnis, listrik, bahasa inggris, dan operator komputer. Adapun realisasinya adalah terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kerja yang mampu, bersaing di bursa kerja sebanyak 370 orang.

- 14) BPPD DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan dan produktivitas tenaga kerja. Adapun realisasinya adalah terlaksananya penyelenggaraan teknis administrasi yang benar dan terarah sebanyak 1 kegiatan, terlaksananya pelatihan *Achievement Motivator Training* (AMT) untuk 75 orang dalam 3 angkatan, terlaksananya bimbingan teknis *Total Factor* Produktivitas perusahaan untuk 25 orang, terlaksananya bimbingan teknis manajemen kinerja untuk 75 orang, tersedianya pedoman program, rencana kerja dan anggaran; serta meningkatkan produktivitas dan kinerja UKM sebanyak 60 orang.

B. Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi

Sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat Kota dan Kabupaten serta Desa Otonom. Lima Kota Administrasi, satu Kabupaten Administrasi, 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan yang ada di DKI Jakarta semuanya bersifat administrasi. Dengan demikian maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan Tugas Pembantuan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerja Sama Antar Daerah/Kota

1 . Realisasi Kerja sama Tahun 2008

a. Kerja sama DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Bodetabekjur).

Pada tanggal 16 Juni 2005 telah ditandatangani kesepakatan kerja sama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, dan Bupati Cianjur tentang Kerja sama antar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur yang diketahui oleh Menteri Dalam Negeri. Kerja sama ini dikoordinasikan oleh Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek. Untuk mendukung Badan kerjasama tersebut, telah ditetapkan sekretariat BKSP Jabodetabekjur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Melalui BKSP Jabodetabekjur sejak tahun 2006 telah disalurkan hibah untuk kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan kepada Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang serta Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2008, hibah diberikan untuk kerja sama di bidang sarana dan prasarana, pendidikan

dan kesehatan untuk setiap daerah masing-masing sebesar Rp 5 Miliar.

Dalam rangka meningkatkan peran BKSP Jabodetabekjur, telah disusun *road map* peningkatan kapasitas aparatur BKSP Jabodetabekjur, serta telah dilaksanakan kajian akademis mengenai revitalisasi kelembagaan kerja sama antar daerah Jabodetabekjur. Bantuan keuangan Pemprov DKI kepada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur sebagaimana dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1. Bantuan Keuangan Kepada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur Tahun 2003-2008

No	Tahun	Jumlah Rp
1	2003	3.605.865.000
2	2004	2.650.000.000
3	2005	1.500.000.000
4	2006	2.000.000.000
5	2007	3.000.000.000
6	2008	2.200.000.000
Jumlah		11.350.000.000

Sumber : Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, Tahun 2008.

Khusus dengan Pemerintah Kota Bekasi, juga dilakukan kerja sama dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.

b. Kerja sama DKI Jakarta dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat

Dalam rangka kerja sama DKI Jakarta dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat telah disusun rencana pengembangan Terminal Agro di sebelah Timur, Selatan dan Barat Jakarta.

c. Kerja sama DKI Jakarta dengan Provinsi se Jawa-Bali

Pada tahun 2008 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional se Jawa-Bali di Jakarta, dan

menghasilkan deklarasi kesepakatan kerja sama regional se Jawa-Bali, untuk advokasi ke Pemerintah Pusat meliputi :

- 1) Optimalisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang terpadu melalui “*one gate policy and programming*”;
- 2) Pembahasan sinkronisasi dan pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dekon TP pada tingkat provinsi khususnya pengalokasian DAK untuk menangani kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Penyempurnaan Permendagri 13 Tahun 2006, khususnya memperjelas mekanisme pembahasan RAPBD oleh Legislatif, berkaitan dengan fungsi *budget* RAPBD, dalam hubungannya dengan efektivitas perencanaan pembangunan.

d. Kerja sama Mitra Praja Utama MPU

Kerjasama MPU meliputi 10 Provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2008 telah diselenggarakan Forum MPU di Surabaya dan menghasilkan deklarasi kesepakatan kerja sama MPU.

e. Kerja Sama Luar Negeri

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan 20 kota diseluruh dunia yaitu Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Berlin, Arkansas, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi, Istambul, Maputo, Kyiv, Moskow, Al Qud's As shareef dan Pyongyang. Selain itu telah pula ditandatangani *Letter of Intent* (LIF), Kwazulu Natal, dan Tripoli.

Kerja sama antar kota (*sister cities*) meliputi berbagai bidang sebagaimana pada tabel 6.2

Tabel 6.2
Bidang Kerjasama DKI Jakarta dengan Kota Lain (*Sister Cities*)

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	TINGKAT KEAKTIFAN	BIDANG YG DIKERJASAMAKAN
1.	Jeddah, Saudi Arabia	Pernyataan Bersama tanggal 10 Maret 1979.	Tidak aktif	1) Pengiriman tenaga ahli 2) Mengadakan bimbingan teknis dan latihan kerja di bidang Tata Kota, Tata Bangunan 3) Penghijauan Kota 4) Land Scaping dan Administrasi.
2.	Seoul, Korea Selatan	Memorandum of understanding (MoU) tanggal 25 Juli 1984.	Aktif	1) Sistem Adm. Umum dan Kependudukan. 2) Manajemen dan Perencanaan Kota. 3) Penataan lalu lintas dan transportasi. 4) Pengawasan dan penataan lingkungan. 5) Pembangunan masyarakat. 6) Program kesenian dan kebudayaan. 7) Peningkatan program ketenagakerjaan.
3.	Islamabad, Pakistan	Deklarasi Bersama tanggal 25 oktober 1984.	Tidak aktif	1) Peningkatan hubungan baik dan saling pengertian 2) kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintah daerah 3) Pertukaran Kebudayaan 4) Pembinaan Generasi Muda 5) Perdagangan dan Pariwisata
4.	Rotterdam, Belanda	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 1 Agustus 1986	Aktif	1) Sistem Informasi Manajemen 2) Teknologi Penanganan Sampah padat dan pemusnahan 3) Sampah 4) City Cargo Terminal 5) Bidang-bidang yang disetujui oleh kedua kota.
5.	Tokyo, Jepang	Pernyataan Bersama tanggal 23 Oktober 1989.	Tidak aktif	1) Manajemen perkotaan 2) kebudayaan. 3) Kesenian. 4) Olahraga dan bidang-bidang lain yang disepakati kedua Pemerintah Kota.
6.	Los Angeles, USA	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 27 Januari 1991.	Kurang aktif	1) Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi. 2) Perjalanan dan Pariwisata. 3) Kesehatan Lingkungan dan Perencanaan Kota. 4) Kebudayaan dan Kesenian. 5) Kepemudaan, Pendidikan dan IPT.ek.

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	TINGKAT KEAKTIFAN	BIDANG YG DIKERJASAMAKAN
7.	Casablanca, Maroko	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 27 Mei 1991	Tidak aktif	1) Pertukaran tenaga ahli dalam rangka peningkatan pengelolaan kota. 2) Perdagangan dan Pariwisata. 3) Administrasi dan Penerangan. 4) Kebudayaan dan Kesenian. 5) Kepemudaan dan Olahraga.
8.	Beijing, RRC	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 4 Agustus 1992	Aktif	1) Administrasi Perkotaan. 2) Kesehatan Masyarakat. 3) Pembangunan Perkotaan. 4) Manajemen Pariwisata. 5) Industri Kecil dan Kerajinan.
9.	Berlin, Jerman	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 13 April 1994	Aktif	1) Perencanaan Kota. 2) Angkutan Umum Kota. 3) Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah. 4) Perencanaan Pembangunan Perumahan. 5) Ekonomi. 6) Kebudayaan.
10.	Arkansas, USA	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 17 November 1993	Tidak aktif	1) Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi. 2) Investasi. 3) Kesenian dan Kebudayaan. 4) Kedokteran Bedah Anak dan Rumah sakit Kanker.
11.	New South Wales, Australia	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 30 Mei 1994	Tidak aktif	1) Investasi 2) Pembangunan Ekonomil Pembangunan Perkotaan 3) Sistem Informasi Geografi 4) Pendidikan dan Pelatihan 5) Pariwisata dan Kebun Binatang.
12.	Paris, Perancis	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 8 September 1995	Tidak aktif	1) Penataan kota, lalu lintas dan angkutan umum. 2) Perlindungan lingkungan hidup. 3) Organisasi administrasi kota. 4) Pendidikan staf administrasi dan teknik. 5) Pengembangan kebudayaan, pendidikan dan olahraga
13.	Bangkok, Thailand	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 21 Januari 2002	Aktif	1) Perdagangan dan investasi 2) Promosi pariwisata dan manajemen 3) Traffic control 4) Perencanaan perkotaan 5) Sumber daya manusia 6) Administrasi pemerintahan daerah
14.	Hanoi, Vietnam	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 23 November	Kurang aktif	1) Perencanaan kota dan manajemen 2) Ekonomi dan perdagangan

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	TINGKAT KEAKTIFAN	BIDANG YG DIKERJASAMAKAN
		2004		3) Pelatihan 4) Pariwisata, kebudayaan dan olahraga 5) Kerjasama dibidang lain yang disepakati bersama.
15.	Jakarta-Istanbul, Turki	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 13 April 2007		1) Pariwisata dan Kebudayaan 2) Pengelolaan Bangunan Bersejarah 3) Ekonomi dan Perdagangan 4) Lingkungan Hidup dan Penghijauan 5) Transportasi Kota dan Manajemen Lalu Lintas 6) Administrasi Pemerintahan Daerah 7) Bidang-bidang lain yang disetujui
16.	Jakarta-Maputo, Muzambique	Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 19 Juni 2007		1) Promosi Kerjasama Lembaga Legislatif 2) Perdagangan dan Usaha Skala Kecil Menengah 3) Promosi Pariwisata 4) Perencanaan Kota dan Infrastruktur 5) Konstruksi dan Pemeliharaan Jalan Umum 6) Rehabilitasi Taman Kota dan Rekreasi 7) Kegiatan Olah Raga, Kebudayaan dan Sosial 8) Ketentraman, Ketertiban dan Pertahanan Sipil
17.	Jakarta-Kyiv, Ukraina	Memorandum of Understanding Tanggal 21 Juni 2007		1) Pengelolaan dan Pembangunan Kota 2) Transportasi Umum 3) Pertamanan dan Kawasan Rekreasi Kota 4) Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah 5) Kebudayaan 6) Pariwisata 7) Olah Raga dan Pendidikan 8) Bidang Lain yang disepakati
18.	Jakarta-Moskow, Rusia	Memorandum of Understanding Tanggal 22 Juni 2007		1) Arsitektur dan Taman Kota 2) Pertamanan dan Monumen Kota 3) Olah Raga, Kebudayaan dan Seni Pertunjukkan 4) Pengelolaan Transportasi Kota 5) Pengelolaan Pariwisata 6) Perdagangan dan Investasi 7) Fasilitasi Program Pertukaran Lembaga Legislatif
19.	Jakarta-Al Quds As Shareef	Memorandum of Understanding Tanggal 22 Oktober 2007		1) Manajemen Krisis dan Bencana 2) Pelayanan Publik

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	TINGKAT KEAKTIFAN	BIDANG YG DIKERJASAMAKAN
				3) Pendidikan dan Pelatihan 4) Sosial dan budaya 5) Pariwisata dan Olah Raga 6)
20.	Jakarta- Pyongyang, Korea Utara	Memorandum of Understaning Tanggal 8 November 2007		1) Ekonomi dan Perdagangan 2) Pembangunan dan Manajemen Kota, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3) Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga 4) Bidang lain yang disepakati
21	Jakarta- Athena, Yunani	Letter of Intent (Lol) tanggal 29 Oktober 2001		1) Administrasi Pemerintahan 2) Pelayanan Pemerintah 3) Pelatihan Kejuruan dan Manajemen Kepegawaian pada Perusahaan 4) Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda & Olah Raga 5) Liingkungan Hidup 6) Kesejahteraan Sosial 7) Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama
22	Jakarta- Kwazulu Natal, Afrika Selatan	Letter of Intent (Lol) tanggal 30 November 2005		1) Perdagangan dan Industri 2) Promosi Pariwisata dan Manajemen 3) Perencanaan Kota dan Infrastruktur 4) Olah Raga, Budaya dan Seni 5) Kerja sama antar DPRD

Sumber : Biro KAKDA Provinsi DKI Jakarta tahun 2008

Sedangkan perkembangan kegiatan dan hasil secara khusus dari masing-masing sister city dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) *International Union of Local Authorities (IULA)* atau sekarang disebut United Cities and Local Government (UCLG). Sejak 1979 Jakarta telah menjadi anggota eksekutif yang ikut berperan aktif dalam pembentukan UCLG dan Gubernur berperan sebagai Dewan Pengurus dan Anggota Council di tingkat dunia maupun Asia-Pasific. Tujuan forum ini adalah sebagai sarana tukar-menukar pikiran dan pengalaman antar pejabat pemerintah dalam mengelola kota.

Kegiatan yang pernah diikuti antara lain :

- a) *Standing Commission on Metropolitan Governmen;*
- b) *Urban Proverty and Environment;*
- c) *Urban Wasted Management;*
- d) *Metropolitan Performance Measuremen;*
- e) *Water Management;*
- f) Lokakarya lainnya mengenai berbagai isu perkotaan.

2) *Asean Network of Major Cities 21 (ANMC 21)* atau Jaringan Kota-Kota Besar Asia abad 21, merupakan organisasi Pemerintahan Kota yang dibentuk di Tokyo oleh 12 Kota Besar Asia pada tanggal 18 Oktober 2001. Kedua belas kota tersebut adalah Tokyo, Bangkok, Beijing, Seoul, Manila, Singapura, Kualalumpur, Taipei, Hanoi, New Delhi, Jakarta dan Yangon. Tujuan dari foun ini adalah membangun citra yang baik bagi anggota ANMC 21 di mata dunia, terutama aspek keamanan dan pelayanan kota, serta sebagai ajang promosi bagi perindustrian, perdagangan dan kebudayaan serta kepariwisataan Asia.

3) *Joint Projects ANMC 21* yang diikuti oleh Jakarta, antara lain :

- a) Promosi pembangunan pesawat jet penumpang ukuran kecil dan menengah;
- b) Proyek belajar jarak jauh Asia;
- c) Jaringan pariwisata, budaya, kerajinan dan kesenian Asia;
- d) Jaringan kota-kota Asia untuk pengendalian emisi kendaraan bermotor;
- e) Pengembangan manajemen dan daur ulang limbah;
- f) Perumusan rencana angkutan umum kota yang terpadu;
- g) Pelatihan klinis bagi konsultan AIDS;

- h) Pembentukan lembaga pembangunan dan manajemen perkotaan Asia;
- i) Jaringan untuk manajemen krisis;
- j) Pengembangan bisnis dan investasi Asia.

4) Jakarta – Rotterdam

- a) Asistensi teknis tentang Sistem Informasi Manajemen oleh Mr. Karelwiesssing dan transportasi barang serta pusat-pusat distribusi oleh Mr. Victor Schoanmakers.
- b) Diskusi teknis dari kota Rotterdam dengan unit terkait tentang Solid Waste management.
- c) Workshop tentang pengelolaan museum yang dihadiri oleh Mr. Kees Plaiser (Museum Sejarah Rotterdam).
- d) Masukan dari pejabat kota Rotterdam (Mr . Martin Dukkar dan Mr. Kees Plaiser) tentang Waste and River Management
- e) Penyerahan peta kekuasaan pemerintah Belanda selama masa perjuangan Kemerdekaan RI kepada Museum Joeang 45.
- f) Penyerahan Wayang Revolusi kepada Museum Wayang Jakarta.
- g) Kunjungan kerja pejabat Kantor Arsip ke Rotterdam dalam rangka pengembangan wawasan mengenai kearsipan.

5) Jakarta – Tokyo

- a) Pengiriman tenaga kerja untuk mengikuti on the job training pada industri di Kota Tokyo atas biaya Pemerintah Metropolitan Tokyo (setiap tahun)
- b) Pengiriman pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Tokyo untuk magang selama 6 sampai 1 tahun

untuk bidang yang diperlukan (terakhir dikirim tahun 2004).

- c) Pengiriman pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk studi banding tentang pengawasan pada pemerintah kota Metropolitan Tokyo (2003).

6) Jakarta – Seoul

- a) Pengiriman staf teknis untuk mendalami tentang jaringan utilitas bawah tanah Kota Seoul, sistim komputerisasi kependudukan, penataan kawasan kumuh dan kesehatan lingkungan.
- b) Pengiriman tenaga kerja untuk magang pada industri di Kota Seoul.
- c) Kunjungan antar DPRD kota Seoul dan Jakarta (2006).

7) Jakarta – Hanoi

- a) Ditandatanganinya MoU pada tahun 2004.
- b) Kunjungan lembaga pengawas Kota Hanoi ke Bawasda Provinsi DKI Jakarta (2006).
- c) Kunjungan DPRD dan pejabat DKI Jakarta ke Hanoi (2006).

- 8)** Terdidiknya pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada berbagai pelatihan di beberapa kota luar negeri dalam rangka kerjasama teknik (hibah) dan jasa ekonomi, antara lain :

- a) *Road Traffic Accident Rescue Course Under the Malaysian Technical Cooperation Program*, dari Pemerintah Malaysia.

- b) *Seminar on Economic and Social Policy Consulting Program for Developing Countries*, dari Pemerintah RRC.
- c) *Seminar on Cities Planning and Development in Developing Countries*, dari Pemerintah RRC.
- d) *English Language and Communication Skill*, dari Pemerintah Singapura.
- e) *Effective Energy System for Sustainable Development*, dari *Asian Institute of Technology* (AIT) di Thailand.
- f) *Fire Fighting Technique II* dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA), Jepang.
- g) *Organization Culture and Management : Toward Effective Organization* (OCM) dari “*Maastricht School of Management*” (MSoM), Belanda.
- h) *Traffic Management* dari Pemerintah Singapura bekerja sama dengan Pemerintah Jepang dalam rangka *Japan-Singapore Partnership Program for The 21Th Century* (JSPP21).
- i) *Public Governance and Administration in Singapore* dari Pemerintah Singapura.
- j) “*Collaborative Models for Excellence in District Governance*” oleh *Learning Potential Service*, *Adelaide*, Australia.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Dasar Hukum

Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebagian besar menyangkut pengelolaan/pemanfaatan asset daerah. Untuk itu, kerjasama dengan pihak ketiga berpedoman pada :

- a) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Pada Pihak Ketiga.

- b) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
- c) Keputusan Gubernur Nomor 74 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendayagunaan Kekayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta.dan Pengembangan BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
- d) Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
- e) Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Secara operasional, kerjasama Daerah dengan pihak ketiga didasarkan pada kesepakatan bersama (MoU)/perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti dengan administrasi lainnya sesuai dengan kesepakatan dimaksud.

2. Mitra Kerja Sama dan Bidang Kerja Sama

- a. Pihak ketiga yang diajak kerja sama dalam bidang investasi adalah perusahaan-perusahaan sebagai berikut :
 - 1) PT. Pembangunan Jaya
 - 2) PT. Food Station Cipinang
 - 3) PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
 - 4) PT. Delta Jakarta
 - 5) PT. Bumi Grafika Jaya
 - 6) PT. Pembangunan Jaya Ancol
 - 7) PT. Ratax Armada
 - 8) PT. Rheem Indonesia
 - 9) PT. Kawasan Berikat Nusantara
 - 10)PT. Alakasa Industrindo

- 11) PT. Jaya Nur Sukses
- 12) PT. Asuransi Bangun Askrida
- 13) PT. Jakarta Propertindo
- 14) PT. Bank DKI Jakarta
- 15) PT. Jakarta Tourism
- 16) PT. Rumah Sakit Haji
- 17) PT. Rumah Sakit Cengkareng
- 18) PT. Rumah Sakit Pasar Rebo
- 19) PT. Cemani Toka
- 20) PT. Pakuan
- 21) PT. Determinan Indah
- 22) PT. Jakarta International Expo
- 23) PT. Pembangunan Jaya.

b. Di bidang keindahan kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan beberapa perusahaan antara lain :

- 1) *Honda Respect Motor*, berupa kerjasama penghijauan 64 pohon Flamboyan, 12 pohon Kamboja Rantai, 52 rumpun bambu Cina dan 12.000 pot tanaman hias di lokasi tepian air Kali Banjir Kanal Barat Jakarta Selatan. Sumber dana dari pihak ketiga senilai 280.000.000.
- 2) PT. Avabanindo Perkasa, berupa kerjasama pengembangan kualitas pencahayaan Tugu Monas sesuai perjanjian tanggal 16 Pebruari 2006 senilai Rp 14.954.277.000 dengan kompensasi pemanfaatan titik reklame.

c. Kerjasama pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dilakukan di bidang perikanan, pusat pertokoan, dan pariwisata, yaitu :

- 1) PT. Hotel Cikini Realty, pada tanggal 17 Juli 2006 dengan isi perjanjian kerjasama Pembangunan,

Pengembangan dan Pengelolaan Hotel dan fasilitasnya di Jl. Cikini Raya nomor 75 , Jakarta Pusat .

- 2) PT. Wahana Cipta Sejahtera, pada tahun 2006 dengan isi perjanjian kerjasama Pembangunan Pusat Grosir Cililitan II (PGC II), Jakarta Timur.
 - 3) PT. AGB Tuna, pada tanggal 21 Nopember 2006 dengan isi perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan pabrik es di Muara Angke.
 - 4) PT. Gamma Investasi Lestari sesuai perjanjian kerjasama tanggal 24 Maret 2006 berupa pengelolaan kompleks Bola Basket Internasional Kelapa Gading.
- d. Kerjasama di bidang sarana prasarana perkotaan
- 1) PT. Suara Metro berupa kerjasama pembangunan pos jaga polisi sebanyak 47 unit senilai Rp 603.480.000 sesuai perjanjian kerjasama tanggal 10 Pebruari 2006 dengan kompensasi pemanfaatan titik reklame
 - 2) PT. Dian Unggul Perkasa, berupa kerjasama pembangunan Selter Bisway di 2 koridor Cawang-Grogol dan Blok M-Kota senilai Rp 15.231.000.000 sesuai perjanjian kerjasama tanggal 10 Oktober 2005 dengan kompensasi pemanfaatan titik reklame.
 - 3) PT. Dian Unggul Perkasa, berupa kerjasama pembangunan kaki tangga jembatan penyeberangan orang, halte dan lift Jalan M.H Thamrin senilai Rp 11.501.983.976 sesuai perjanjian kerjasama tanggal 20 September 2005 dengan kompensasi pemanfaatan titik reklame.
 - 4). PT. Thames dan PT.Palija.

Selain itu masih dilakukan kerjasama pengelolaan air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan pihak ketiga, yaitu PT. Thames dan PT. Palija sejak sejak tanggal 1 Februari tahun 1998.

Demikian pula terdapat kerjasama dalam bidang fisik lainnya yang bersifat BTO (Built, Transfer, Operate) dan BOT (Built, Operate, Transfer).

3. Hasil dari Kerja Sama

Hasil dari kerja sama ini adalah adanya pendapatan daerah yang berasal dari penyertaan modal daerah sebesar Rp.133.327.125.000,00 dari rencana anggaran sebesar Rp.226.827.125.000,00 sehingga Pencapaian targetnya hanya sebesar 58.78 persen (tabel 6.3). Pendapatan juga diperoleh dari kerja sama non investasi (permodalan) baik dalam bentuk *goodwill*, kontribusi dalam bentuk lainnya. Selain dalam bentuk pendapatan, yang diperoleh dari kerja sama ini adalah adanya pemeliharaan dan peningkatan kualitas bangunan-bangunan fisik dan ornamen kota, sarana dan prasarana operasional seperti (*cold storage*) di pelabuhan Muara Angke.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Instansi vertikal sesuai definisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah perangkat dari Departemen-departemen atau lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Atas dasar definisi tersebut, maka instansi vertikal yang ada Jakarta antara lain :

- a. Pengadilan Tinggi Jakarta.
- b. Kejaksaan Tinggi Jakarta .
- c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- d. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
- e. Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta.
- f. Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
- h. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
- i. Kanwil III Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- j. Kanwil VI Direktorat Jenderal Pajak Jaya Khusus.
- k. Kanwil IV Bea dan Cukai Jakarta.
- l. Kepolisian Daerah
- m. Instansi ABRI, seperti Kodam, Armabar, Arhanud

Forum koordinasi disesuaikan dengan besaran dan ruang lingkup permasalahan, sehingga bentuknya dapat berupa :

- a. Musyawarah Pimpinan Daerah Plus
- b. Rapat Pimpinan
- c. Rapat Koordinasi
- d. Rapat Evaluasi
- e. Koordinasi teknis
- f. Rapat biasa.

- g. Koordinasi dalam pemungutan pajak pusat yang ada di daerah.
- h. Bantuan keuangan,
- i. Kegiatan lain yang memerlukan keterlibatan instansi vertikal, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, tim kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tim asistensi dalam suatu kegiatan dan lain-lain

Koordinasi menyangkut berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Konfirmasi dan konsultasi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas instansi vertikal.
- c. Peningkatan kualitas SDM
- d. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- e. Pemecahan/penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan tugas instansi vertikal.
- f. Penerimaan keuangan negara.
- g. Ipoleksosbudhankamnas.
- h. Pembiayaan.

2. Realisasi pelaksanaan kegiatan

Dalam rangka merealisasikan koordinasi pada bentuk yang lebih konkrit, telah dilakukan berbagai bantuan antara lain sebagai berikut.

- a. Bantuan operasional kemitraan dan bantuan infrastruktur Kopertis;
- b. Bantuan Peningkatan dan pemeliharaan MIN,MTs,MAN
- c. Bantuan Operasional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional 5;

- d. Bantuan bagi Instansi Vertikal di bawah koordinasi Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat adalah Kanwil Departemen Agama, dengan jenis ;
- 1) Pelayanan kebersihan Kanwil Depag NIP 15
 - 2) Kesra Guru Agama (NIP 15) di Sekolah Negeri
 - 3) Peningkatan pemeliharaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs), Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
 - 4) Renovasi Gedung Kantor Depag Jakarta Barat
 - 5) Renovasi Gedung Kantor Depag Jakarta Timur
 - 6) Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur
- e. Bantuan bagi Instansi Vertikal di bawah koordinasi Biro Hukum adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan jenis;
- 1) Operasional Kejati DKI Jakarta
 - 2) Operasional Pengadilan Tinggi
 - 3) Bantuan pembangunan Rutan Kanwil Kehakiman
 - 4) Bantuan Kendaraan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
 - 5) Bantuan renovasi Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi
 - 6) Pembangunan Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur
- f. Bantuan Instansi Vertikal di bawah koordinasi Dinas Kesehatan adalah Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dengan jenis;
- 1) Pengadaan Alat Kesehatan di RS Persahabatan
 - 2) Pengadaan Alat Kesehatan di RSCM
 - 3) Genset Stroke Center RSCM

- g. Bantuan Bagi Instansi Vertikal di bawah koordinasi Dinas Tramtib dan Linmas antara lain Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, dengan jenis bantuan ;
- 1) Bantuan Operasional Armabar
 - 2) Bantuan pembangunan kolam renang dan Lapangan sepak bola Koarmabar
 - 3) Bantuan Operasional Kodam Jaya
 - 4) Bantuan kendaraan Operasional Batalyon Zeni Kontruksi 11
 - 5) Bantuan Sarana dan Prasarana fasilitas pendidikan Rindam Jaya
 - 6) Bantuan Kendaraan Bermotor Patroli Polda Metro
 - 7) Bantuan Sarana Kendaraan Operasional Satpolmil di DKI Jakarta POM TNI AD
 - 8) Bantuan Operasional Polda Metro Jaya
 - 9) Bantuan Sarana dan Prasarana Polda Metro Jaya
 - 10) Bantuan Sarana dan Prasarana Pengadaan Alat Penjinak Bom untuk Polda Metro Jaya
 - 11) Bantuan Sarana dan Prasarana Pembangunan Stadion PT.IK
 - 12) Bantuan Operasional Koops AU
 - 13) Bantuan Penyelesaian Ruislag Rs. Esnawan Antariksa
 - 14) Bantuan Sarana dan Prasarana Renovasi Kantor Makodam Jaya pada Kodam Jaya
 - 15) Bantuan Operasional Kodam Jaya
 - 16) Bantuan Sarana dan Prasarana Rehab Gedung Kodim/Randis Kodam
 - 17) Bantuan Kendaraan Operasional Garnisun
 - 18) Bantuan Operasional Kejati
 - 19) Bantuan Operasional Pengadilan Tinggi

- 20) Bantuan Kendaraan Operasional dan Kendaraan Tahanan Kejati.
- h. Bantuan operasional Badan Penelitian Statistik (BPS) untuk penyusunan buku Jakarta Dalam Angka dan Walikotamadya Dalam Angka
 - i. Bantuan Operasional Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN)

D. Penataan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penataan batas wilayah antara lain dimaksudkan untuk memperjelas batas wilayah antara Kelurahan, antar Kecamatan, antar Kotamadya/Kabupaten Administrasi serta antar DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Dalam penataan batas wilayah ini pernah terjadi sengketa antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pemeliharaan batas wilayah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain :

- a. Pemasangan 15 patok batas antar Provinsi.
- b. Sosialisasi peta batas wilayah bagi aparat wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Rapat koordinasi membahas perbatasan antar provinsi, yaitu dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
- d. Penetapan keputusan bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta , Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten tanggal 14 September 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1997 tentang Penetapan Titik

Koordinat Tanda batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

e. Monitoring dan evaluasi tanda batas antar provinsi.

3. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2002 muncul sengketa batas wilayah dengan Provinsi Banten. Sampai saat ini masalah tersebut tidak pernah diselesaikan secara hukum maupun administratif khususnya oleh Departemen Dalam Negeri. Bahkan kasus ini berhenti begitu saja tanpa ada perkembangan lebih lanjut dari pihak Banten maupun DKI Jakarta.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana dapat datang dari berbagai sumber, baik dari kejadian alam maupun akibat perilaku manusia itu sendiri. Demikian pula bentuknya juga dapat bermacam-macam. Dilihat dari kondisi geografi, demografi, sosial maupun kedudukan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara, ada beberapa potensi yang menyebabkan Provinsi DKI Jakarta rawan bencana antara lain :

1. Sebagai daerah pantai, bencana mungkin datang dari laut seperti adanya banjir pasang air laut, tsunami dan erosi pantai (abrasi);
2. Sebagai muara dari 13 sungai, potensi bencana berupa banjir, pencemaran air dan sampah yang terbawa dari daerah hulu;
3. Sebagai daerah yang padat penduduk, bencana yang potensial terjadi seperti kebakaran dan wabah penyakit;
4. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta memiliki potensi menjadi tempat pelaku kejahatan nasional maupun internasional, seperti kegiatan terorisme, perdagangan narkoba dan lain-lain;

Dari beberapa potensi tersebut, terdapat bencana yang intensitas/frekuensinya cukup tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Bencana Yang Terjadi

a. Kebakaran

Kasus kebakaran di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Pada tahun 2008 terjadi 818 kasus kebakaran dengan kerugian sekitar Rp 213 miliar. Adapun korban jiwa sebanyak 13 orang meninggal dan 55 orang luka-luka. Adapun material yang terbakar terdiri dari bangunan perumahan 3.260 unit, bangunan umum 624 unit, bangunan industri 26 unit, kendaraan 72 unit dan lain-lainlain sebanyak 214 unit.

Penyebab kebakaran sebagian besar dari arus pendek listrik yaitu 475 kasus, kompor yang meledak 82 kasus, akibat rokok 49 kasus, akibat lampu 20 kasus dan akibat lainnya 193 kasus.

b. Banjir

Jakarta merupakan daerah rawan banjir, baik banjir tahunan maupun banjir lima tahunan. Siklus banjir lima tahunan terjadi pada tahun 2002 dan 2008 yang menggenangi lebih dari 60% wilayah Jakarta. Pada saat banjir tahun 2008 wilayah Jakarta yang terendam banjir mencapai 70% (454,8 km²) dengan kerugian materil yang besar.

c. Wabah Penyakit Menular,

Terutama DBD dan Diare serta akhir-akhir ini ditambah Flu Burung. Kasus DBD dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Tahun 2003 ada 14.071 pasien dengan korban meninggal mencapai 0,3%. Tahun 2004 terdapat 20.640 pasien dan 0,4% diantaranya meninggal. Tahun 2005 jumlah pasien meningkat lagi mencapai 23.453 orang meninggal 0,3%. Dan tahun 2006 mencapai 24.046 pasien, yang meninggal 0,2%. Pada tahun 2007 pasien meningkat 31.836 diantaranya meninggal 86 orang. Sedangkan pada tahun 2008 pasien mencapai 28.361, yang meninggal 26 orang, Penyakit Flu Burung mulai terjadi

tahun 2005 dengan 7 orang pasien dan 6 orang meninggal. Sedangkan tahun 2006 terdapat 11 pasien, yang meninggal 10 orang. Penyakit ini memakan korban yang sangat besar karena mencapai 90% pasien meninggal. Penderita Flu Burung tahun 2008 sebanyak 6 orang diantaranya meninggal 4 orang. Sedangkan tahun 2007 pasien mencapai 8 orang meninggal 7 orang.

2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

a. Antisipasi Bencana Kebakaran

Upaya pencegahan antara lain dilakukan dengan ;

- 1) Kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 2) Pemeriksaan dan pengawasan bangunan dan lingkungan termasuk akses mobil pemadam kebakaran, sumber air dan tempat berkumpul untuk kepentingan rencana operasional kebakaran.
- 3) Pelayanan teknis pencegahan kebakaran kepada masyarakat.
- 4) Pembinaan teknis terhadap kegiatan pendataan bangunan dan lingkungan.
- 5) Sosialisasi pengamanan rumah, gedung dan bangunan dari bahaya kebakaran.
- 6) Pelatihan dan simulasi penyelamatan jika terjadi kebakaran bagi masyarakat maupun pengguna gedung perkantoran.
- 7) Penyiapan Ala Pemadam Api Ringan (APAR) pada setiap ruangan kerja di gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, serta gedung-gedung lain yang memiliki potensi kebakaran.

- 8) Pemeriksaan dan pengawasan secara berkala bangunan dan atau lingkungan terhadap potensi kebakaran, sarana keselamatan jiwa, kesiapan sarana pencegahan kebakaran, aksesibilitas petugas pemadam kebakaran dan sistem pengamanan kebakaran.
- 9) Pengawasan dan pengendalian tata cara penyimpanan dan menggunakan serta mengangkut barang mudah terbakar dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3).
- 10) Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan penanggulangan

Tabel 6.4.

Sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
A.	Kendaraan Operasional	
	1. Mobil Pompa	139 unit
	2. Mobil Resque	6 unit
	3. Mobil Tangga	6 unit
	4. Mobil Break Squart	3 unit
	5. Mobil quick response & hose retrival	18 unit
	6. Mobil BA	3 unit
	7. Mobil Foam D.C	3 unit
	8. Mobil Snorkel	5 unit
	9. Mobil Submersible	12 unit
	10. Mobil Portable Pemadam Kebakaran	83 unit
B.	Pos pemadam dan Sumber Air	
	1. Pos	68 unit
	2. Kantor Kasi Sektor	19 unit
	3. Hidran	1.439 unit
	4. Tangki Air	10 unit
	5. Tandon Air	90 unit
C.	Peralatan Pertolongan	
	1. Perahu Karet	129 buah
	2. Motor Tempel	80 buah
	3. Dayung	450 buah
	4. Life Jacket (Pelampung)	664 buah
	5. Jaket Kebakaran	3.008 buah
D.	Personil	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
	1. Petugas Pamadam Kebakaran	382 orang
	2. Inspektur Kebakaran	149 orang
	3. Petugas Penyelamatan	72 orang
	4. Petugas Penyuluh Lapangan	52 orang
	5. Montir	74 orang
	6. Instruktur Diklatkar	66 orang
	7. PHB	156 orang
	8. Polsus	10 orang
	9. Pengemudi	250 orang
	10. Staf	477 orang
	11. PTT	1.450 orang
	12. BKO	100 orang

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2008

b. Antisipasi Bencana banjir

- 1) Sosialisasi pemeliharaan kebersihan lingkungan.
- 2) Pembuatan sumur resapan oleh warga di daerah-daerah resapan air.
- 3) Kerja bakti kebersihan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat.
- 4) Pemeliharaan kali, waduk, saluran, pintu air, gorong-gorong/ duiker, dan sarana pengendali banjir lainnya.
- 5) Pembangunan Banjir Kanal Timur.
- 6) Peringatan dini dengan memanfaatkan fungsi pintu air sebagai indikator tingkat kesiagaan banjir, seperti pintu air Katulampa, Depok dan Manggarai.
- 7) Penyiapan tempat-tempat pengungsian pada setiap Kelurahan, termasuk penyiapan dapur umum.
- 8) Koordinasi dan siaga banjir lintas sektoral.

c. Antisipasi Wabah Penyakit

- 1) Penyuluhan kebersihan dan pola hidup sehat melalui berbagai cara dan media.

- 2) Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap hari Jum'at selama 30 menit dari pukul 09.00 sampai dengan 09.30.
- 3) Pemeriksaan jentik nyamuk dengan merekrut juru pemantau jentik (Jumantik) yang dikoordinasikan oleh Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan.
- 4) Pembentukan Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) di Provinsi DKI Jakarta.
- 5) Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas, dengan inti :
 - Unggas yang dipelihara di permukiman sejak tanggal 17 Januari 2007 secara sukarela ditiadakan (dikonsumsi, dijual atau dimusnahkan)
 - Dilarang memelihara unggas di permukiman.
 - Unggas yang dipelihara harus memiliki sertifikat kesehatan hewan atau tanda khusus.
 - Peternakan, penampungan, pemotongan dan penjualan unggas akan direlokasi secara bertahap ke tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Selain potensi bencana kebakaran, banjir dan wabah penyakit, potensi lain adalah bencana akibat tindak sabotase dan teriorisme mengingat Jakarta sebagai kota internasional. Sedangkan bencana lainnya adalah gempa bumi, karena Jakarta berada pada daerah rawan gempa terutama yang berasal dari Selat Sunda dan Laut Samudra Hindia.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Di DKI Jakarta terdapat beberapa kawasan dalam arti luas, yaitu suatu wilayah yang dikelola oleh pihak tertentu karena memiliki karakteristik atau fungsi tertentu. Jadi kawasan ini bukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004. Kawasan di Provinsi DKI Jakarta yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Jenis Kawasan

- a. Kawasan otorita (Dikelola Pusat), yaitu Gelora Bung Karno dan Bandar Baru Kemayoran.
- b. Kawasan Pelabuhan (Dikelola Pusat, Pemda dan Swasta), yaitu : Pelabuhan Tanjung Priok; Pelabuhan Sunda Kelapa; Pelabuhan Ikan Muara baru; Pelabuhan Marunda; dan Pelabuhan Khusus (Bogasari dan Pertamina).
- c. Kawasan Bandar Udara (Dikuasai ABRI), yaitu Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
- d. Kawasan Industri (Dikelola Pemda dan Swasta), yaitu : Kawasan berikat Nusantara; dan Perkampungan Industri Kecil (PIK).
- e. Kawasan Kehutanan (Dikelola Pemda), yaitu Hutan Lindung Muara Angke; dan Taman Laut Kepulauan Seribu.
- f. Kawasan Pariwisata (Dikelola oleh Badan Pengelola Nasional dan Daerah), yaitu Taman Mini Indonesia Indah; Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur; Ancol, Kebun Binatang Ragunan.
- g. Kawasan Jalan Bebas Hambatan (Dikuasai PT. Jasa Marga dan Swasta), yaitu : Jalan Tol Dalam Kota; Jalan Tol Merak; Jalan Tol Jagorawi; Jalan Tol Cikampek; Jalan Tol TB Simatupang (Pondok Indah); dan Jalan Tol Prof. Sedyatmo.
- h. Kawasan Militer (dikuasai ABRI), yaitu : Kawasan Militer Cijantung; dan Kawasan Militer Cilangkap.

2. Sumber Anggaran

Anggaran pengelolaan kawasan-kawasan tersebut dibebankan kepada APBN untuk kawasan yang dikelola oleh Pusat dan BUMN, APBD untuk kawasan yang dikelola oleh Pemda, dan anggaran swasta untuk kawasan yang dikelola swasta.

3. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat berharap kawasan-kawasan yang dikelola oleh Pusat dapat dikelola oleh Pemda, atau minimal ada kontribusi terhadap Pemda. Sudah beberapa kali hal ini disampaikan kepada Pusat, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan yang realistis.

BAB VII

PENUTUP

Sebagai Penutup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2008, diharapkan materi yang ada dalam LKPJ Tahun 2008 dapat menjadi bahan pembahasan untuk dirumuskan suatu catatan ataupun rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang nantinya akan berguna dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun ke depan.

Secara substansi LKPJ Tahun 2008 adalah *progress report* pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta permasalahan dan solusinya berdasar RKPD Tahun 2008 yang merupakan tahun transisi dari Renstrada 2002-2007 menjadi RPJMD DKI Jakarta 2007-2012 karena pada saat penyusunan RKPD Gubernur baru belum terpilih sehingga program yang digunakan adalah program indikatif yang mengacu pada Pemendagri 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa keberhasilan pembangunan yang dicapai selama tahun 2008. Namun demikian dibalik keberhasilan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, masih perlu upaya-upaya nyata agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai lebih optimal.

Demikian, LKPJ Tahun 2008 ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua untuk menyelesaikan tugas mulia dalam membangun kota Jakarta tercinta, agar menjadi kota idaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Matriks Indikator Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2006-2008**

Deskripsi	2006	2007	2008
EKONOMI			
1. PDRB-Harga Berlaku (Triliun Rp.)	501,57	564,04	677,44
2. PDRB – Harga Konstan 2000 (Triliun Rp.)	312,68	332,97	353,54
3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,90	6,44	6,2
4. PDRB Per Kapita			
a. Dalam Jutaan Rupiah	57,26	62,5	74,0
b. Dalam US\$	5,913	6.917	7.756
5. Struktur Ekonomi (%)			
a. Pertanian & Pertambangan	0,58	0,57	0,58
b. Industri, Listrik & Air	28,17	28,23	28,14
c. Perdagangan & Jasa	71,25	71,20	71,28
6. Tingkat Inflasi (%)	6,03	6,04	11,11
7. Kurs Rp Terhadap US\$	9.020	9.034	9.545
8. Jumlah Wisman (Juta Orang)	1,22	1,22	1,53
9. Total APBD (Trilyun Rp.)	17,43	17,89	17,39
10. Jumlah Penduduk Bekerja (Juta Orang)	3,53	3,84	4,19

Deskripsi	2006	2007	2008
INVESTASI			
1. Kebutuhan Pembentukan Modal (investasi) Total – Harga Berlaku (trilyun Rp)	179,35	212,34	240,97
2. Kebutuhan Pembentukan Modal (investasi) Total – Harga Konstan (trilyun Rp)	105,26	112,33	122,16
3. ICOR	4,8	4,4	5,2
4. Kemampuan Investasi Pemda DKI Jakarta (Trilyun Rp)	7,45	7,93	8,5
5. Peranan Investasi Pemda DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	4,16	3,8	3,5

**Lampiran 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Menurut Sektor
Tahun 2006-2008**

Deskripsi	2006	2007	2008
1. Pertanian	1,13	1,55	0,77
2. Pertambangan	1,87	0,46	0,32
3. Industri Pengolahan	4,97	4,60	3,87
4. Listrik, Gas & Air Bersih	4,99	5,20	6,32
5. Konstruksi	7,12	7,81	7,67
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,47	6,88	6,25
7. Pengangkutan & Komunikasi	14,36	15,25	14,97
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,82	4,47	4,31
9. Jasa-jasa	5,56	6,08	6,05
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	5,95	6,44	6,18
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI tanpa MIGAS	5,96	6,46	6,19

Deskripsi	2006	2007	2008
SOSIAL			
1. Jumlah Penduduk (Juta Orang)	8,76	9,06	9,1506
2. Jumlah Angkatan Kerja (Juta Orang)	4,12	4,40	4,77
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	14,31	12,57	12,16
4. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	407,1	405,7	379,6
5. Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)	4,6	4,5	4,29
6. Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita	1,53	1,55	1,54
7. Angka Kematian Bayi (IMR)	14,0	8,40	8,2
8. Angka Harapan Hidup (e_0)	74,14	75,80	75,9
9. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,10	11,16	11,56
10. Angka Melek Huruf (%)	98,34	98,83	98,68
11. Angka Partisipasi Sekolah			
a. 7 - 12 Tahun	98,46	98,73	98,83
b. 13 - 15 Tahun	90,16	90,36	90,75
c. 16 - 18 Tahun	60,26	61,05	63,54

Lampiran 4. Realisasi APBD 2008

(dalam Triliun Rupiah)

	2007			2008		
	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
Uraian						
I. PENDAPATAN DAERAH	18,66	16,671	89,35	19,03	19,25	101,16
- Pendapatan Asli Daerah	10,29	8,733	84,87	10,38	10,48	101
- Dana Perimbangan	7,572	7,254	95,8	8,52	8,73	102,45
- Lain-lain Pendapatan yang sah	0,796	0,684	85,93	0,63	0	0
II. BELANJA DAERAH	20,636	17,284	83,76	20,117	15,955	79,31
Surplus/Defisit	-1,976	-0,613	31,02	-1,085	3,266	301,01
III. PEMBIAYAAN DAERAH						
- Penerimaan Daerah	2,02	2,02	100	1,36	0,18	13,42
- Pengeluaran Daerah	0,044	0,043	97,72	0,278	0,183	65,69
• Transfer Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
• Penyertaan Modal	-	-	-	0,226	0,133	58,85
• Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	0,0386	0,0383	99	0,0519	0,0497	95,89
• Pembayaran Utang Pihak Ketiga	0,005	0,005	95	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	0	1,364		0	4,447	

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009